



TUGAS AKHIR - RP 141501

**PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF
BATIKMELALUI PENDEKATAN
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKALDI
KABUPATEN PAMEKASAN**

**WILDA AL ALUF
NRP 3611 100 008**

**Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic. Rer. Reg**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2015**



FINAL PROJECT - RP 141501

**BATIK INDUSTRIAL DEVELOPMENT
THROUGH AN APPROACH OF
LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
IN PAMEKASAN REGENCY**

**WILDA AL ALUF
NRP 3611 100 008**

Supervisor:

Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic. Rer. Reg

**DEPARTEMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
Faculty of Civil Engineering and Planning
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2015**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada

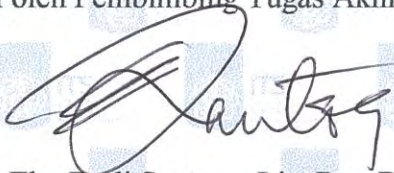
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

WILDA AL ALUF

NRP. 3611 100 008

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:



Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic. Rer. Reg.
NIP.196107261989031004



SURABAYA, JULI 2015

**PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK
MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Nama : Wilda Al Aluf
NRP : 3611 100 008
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
FTSP - ITS
Dosen Pembimbing : Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg

Abstrak

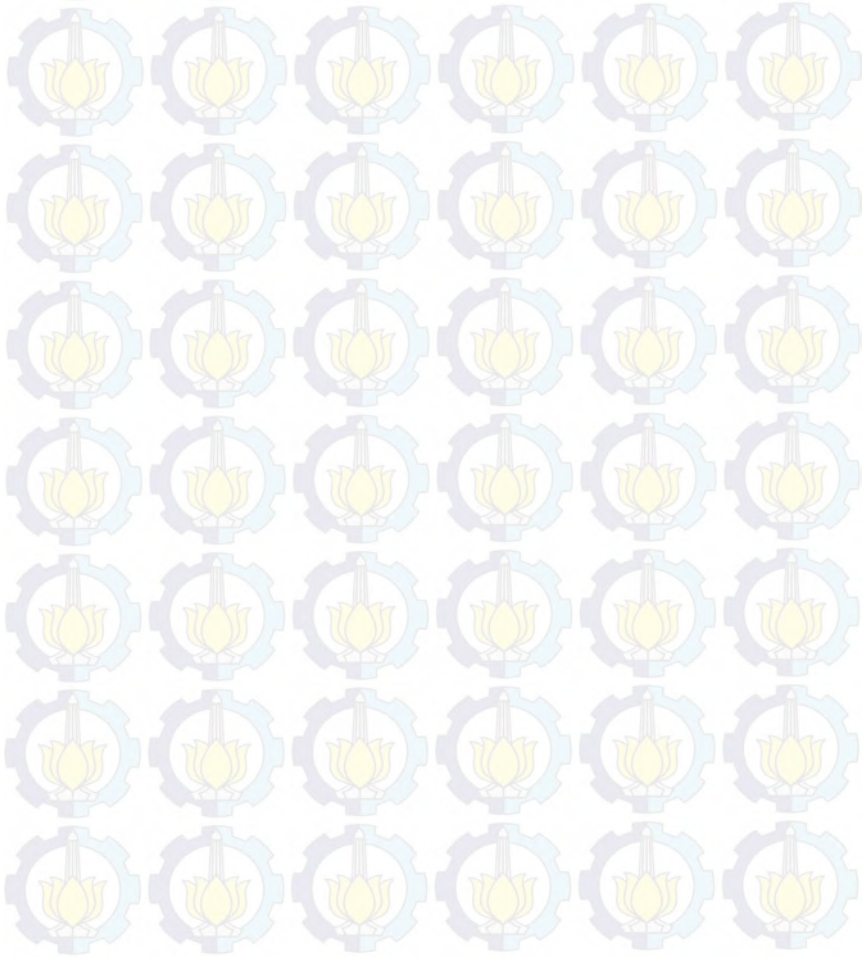
Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten miskin di Jawa Timur membutuhkan suatu penggerak perekonomian lokal. Batik yang merupakan salah satu ciri khas lokal Kabupaten Pamekasan adalah salah satu potensi yang dapat diandalkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Akan tetapi, kondisi infrastruktur, kelembagaan, dan sistem produksi yang terdiri dari SDM dan teknologi menjadi kendala berkembangnya industri batik di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menentukan arahan yang tepat untuk mengembangkan industri batik di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Local Economic Development. Tahapan penelitian ini, yang pertama menentukan produktivitas pengrajin untuk mengidentifikasi karakteristik industri batik Pamekasan. Kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik menggunakan Confirmatory Factor Analysis. Selanjutnya, melakukan analisis klaster yang kemudian dikomparasikan dengan karakteristik industri untuk menghasilkan tipologi industri batik. Dari tipologi yang dihasilkan, disusun arahan pengembangan industri batik melalui analisis delphi.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah 5 tipologi industri batik. Tipologi 1 terdiri dari Desa Klampar, Toket dan Larangan Badung. Arahan untuk tipologi 1 ditekankan pada pengembangan variabel-variabel pada faktor kelembagaan. Tipologi 2 terdiri dari Desa Panaan dengan arahan pengembangan pada variabel dalam faktor sistem produksi dan kelembagaan. Tipologi 3 adalah Desa Angsanah, dimana arahan pengembangan ditekankan pada variabel dalam faktor kelembagaan. Tipologi 4 adalah Desa Kowel, Waru Barat dan Candi Burung dengan arahan pengembangan pada

variabel dalam faktor kelembagaan dan sistem produksi. Desa Rang Perang Daya, RekKerek, Banyuplle, Pegantenan dan Pagendingan tergolong dalam tipologi 5. Arahkan untuk tipologi 5 adalah pengembangan variabel-variabel pada faktor sistemproduksi, infrastruktur dan kelembagaan.

Kata Kunci : Kesejahteraan,EkonomiLokal, Industri Batik.



BATIK INDUSTRIAL DEVELOPMENT THROUGH AN APPROACH OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN PAMEKASAN REGENCY

Name : Wilda Al Aluf
NRP : 3611 100 008
Subject : Urban and Regional Planning
FTSP - ITS
Supervisor : Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg

Abstract

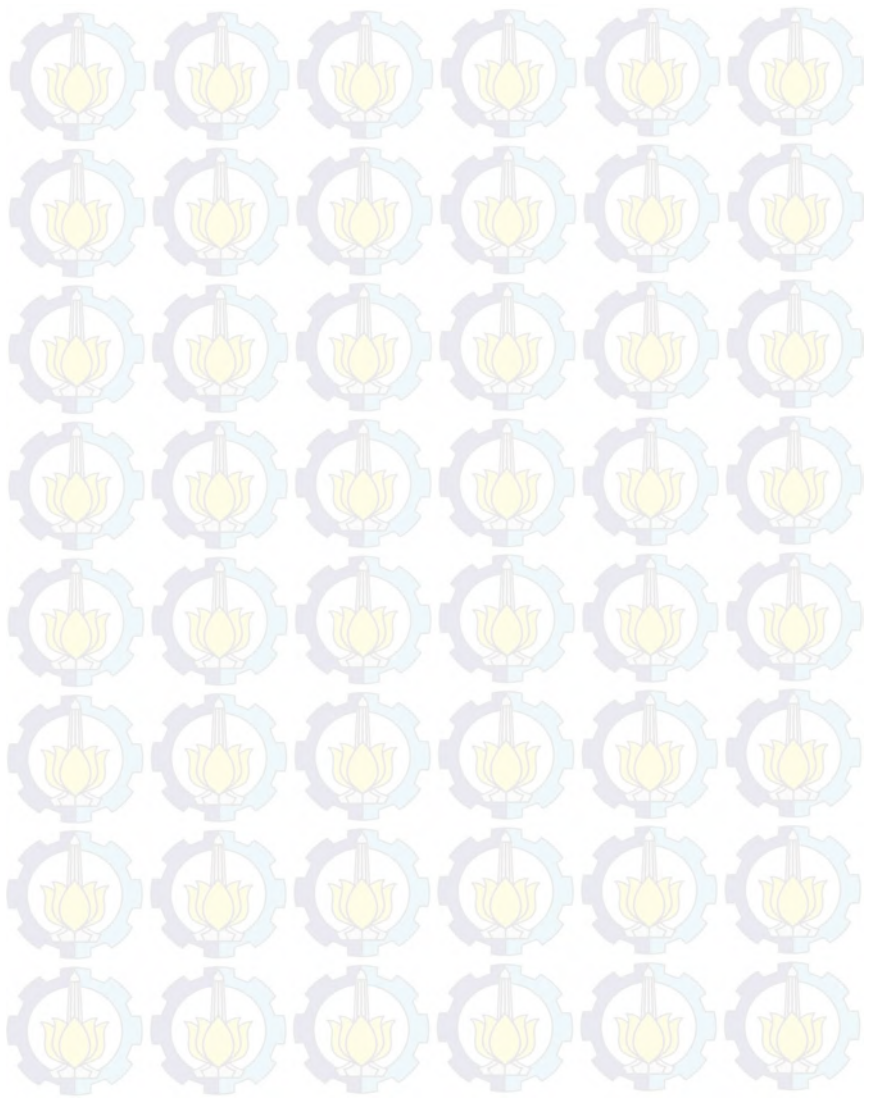
Pamekasan, as it is one of regency in East Java, needs any support for enhancing local economy. So far, Batik, as one of local property owned by Pamekasan regency, is one of potential reliable support to encourage the society's prosperity and territorial development. Yet, some of elements can be obstacle. They may come up from infrastructure, institutional, and producing system in which Human Resources and Technology be constraint of Pamekasan regency industrial development. That's why; this research aims at establishing any appropriate way of developing batik industry in Pamekasan regency.

This research used Local Economic Development approach. The steps of this research were, first, to determine the craftsman productivity in order to identify the typical batik industry of Pamekasan. Second, was to analyze any factors influencing batik industrial development using Confirmatory Factor Analysis. The next after, having cluster analysis which then was compared with typical industry in order to obtain batik industrial typology. And of the typology result, the appropriate way of developing batik industrial was compiled trough Delphi Analysis.

The final point of this research was 5 typologies of batik industry. Typology 1 consisted of Klampar village, Toket, and Larangan Badung. The appropriate way of typology 1 was emphasized on developing any variables to the institutional factors. Typology 2 consisted of Panaan village with way of developing on the variables of producing system and institutional. Typology 3 consisted of Angsanah village which the appropriate way was emphasized on variables of institutional factors. Typology 4 was Kowel village, Waru Barat and Candi Burung with focusing on way of developing on variables of institutional factors and producing system. Rang Perang Daya village, RekKerek, Banyuplle, Pegantenan, and Pagendingan included on the

typology 5 which developing variables on producing system factors, infrastructures and institutional were emphasized.

Key Words: Prosperity, Local Economy, Batik Industry.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah TUGAS AKHIR dengan judul “PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DI KABUPATEN PAMEKASAN” ini dengan tepat waktu.

Dalam proses penyelesaian tugas ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta nasehat. Adikku Dosi yang selalu mengerti kesulitan kakaknya. Keluarga besar yang ikut mendoakan demi kelancaran perkuliahan penulis.
2. Bapak Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan ilmu, nasehat, waktu dan masukan yang sangat membangun dalam penyusunan tugas ini.
3. Dosen Pengampu Mata Kuliah Tugas Akhir Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST., M.Sc., yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
4. Dosen penguji Tugas Akhir Ibu Rulli Pratiwi Setiawan, ST. MSc., Bapak Dr. Ir. Nanang Setiawan, SE. MS., dan Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST., M.Sc., yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun, sehingga Tugas Akhir ini dapat dinyatakan lulus sidang.
5. Dosen dan karyawan di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS yang telah banyak membantu demi kelancaran penelitian ini.
6. Instansi terkait baik di Kabupaten Pamekasan maupun Provinsi Jawa Timur serta pengrajin batik Pamekasan yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu

7. Teman-teman "PERISAI" PWK ITS 2011, yang tidak jarang menghibur disaat penulis suntuk dengan tugas kuliah, khususnya mata kuliah Tugas Akhir.
8. Teman seperjuangan Laras, Ulvi, Epaw, Bagus, Bagiar, Abdiel, Adit, Anjar, Nizar dan Tyton. Terimakasih sudah menjadi tim yang sangat kompak, khususnya selama semester 3 hingga semester 7, dari kalian saya belajar banyak.
9. Aulia, Nikita, Risty, dan Harits meskipun sangat sering ngajak makan disaat saya berusaha fokus mengerjakan Tugas Akhir ini, tetapi mereka teman yang selalu bisa membuat tertawa dan tempat *sharing* banyak hal.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun sangat membantu dalam kelancaran pengerjaan tugas akhir ini.

Serta berbagai pihak yang tidak penulis sebutkan disini, tetapi turut berkontribusi dalam penyelesaian matakuliah TUGAS AKHIR ini. Semoga Allah SWT memberikan karunianya dan membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari masih banyak yang dapat dikembangkan dan kekurangan dari tugas ini. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan tugas mata kuliah Tugas Akhir ini.

Surabaya, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR PETA	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran	6
1.4. Ruang Lingkup	7
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah	7
1.4.2. Ruang Lingkup Pembahasan	11
1.4.3. Ruang Lingkup Substansi	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.5.1. Manfaat Teoritik	11
1.5.2. Manfaat Praktis	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
1.7. Kerangka Berpikir	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengembangan Wilayah	15
2.2. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	16
2.2.1. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal	16
2.2.2. Komponen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	17
2.2.3. Indikator dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	19
2.3. Industri	26
2.3.1. Industri Kreatif	27

2.3.2. Industri Kecil Menengah (IKM)	28
2.3.3. Kinerja Industri	30
2.3.4. Produktivitas Industri	30
2.3.5. Kinerja Industri Batik.....	31
2.4. Sintesa Kajian Pustaka	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	35
3.2. Jenis Penelitian.....	35
3.3. Variabel dan Definisi Operasional	36
3.4. Data dan Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4.1. Data dan Metode Pengumpulan Data Primer	37
3.4.1. Data dan Metode Pengumpulan Data Sekunder	37
3.5. Populasi dan Sampel	41
3.6. Teknik Anlisis Data	46
3.7. Tahapan Penelitian	47
3.7.1. Identifikasi Krakteristik Usaha Batik.....	47
3.7.2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik	48
3.7.3. Penentuan Tipologi Industri Batik	54
3.7.4. Penentuan Arah Pengembangan Industri Batik	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

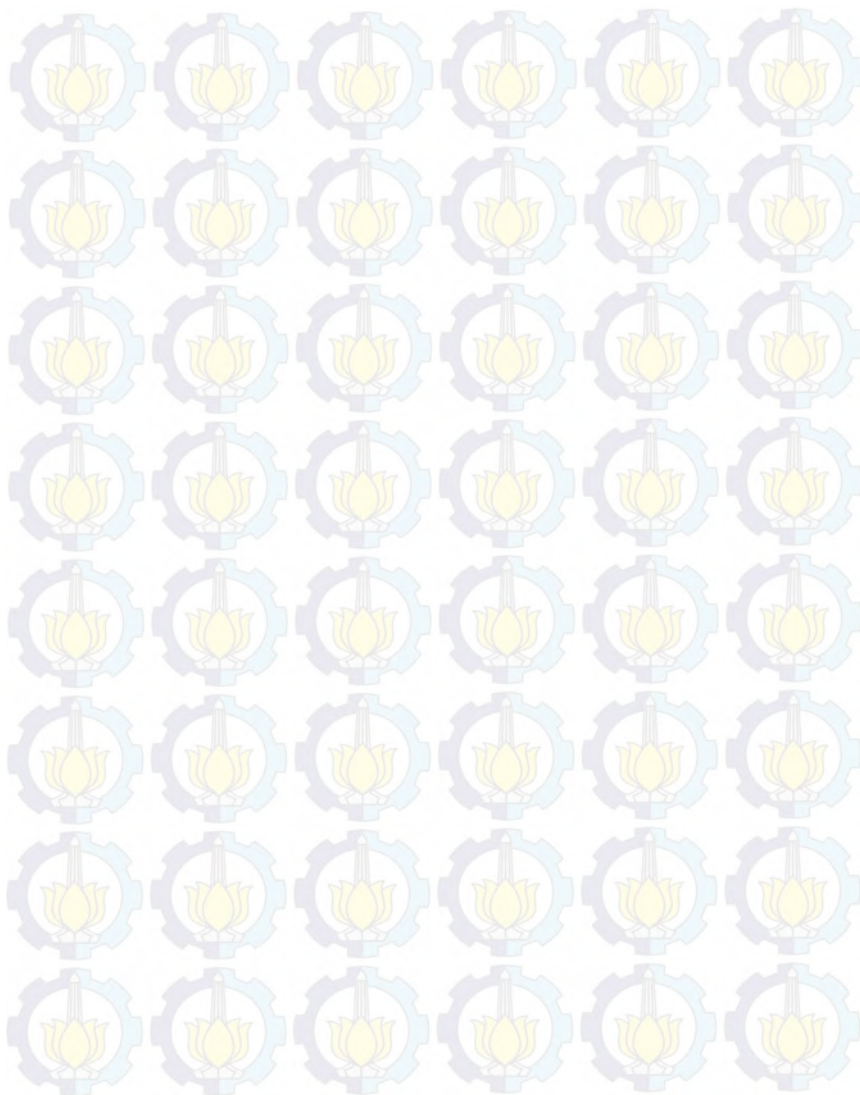
4.1. Gambaran Umum	59
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	59
4.1.2. Gambaran Umum Wilayah Studi	59
4.1.3. Gambaran Umum Industri Batik.....	65
4.1.4. Penelitian Sejenis	94
4.2. Analisis.....	97
4.2.1. Identifikasi Karakteristik Usaha Bati	97
4.2.2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industi Batik Pamekasan	103
4.2.3. Penentuan Tipologi Industri Batik Pamekasan ...	109

4.2.4. Arahana Pengembangan Industri Batik.....	125
---	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	151
5.2. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN	161
BIODATA PENULIS.....	213

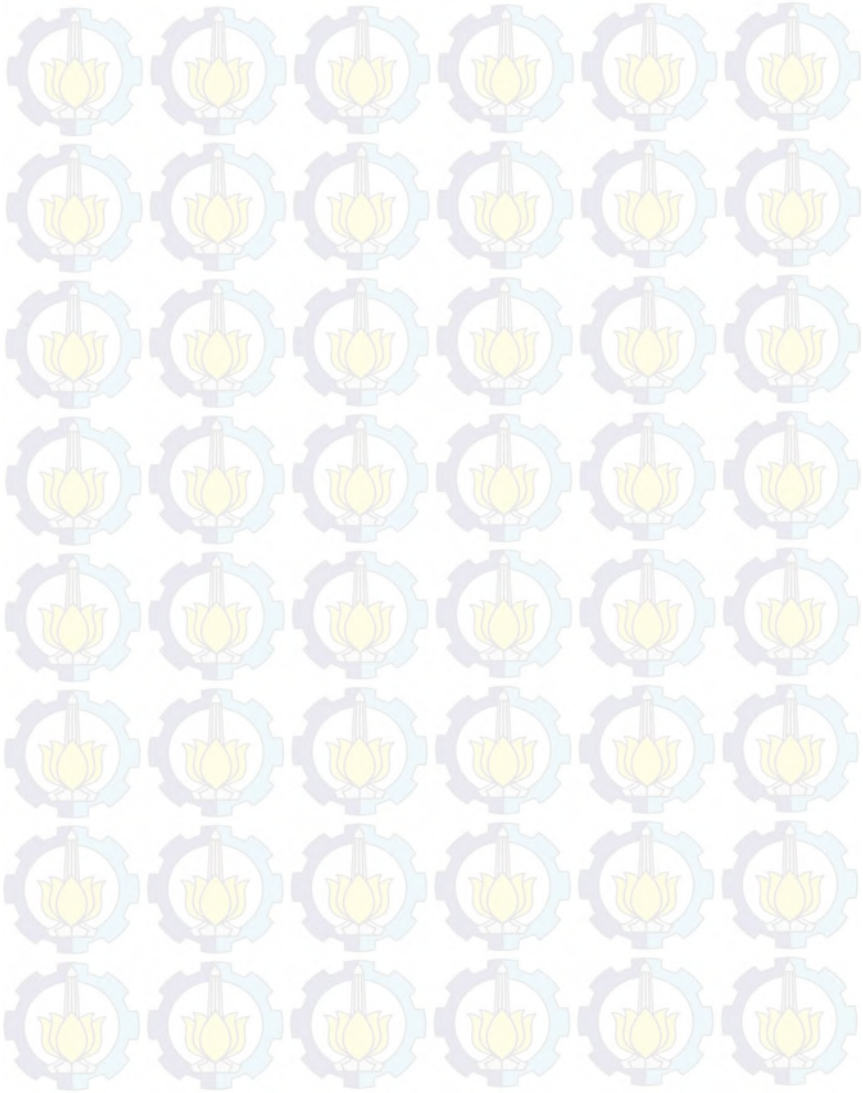
Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir.....	13
Gambar 2.1. Keterkaitan Komponen dalam Keunggulan Kompetitif	22
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian	58
Gambar 4.1. Perlengkapan dan Peralatan Produksi Batik	71
Gambar 4.2. Proses Pengeringan Batik	72
Gambar 4.3. Motif Batik	74
Gambar 4.4. Kondisi Jalan	76
Gambar 4.5. Saluran Pembuangan Limbah Hasil Produksi Batik	82
Gambar 4.6. Pelaku Usaha Batik Pamekasan.....	88
Gambar 4.7. Faktor Pengembangan Industri Batik Pamekasan.....	108
Gambar 4.8. Dendogram Hasil Analisis Kluster	111
Gambar 4.9. Bagan Alur Penyusunan Arah Pengembangan Industri Batik Pamekasan	125

Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR TABEL

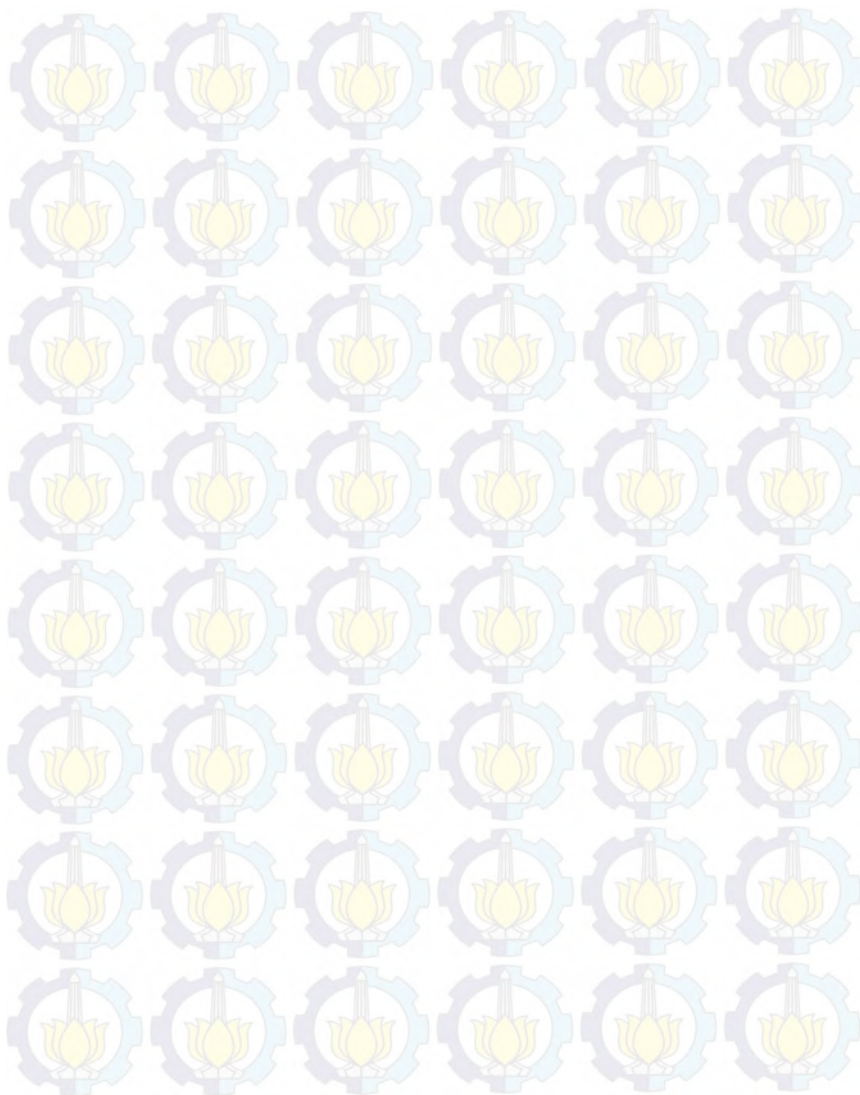
Tabel 2.1.	Reformulasi Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	18
Tabel 2.2.	Variabel dalam Pengembangan Ekonomi Lokal...	25
Tabel 2.3.	Variabel dalam Industri	33
Tabel 2.4.	Sintesa Kajian Pustaka.....	34
Tabel 3.1.	Variabel dan Definisi Operasional.....	36
Tabel 3.2.	Data dan Sumber Data	39
Tabel 3.3.	Hasil Perhitungan Sampel menggunakan <i>Disproportional Stratified Random Sampling</i>	42
Tabel 3.4.	Sampel Pengrajin Industri Batik Pamekasan di setiap desa.....	44
Tabel 3.5.	Teknik Analisis Data	46
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Penelitian	60
Tabel 4.2.	Jumlah Pengrajin Batik	65
Tabel 4.3.	Jumlah Produksi Batik	67
Tabel 4.4.	Jumlah Produksi dan Jumlah Pengrajin	68
Tabel 4.5.	Nilai Tambah	73
Tabel 4.6.	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan.....	75
Tabel 4.7.	Jumlah KK Berlistrik Kabupaten Pamekasan.....	77
Tabel 4.8.	Penyediaan Air Bersih	79
Tabel 4.9.	Ketersediaan Menara Telekomunikasi.....	82
Tabel 4.10.	Data Pelatihan	85
Tabel 4.11.	Koperasi yang Melayani IKM Batik Pamekasan	88
Tabel 4.12.	Pameran Batik.....	90
Tabel 4.13.	Lokasi Pengembangan Sentra Industri Batik Kecamatan Proppo.....	92
Tabel 4.14.	Rencana Pengembangan Kawasan Potensia Kecamatan Proppo.....	93
Tabel 4.15.	Produktivitas Industri Batik di Kabupaten Pamekasan	97
Tabel 4.16.	Klasifikasi Produktivitas Industri Batik.....	98
Tabel 4.17.	Penentuan Validitas Hasil Kuesioner Likert.....	103
Tabel 4.18.	Hasil Uji Validitas Faktor Sistem Produksi	104

Tabel 4.19.	Hasil Konfirmasi Variabel dalam Sistem Produksi.....	105
Tabel 4.20.	Hasil Uji Validitas Faktor Sistem Produksi Tahap 2	105
Tabel 4.21.	Hasil Akhir Konfirmasi Variabel dalam Sistem Produksi	106
Tabel 4.22.	Hasil Uji Validitas Faktor Infrastruktur	106
Tabel 4.23.	Hasil Konfirmasi Variabel dalam Faktor Infrastruktur	107
Tabel 4.24.	Hasil Uji Validitas Faktor Kelembagaan	107
Tabel 4.25.	Hasil Konfirmasi Variabel dalam Faktor Kelembagaan	108
Tabel 4.26.	Klaster Industri Batik Pamekasan	113
Tabel 4.27.	Tipologi Industri Batik Pamekasan.....	120
Tabel 4.28.	Potensi dan Permasalahan.....	127
Tabel 4.29.	Proses Penyusunan Indikasi Arahannya Pengembangan Industri Batik Pamekasan	131
Tabel 4.30.	Proses Penyusunan Indikasi Arahannya Pengembangan Industri Batik Pamekasan untuk seluruh tipologi	141
Tabel 4.31.	Indikasi Arahannya Pengembangan Industri Batik Pamekasan	143
Tabel 4.32.	Hasil Analisis Delphi Tahap 1	144
Tabel 4.33.	Indikasi Arahannya Pengembangan Industri Batik Kabupaten Pamekasan untuk Delphi Tahap 2 (Iterasi 1).....	146
Tabel. 4.34.	Hasil Wawancara Delphi Tahap 2 (Iterasi 1) ...	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1. Tabel Pemetaan <i>Stakeholder</i>	161
Lampiran A2. Tabel Tingkat Kepentingan <i>Stakeholder</i>	163
Lampiran B1. Kuesioner Likert.....	165
Lampiran B2. Hasil Kuesioner Likert	169
Lampiran C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	172
Lampiran D. Input Analisis Klaster.....	174
Lampiran E1. Kuesioner Delphi Tahap 1	177
Lampiran E2. Hasil Kuesioner Delphi Tahap 1	183
Lampiran E3. Kuesioner Delphi Tahap 2 (Iterasi 1)	203
Lampiran E4. Hasil Kuesioner Delphi Tahap 2 (Iterasi 1).....	207

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat setempat khususnya dan dalam skala nasional. Salah satu tujuan pengembangan wilayah adalah mempertahankan dan mamacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan kearah yang lebih baik (Mulyanto, 2008). Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tidak terlepas dari pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah.

Kondisi ekonomi suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan hidup masyarakat yang tergambar dalam jumlah penduduk miskin. Menurut Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal (KPDPT) Kabupaten Pamekasan masih tergolong dalam salah satu kabupaten miskin di Indonesia. Pada tahun 2013, Kabupaten Pamekasan berada pada posisi ke 5 (lima) sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan sebanyak 18,45%, dimana masih berada diatas rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Timur, yaitu 12,73% (BPS Jawa Timur, 2014). Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya pengembangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu strategi pengembangan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Stern, 2002). Masyarakat tidak lagi menjadi obyek pengembangan melainkan sebagai subjek dalam membangun perekonomiannya. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia untuk mengaktualisasikan seluruh

potensinya (Kuncoro, 2002). Tambunan (1999) sebelumnya secara lebih spesifik telah menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan penggunaan sumberdaya manusia sepenuhnya dan secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki peran utama untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidupnya.

Terdapat beberapa potensi lokal di Kabupaten Pamekasan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pengembangan, yaitu anyaman, batik dan mebel. Jumlah usaha anyaman yang ada saat ini sebanyak 457 usaha, mebel sebanyak 81 usaha dan batik sebanyak 764 usaha. Diantara ketiga potensi tersebut, jumlah industri batik jauh lebih banyak dari pada 2 (dua) jenis usaha lainnya. Disamping itu, industri batik mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai lebih dari 3.800 tenaga kerja pada tahun 2013 (Pamekasan dalam Angka, 2014). Industri batik memiliki prospektif pengembangan terlebih setelah diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan batik sebagai warisan budaya Indonesia membuka peluang pasar internasional, seperti batik Pamekasan yang pasarnya telah berkembang hingga ke Belanda, Jerman, Swiss Australia, dan Thailand (Riana, 2014). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri batik lebih potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

Industri batik di Kabupaten Pamekasan didukung oleh potensi SDM berupa keterampilan membatik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun dan telah menjadi ciri khas lokal Kabupaten Pamekasan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, 2014). Keberadaan industri batik di Kabupaten Pamekasan mendapat respon positif sekaligus dukungan dari pemerintah regional dan lokal. Salah satu bentuk

dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa penetapan Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Batik sejak 24 Juni 2009, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan kegiatan industri yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2032. Seluas 127 Ha lahan direncanakan untuk pengembangan kawasan peruntukan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT). Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga telah menyediakan lokasi Pasar Batik Tradisional di Pasar Tujuh Belas Agustus dan *show room* untuk industri kecil/rumah tangga dengan komoditas andalan batik (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, 2011).

Industri batik yang terdapat di Kabupaten Pamekasan berupa industri kecil dan industri rumah tangga yang berkembang dari keterampilan membatik masyarakat secara turun temurun. Motif batik yang dihasilkan cukup beragam dan berkembang sesuai dengan lokasinya, seperti Batik Banyumas karena berkembang di Desa Banyumas dan beberapa jenis batik lainnya. Industri batik di Kabupaten Pamekasan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Proppo, Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru dan Kecamatan Palengaan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, 2011).

Meskipun keterampilan membatik telah dimiliki masyarakat, kelemahan dalam sistem produksi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung industri di Kabupaten Pamekasan dapat menghambat perkembangan industri batik. Dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan yang masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan paling tinggi SD yang mencapai 68% pada tahun 2013. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berimplikasi pada rendahnya inovasi produk dan kemampuan mengelola industri yang berpengaruh pada daya saing produk.

Ketersediaan jalan sekitar industri batik juga kurang mendukung karena sebagian besar industri berlokasi di daerah pedesaan dengan akses yang kurang baik. Pada tahun 2013

masih terdapat jalan dengan kondisi sedang sebanyak 13%, kondisi rusak sebanyak 5,2% dan kondisi rusak berat sebanyak 2,7% dengan jenis perkerasan aspal. Kondisi jaringan jalan yang demikian dapat menghambat pergerakan distribusi bahan baku maupun produk batik. Infrastruktur penunjang industri batik juga kurang mendukung, yaitu rendahnya tingkat pelayanan air bersih yang dapat menghambat kegiatan produksi batik. Pelayanan air bersih di Kabupaten Pamekasan oleh PDAM pada tahun 2013 hanya sebesar 4,45% dari total kebutuhan air bersih, sedangkan sisanya secara mandiri disediakan oleh masyarakat dengan menggunakan sumur bor (Pamekasan Dalam Angka, 2014).

Kelembagaan dalam industri batik telah terlihat fungsinya, khususnya dalam pengadaan pelatihan. Pelatihan untuk pengrajin batik telah dilakukan, baik pelatihan untuk meningkatkan inovasi dan cara mengelola industri. Akan tetapi, intensitas pelatihan sangat rendah, yaitu tidak setiap tahun diadakan. Disamping itu, pelatihan tidak mencakup seluruh pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan melainkan hanya pada pengrajin batik yang berada di sentra terbesar (Kecamatan Proppo) atau yang lokasinya tidak jauh dari pusat kabupaten, sedangkan yang lokasinya berada jauh dari pusat kabupaten tidak mendapatkan pelayanan berupa pelatihan (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan, 2014). Peran lembaga pemodalan juga sangat rendah, dimana menurut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan (2012) sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha IKM salah satunya industri batik adalah lemahnya modal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lembaga pemodalan perannya masih kurang dalam mendukung berkembangnya industri batik di Kabupaten Pamekasan.

Kendala berupa rendahnya pelayanan infrastruktur, sistem produksi dan peran kelembagaan harus segera diatasi untuk mengembangkan industri batik. Sebagaimana telah disebutkan oleh Jusuf Irianto (1996: 55) bahwa faktor yang terpenting yang mempengaruhi produksi bukanlah sumber daya alam saja, tetapi ketersediaan sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi sebagai input produksi dengan didukung infrastruktur yang memadai. Disamping itu, menurut Hoselitz dalam Irianto (1996) peran kelembagaan sangat penting dalam penciptaan iklim usaha karena akan dapat mengarahkan masyarakat lebih inovatif.

Berdasarkan kondisi diatas, maka dibutuhkan pendekatan yang tepat untuk mengembangkan industri batik. Industri batik merupakan industri yang berasal dari budaya masyarakat lokal, sehingga pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan yang sifatnya partisipatif. Pendekatan partisipatif dapat dilakukan dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*). Mudarajad Kuncoro (2002) menegaskan bahwa pendekatan *bottom up* dapat menampung keinginan msyarakat dalam membangun wilayahnya. Pendekatan *bottom up* yang relevan dengan kondisi wilayah penelitian adalah Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal menitikberatkan pada kebijakan *endegeneous development* dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusi dan fisik setempat (Blakely, 1989). Pemberdayaan masyarakat merupakan pondasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Bachrudin, 2008). Selain itu, Mudarajad Kuncoro (2002) menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan aspek yang menjadi salah satu pokok perhatian dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.

Beberapa wilayah telah berhasil mengembangkan potensi lokal yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan PEL, diantaranya pengembangan industri permebelan Wonogiri yang dikembangkan melalui PEL sejak tahun 2001 dan saat ini telah berkembang hingga dikenal di manca negara, seperti Australia, Amerika dan Singapura. Keberhasilan lainnya adalah dalam pengembangan Batik Pacitan, dimana pemerintah, pengrajin dan *stakeholder* melalui PEL telah berhasil mengatasi persoalan untuk mengembangkan batik Pacitan (Risfan, dkk., 2005).

PEL dapat diterapkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal relevan dengan

permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu pada aspek sistem produksi, kelembagaan dan infrastruktur pendukung industri batik. Dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan wilayah, sehingga berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja baru yang prospektif dan dapat menjamin peningkatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

1.2. Rumusan Masalah

Industri batik di Kabupaten Pamekasan merupakan industri lokal yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian lokal. Industri batik didukung oleh potensi sumber daya manusia yang terampil dan peluang pasar yang tinggi. Akan tetapi, kondisi wilayah studi yang meliputi rendahnya pelayanan infrastruktur, sistem produksi dan rendahnya peran kelembagaan dapat menghambat perkembangan industri batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengembangan industri batik agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian lokal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperoleh pertanyaan penelitian, yaitu: *“Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan?”*

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan arahan pengembangan industri batik Pamekasan melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha batik di Kabupaten Pamekasan
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik Pamekasan.
3. Mengidentifikasi tipologi industri batik Pamekasan.

4. Merumuskan arahan pengembangan industri batik Pamekasan

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini fokus pada industri batik yang saat telah ada di Kabupaten Pamekasan. Lingkup wilayah studi meliputi 13 Desa yang tersebar dalam 6 wilayah administratif kecamatan, yaitu

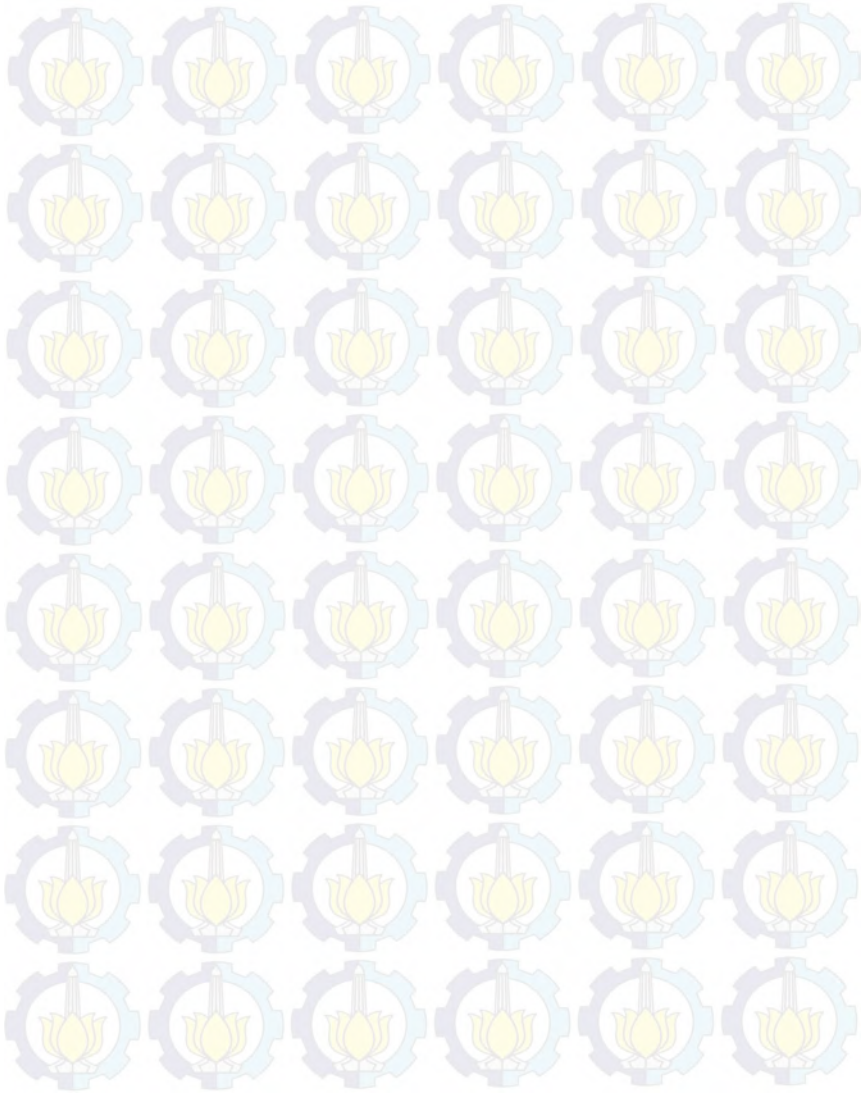
- a. Desa Kowel di Kecamatan Pamekasan
- b. Desa Pagendingan di Kecamatan Galis
- c. Desa Toket, Candi Burung, Klampar dan Rang Perang Daya di Kecamatan Proppo
- d. Desa Larangan Bedung, Rek Kerek, Angsanah, Panaan, dan Banyupelle di Kecamatan Palengaan
- e. Desa Pegantenan di Kecamatan Pegantenan
- f. Desa Waru Barat di Kecamatan Waru.

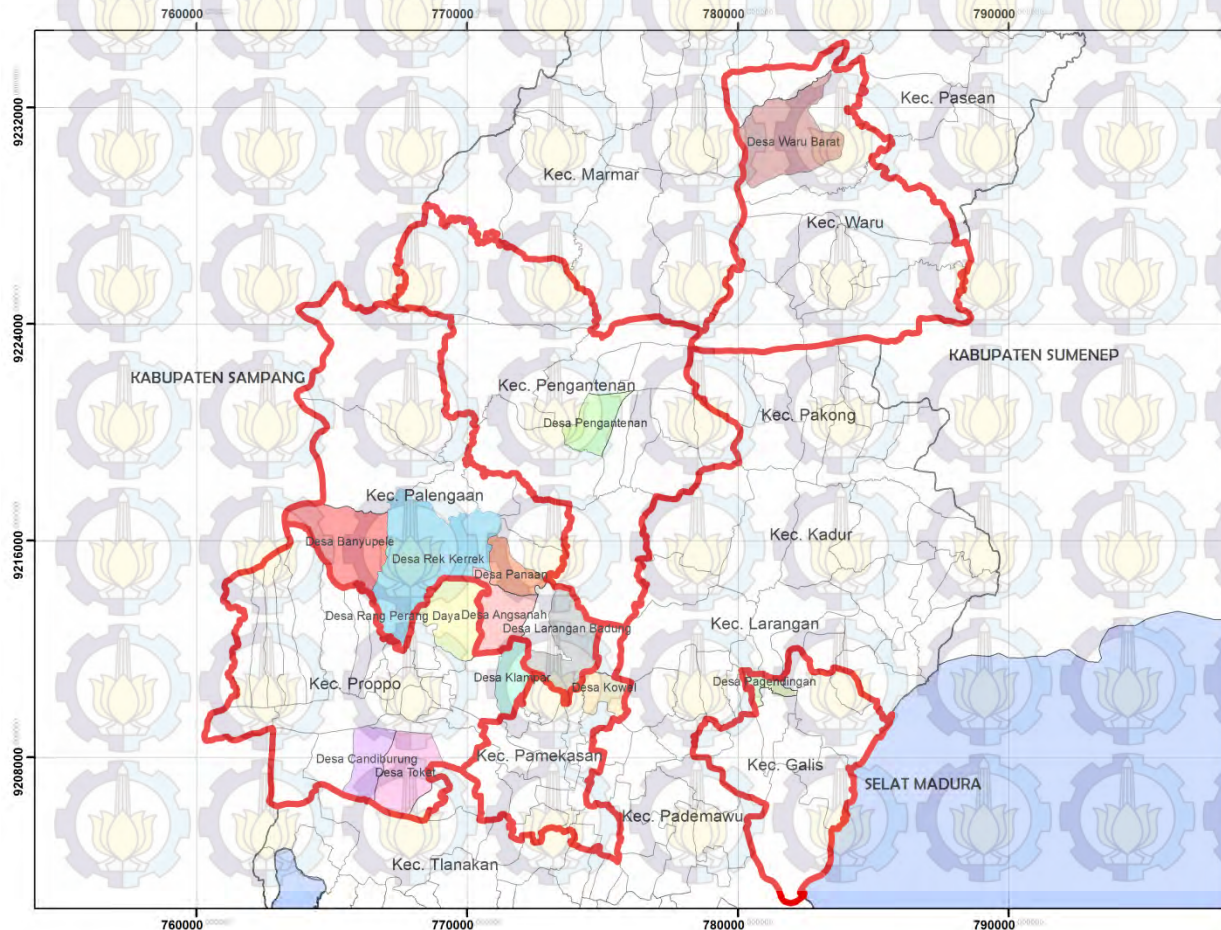
Berikut batas wilayah Kabupaten Pamekasan sebagai wilayah penelitian :

- Utara : Kecamatan Pasean
- Selatan : Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pademawu
- Timur : Kabupaten Sumenep
- Barat : Kabupaten Sampang

Untuk lebih jelas mengenai ruang lingkup wilayah penelitian dapat dilihat pada **Peta 1.1** berikut.

Halaman ini sengaja dikosongkan





Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

1.4.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan pada materi yang berkaitan dengan pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif dalam pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini mencakup sistem produksi, infrastruktur, dan kelembagaan yang berkaitan dengan industri batik.

1.4.3. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini adalah pengembangan wilayah melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Dalam pendekatan ini mencakup teori-teori Pengembangan Ekonomi lokal. Disamping itu, teori dan penelitian terkait industri kreatif, industri kecil menengah dan industri batik menjadi referensi dalam penelitian ini.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritik dan praktis. Manfaat teoritik merupakan pengaruh penelitian terhadap bidang keilmuan perencanaan wilayah. Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam bentuk rekomendasi dan masukan aplikasi.

1.5.1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat memperkaya keilmuan perencanaan wilayah dan kota khususnya pengembangan ekonomi wilayah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait pengembangan wilayah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis berupa masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menentukan kebijakan untuk mengembangkan potensi industri batik yang dimiliki serta memecahkan permasalahan dalam industri batik yang ada di Kabupaten Pamekasan saat ini. Manfaat bagi masyarakat adalah informasi mengenai penyebab rendahnya kinerja industri batik,

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam meminimasi penyebabnya. Dengan penelitian ini pula, diharapkan tercipta kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan *private sector* dalam mengembangkan industri batik di Kabupaten Pamekasan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan mengenai pokok pikiran yang ada pada setiap bab. Adapun dalam proposal studi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan proses analisis khususnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah melalui konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam melakukan analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

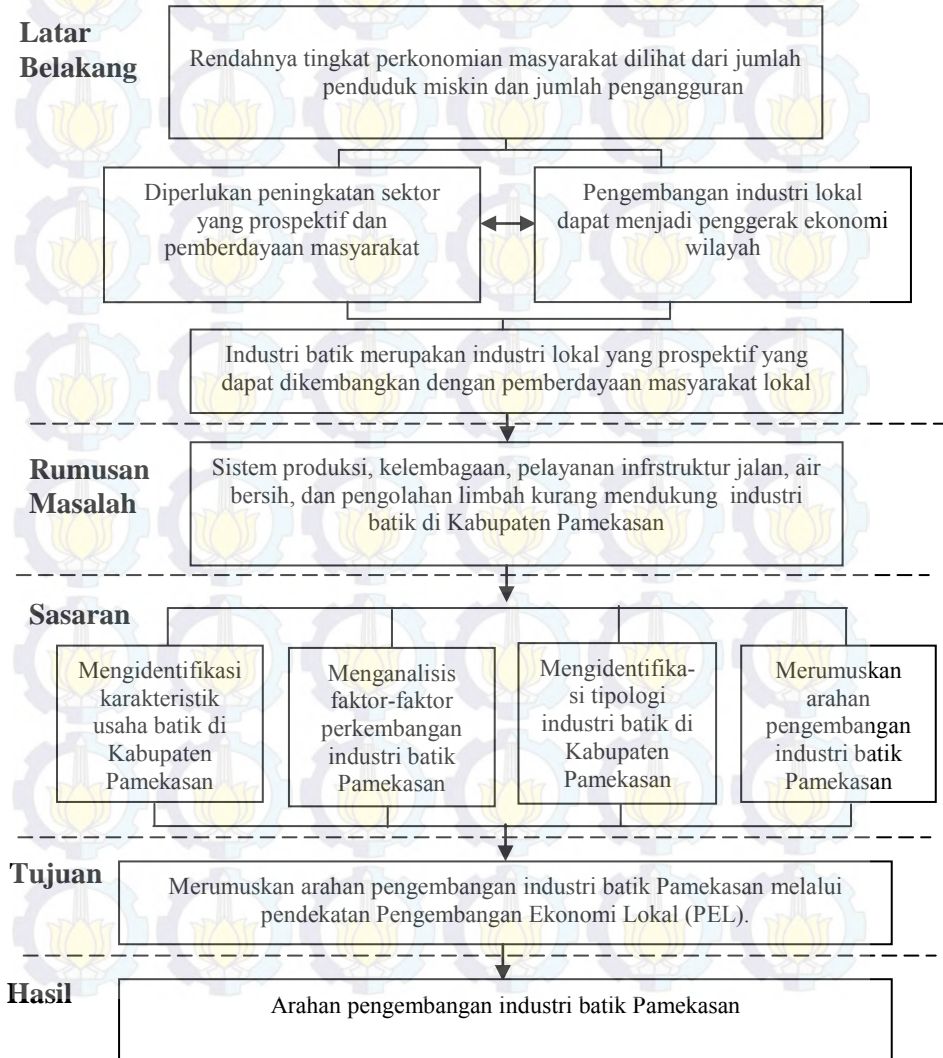
Bab ini berisi gambaran wilayah studi mengenai industri batik di Kabupaten Pamekasan, khususny gambaran umum yang berkaitan dengan komponen PEL. Selain itu, dalam bab ini terdapat hasil dari analisis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran yang merupakan rencana tindak lanjut terkait kebermanfaatan hasil penelitian.

1.7. Kerangka Berpikir

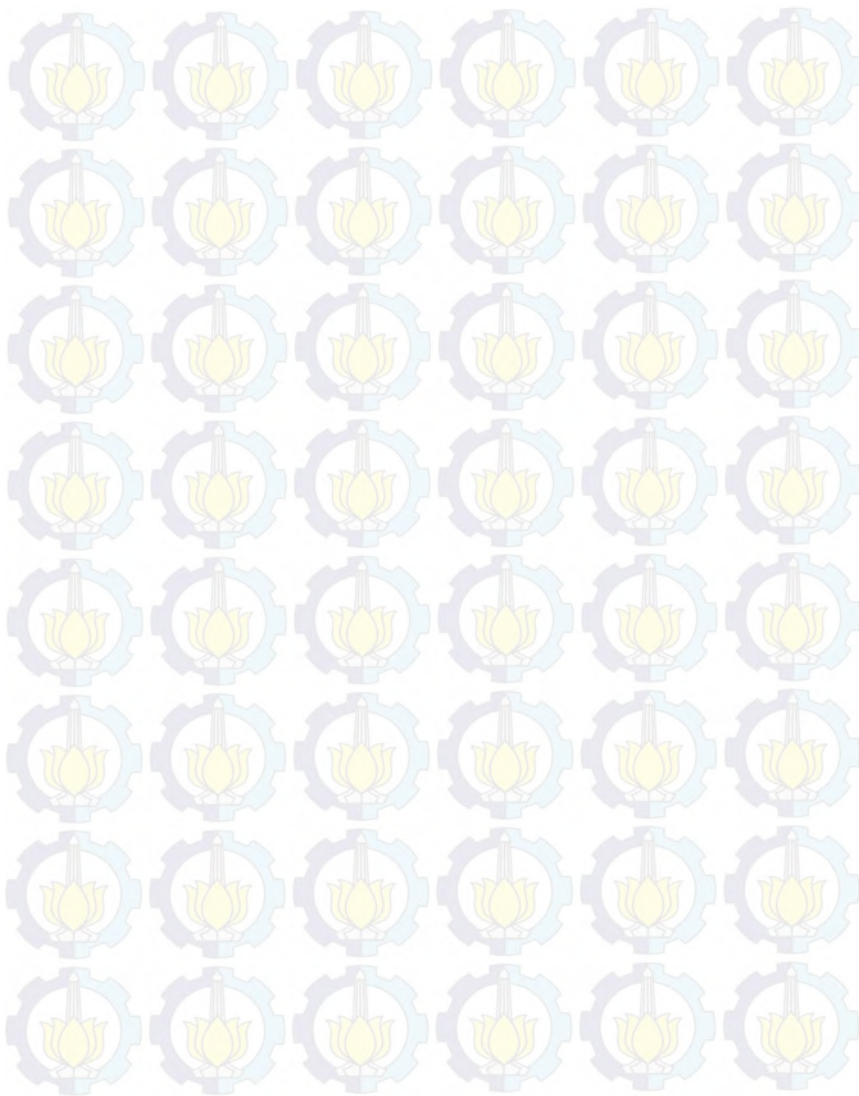
Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta sasaran penelitian, maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis, 2014.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengembangan Wilayah

Wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (Rustiadi, *et al.*, 2006). Sebagai obyek pengembangan, wilayah tidak hanya meliputi aspek fisik melainkan masyarakat dan seluruh kegiatan didalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2008) bahwa pengembangan wilayah merupakan seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat setempat khususnya dan dalam skala nasional. Terdapat 2 (dua) pilar dalam strategi pengembangan, yaitu membangun iklim investasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Nicholas Stern, 2001:143). Menurut Riyadi (2000) terdapat tiga indikator dalam pengembangan wilayah, yaitu:

1. Produktivitas yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya.
2. Efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.

Dari teori pengembangan wilayah yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas dapat diketahui bahwa potensi wilayah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wilayah. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sumber daya alam tetapi juga berupa sumber daya manusia. Dalam upaya pengembangan potensi wilayah, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan pengembangan. Keberhasilan pengembangan yang dilakukan dapat dilihat dari produktivitas suatu institusi yang berkepentingan dalam

pengembangan wilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola potensi wilayah yang ada, sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas suatu institusi yang berimplikasi pada semakin meningkatnya perekonomian wilayah.

2.2. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

2.2.1. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal adalah proses partisipatori dimana semua pihak dari semua sektor di lokal tersebut bekerja bersama-sama untuk menstimulasi aktivitas komersial sehingga tercipta kondisi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan (UN-HABITAT, 2003). Pengembangan ekonomi lokal berbeda dengan konsep pengembangan wilayah lainnya. Dalam pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) terbentuk kemitraan *stakeholders* ekonomi, yaitu proses dimana pemerintah lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta terlibat dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang ekonomi daerah (Blakely, 1994). Disamping itu, pengembangan ekonomi lokal sebagai salah satu sarana untuk membantu menciptakan lapangan kerja yang layak dan memperbaiki kualitas hidup setiap orang, termasuk mereka yang tergolong miskin dan terpinggirkan (UN-HABITAT, 2003). Lincoln Arsyad (1999:109) menegaskan bahwa Pengembangan Ekonomi Wilayah atau Daerah merupakan suatu proses pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru.

Dalam bukunya yang berjudul “*Planning Local Economic Development*” Blakely (1994) menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi lokal memiliki ciri yang utama adalah kebijakan *endogenous development* yang menggunakan potensi sumber daya manusia, institusi, dan sumber daya alam (fisik). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi mengarah pada peningkatan

kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan kata lain, PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi (Wahyuni, 2013).

Blakely dan Bredshaw (2002) menetapkan empat komponen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu kepemilikan lokasi, basis pembangunan, lapangan kerja dan sumber daya manusia. Keempat komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain, dimana lokasi tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat dikatakan lokasi tersebut strategis. Begitu pula kedua komponen tersebut tanpa adanya kemampuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan tanpa adanya keterkaitan antar industri untuk menciptakan keunggulan kompetitif, maka tidak akan tercapai peningkatan suatu ekonomi lokal.

Dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah dengan mengandalkan modal dasar berupa potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki untuk membangun ekonomi dengan didorong oleh adanya kemitraan antar *stakeholder*. Pengembangan ekonomi lokal tidak terbatas pada wilayah administratif tetapi mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal apa yang dimiliki suatu wilayah.

2.2.2. Komponen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Blakely dan Bradshaw (2002 : 67) menjelaskan terdapat perubahan konsep pada empat komponen PEL yang meliputi sumber daya manusia, dasar pembangunan, kepemilikan lokasi dan sumber daya pengetahuan. Perubahan tersebut seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dibentuk suatu konsep baru dari komponen Pengembangan Ekonomi Lokal yang merupakan reformulasi dari konsep yang lama. Perbedaan konsep PEL yang lama dengan setelah adanya perumusan konsep baru, yaitu:

Tabel 2.1 Reformulasi Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal

Komponen	Konsep PEL	
	Konsep Lama	Konsep Baru
Kepemilikan lokasi	lokasi fisik (dekat dengan sumber daya, transportasi, pasar) yang dapat meningkatkan pilihan ekonomi	kualitas lingkungan dan kapasitas masyarakat yang kuat, keuntungan alami untuk pertumbuhan ekonomi
Basis pembangunan	industri berbasis ekspor dan perusahaan dapat menciptakan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan bisnis lokal.	klaster industri kompetitif yang terhubung dalam jaringan regional dari semua jenis perusahaan menciptakan suatu pertumbuhan baru dan pendapatan.
Lapangan Kerja	lebih banyak perusahaan menciptakan lebih banyak pekerjaan, bahkan dengan upah yang kecil.	pengembangan kemampuan secara komprehensif dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan pendapatan.
Sumber daya manusia	<i>single-purpose-organization</i> dapat meningkatkan peluang ekonomi masyarakat	kemitraan dari beberapa kelompok masyarakat diperlukan untuk membentuk fondasi yang luas untuk industri yang kompetitif.

Sumber : Blakely dan Bradshaw, 2002.

Komponen lokasi, tidak hanya melihat keuntungan dari aspek fisik yang ada disekitarnya, tetapi pada konsep baru telah menekankan pada keunggulan komparatif dan kapasitas masyarakat. Keunggulan komparatif pada penelitian merupakan potensi sumber daya manusia yang ada. Kapasitas masyarakat dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakat sebagai modal dalam menciptakan keunggulan komparatif. Kedua hal tersebut

dapat saling mendukung, yaitu kapasitas masyarakat yang tidak hanya mempunyai keahlian membuat tetapi juga kemampuan inovasi dan mengelola industri untuk menciptakan suatu pertumbuhan perekonomian dan daya saing lokal yang berkelanjutan.

Basis pembangunan tidak hanya industri yang berbasis ekspor, tetapi bagaimana industri-industri tersebut saling terhubung oleh adanya suatu jaringan yang terbentuk dalam suatu klaster. Dengan adanya keterkaitan antar industri akan tercapai efisiensi dan kemajuan industri. Selain itu, terjadi interaksi yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga persaingan antar industri akan semakin lemah.

Jumlah tenaga kerja tidak lagi menjadi yang paling utama. Kompetensi tenaga kerja saat ini telah menjadi variabel yang lebih penting dibandingkan jumlah tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan lebih mampu meningkatkan kesejahteraan karena kondisi demikian akan mempermudah memperoleh pekerjaan yang berkualitas pula dan pendapatan yang diperoleh lebih tinggi.

Komponen yang terakhir adalah sumber daya manusia, dimana pada konsep baru sumber daya manusia menekankan kepada terbentuknya suatu kemitraan dalam pembangunan industri-industri. Adanya kemitraan akan membentuk keunggulan kompetitif karena tergabungnya *stakeholders* terkait dalam membentuk suatu industri. Dengan demikian, terbangun suatu fondasi yang kuat dan luas serta saling mendukung satu sama lain yang mengarah pada pencapaian industri yang lebih kompetitif.

2.2.3. Indikator dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Sejak pertama ditemukan pada tahun 1960an hingga saat ini pendekatan pengembangan ekonomi lokal telah mengalami pergeseran fokus pengembangan. Pada mulanya konsep ini fokus pada *public sector only* (1960an-1980an), kemudian *public sector driven* (1980an-1990an), dan sejak akhir 1990an hingga saat ini fokus pada *public sector led*. Pergeseran fokus PEL tersebut juga berakibat pada pergeseran pendekatan PEL. Pendekatan

Pengembangan Ekonomi Lokal menurut Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto (2007) meliputi tiga indikator yaitu pengembangan daya saing, *business cluster*, dan kelembagaan.

2.2.3.1. Pengembangan Daya Saing (Keunggulan Kompetitif)

Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto (2007) mendefinisikan daya saing atau *competitiveness* adalah salah satu indikator dalam mengembangkan ekonomi lokal. Daya saing berguna dalam menarik pekerja, kegiatan bisnis dan lembaga yang menunjang. Daya saing dapat diukur melalui empat kategori (Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto, 2007), yaitu:

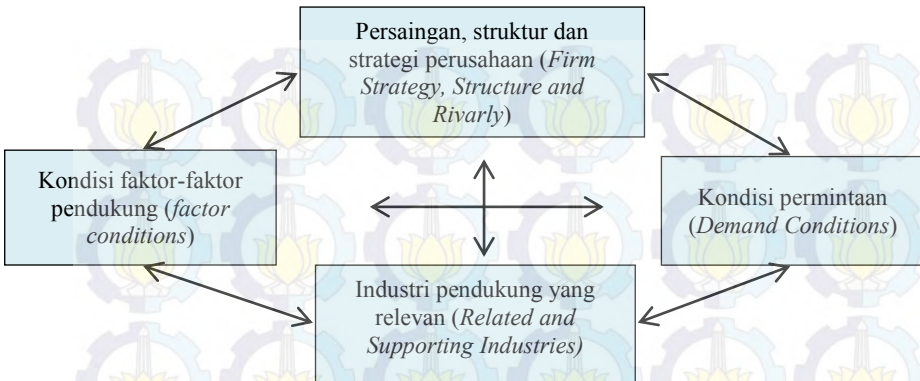
- a) Struktur Ekonomi yang terdiri dari komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah serta tingkat investasi domestik maupun asing.
- b) Potensi wilayah yang *non-tradable*, misalnya lokasi, prasarana (jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih), sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, serta citra daerah.
- c) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung
- d) Kelembagaan, seperti kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro PEL serta perilaku budaya yang mendukung produktivitas.

Menurut Michael E. Porter (1990:75) keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan inovasi. Inovasi yang dimaksud sangat luas, beberapa diantaranya teknologi, pendekatan pemasaran baru, proses produksi baru, atau cara baru dalam melakukan pelatihan. Piore dan Sabel (1984) menyebutkan bahwa agar suatu perusahaan lebih unggul dari yang lain diperlukan adanya *Flexible specialization*. *Flexible specialization* didefinisikan sebagai suatu konsekuensi yang timbul karena konsumen menginginkan produk yang spesial yang tidak dapat dipenuhi sistem produksi massal (Piore dan Sabel dalam Rustiana, 2005). *Flexible specialization system* kuncinya adalah pada kelompok tenaga kerja *middle* yang terampil yang memungkinkan terjadi mobilitas sosial diantara kelas pekerja (Capechi, 1990). *Flexible spezialization* merujuk pada beberapa

variabel dimana tiga diantaranya, adalah (Van Djik dalam Rustina, 2005):

- a) Adanya mental inovatif pada *entrepreneur*.
- b) Teknologi yang digunakan oleh manusia didapatkan dari *on the job training*.
- c) Terjadi spesialisasi yang membuktikan adanya fleksibilitas.

Kusumadiantho (1998) menambahkan bahwa yang dapat dikendalikan untuk dapat bersaing salah satunya, yaitu aspek yang berasal dari internal berupa kinerja dari input (sumber daya), kinerja dari proses dan *output* (produk yang dihasilkan). Pernyataan lainnya oleh Porter dan Sovell (1998) yang menekankan pada strategi dan organisasi dalam menjaga keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Teknologi hanya merupakan bagian dari atribut dalam menumbuhkan keunggulan kompetitif. Secara makro, atribut dalam keunggulan kompetitif, yaitu (1) kondisi faktor-faktor pendukung (*factor conditions*), (2) kondisi permintaan (*Demand Conditions*), (3) industri pendukung yang relevan (*Related and Supporting Industries*), dan (4) struktur dan strategi perusahaan (*Firm Strategy, Structure and Rivalry*). Kondisi faktor-faktor pendukung meliputi kondisi pada aspek produksi, seperti kemampuan tenaga kerja atau infrastruktur. Kondisi permintaan adalah permintaan pasar terhadap produk industri atau pelayanan. Industri pendukung yang relevan berkaitan dengan ada tidaknya industri sejenis dan industri terkait lainnya di luar wilayah yang dapat menumbuhkan kompetisi, dan persaingan. Struktur dan strategi perusahaan yang merupakan kondisi peraturan pada wilayah tersebut. Keterkaitan empat atribut tersebut secara jelas dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2.1 Keterkaitan Komponen dalam Keunggulan Kompetitif
Sumber : Michael E. Porter, 1990.

Keunggulan kompetitif dalam pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal dapat tercipta apabila variabel-variabel pembentuk daya saing telah mendukung. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah produktivitas, tingkat investasi, infrastruktur, citra daerah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, nilai tambah, teknologi untuk meningkatkan inovasi dalam pemasaran maupun produksi. Apabila diantara variabel-variabel pembentuk daya saing tersebut terdapat kekurangan, maka daya saing wilayah cenderung lemah.

2.2.3.2. Pengembangan Business Cluster

Klaster merupakan konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan dan berbagai institusi yang mendukungnya (Porter, 1998: 34). Mudarajad Kuncoro (2002) menegaskan pengertian klaster, yaitu cerminan konsentrasi geografis suatu kelompok industri yang sama. Pengertian lain mengenai klaster di kemukakan oleh Roelandt dan Den Hertog dalam Yuli (2011) yang mendefinisikan klaster sebagai jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang saling bergantung secara erat (termasuk pemasok yang terspesialisasi) yang terkait

satu sama lain dalam suatu rantai produksi peningkatan nilai tambah.

Klaster dapat menjadi lokomotif dalam mendorong perkembangan sistem industri. Keterkaitan dalam klaster dapat mengatasi permasalahan terkait bahan baku, produksi, distribusi dan pemasaran. Disamping itu, keterkaitan antar industri dalam klaster memiliki *multiplier effects*, yaitu dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas lagi. Porter (1998) mengemukakan bahwa klaster dapat meningkatkan kompetisi pasar global, yaitu dapat meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu, mendorong arah dan langkah inovasi, serta menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis baru. Pengembangan klaster industri merupakan alternatif pendekatan yang efektif untuk membangun keunggulan daya saing industri pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya (Yuli, dkk., 2011). Pengembangan klaster dalam PEL menyangkut 5 (lima) pendekatan (Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto, 2007), yaitu:

- a) Pengembangan *network* untuk mendorong kerjasama antar pelaku usaha baik dalam pemasaran hingga bentuk perdagangan antar usaha dalam satu klaster.
- b) Mengembangkan upaya pemasaran bersama klaster
- c) Menyediakan informasi yang spesifik untuk klaster, dimana dapat dilakukan dengan pertukaran informasi untuk mengembangkan keterkaitan antara pembeli dengan pemasok.
- d) Mendukung riset bersama
- e) Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dengan pengadaan pelatihan yang sesuai kebutuhan.

Dengan klaster industri keterkaitan antar klaster dalam satu sektor maupun dengan klaster pada sektor lainnya akan semakin kuat. Mendorong kemitraan antar IKM dengan perusahaan besar dan kaitan interaktif lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan industri dan struktur yang mendukung peningkatan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas.

Disamping itu, pengembangan klaster industri akan mendorong tumbuhnya industri terkait yang memerlukan pasokan bahan baku, sehingga memperkuat *partnership* antara industri prioritas, terkait dan pendukung dan memfasilitasi upaya-upaya pemasaran dalam maupun luar negeri.

Yuli (2011) menyimpulkan pernyataan Porter (1998), Desrochers dan Sautet (2004), dan Waits (2000) mengenai beberapa manfaat dari pengembangan klaster industri, yaitu:

- a) Menciptakan manfaat ekonomi dan daya saing.
- b) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi perusahaan di dalam klaster serta peningkatan kemampuan inovasi yang melibatkan lembaga penelitian.
- c) Mengurangi biaya transportasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan memungkinkan terciptanya inovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.
- d) Memiliki keunggulan dalam memanfaatkan aset sumber daya secara kolektif untuk mendorong diversifikasi.
- e) Mendorong terjadinya spesialisasi produksi sesuai dengan kompetensi inti dan mendorong transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

2.2.3.3. Pengembangan Kelembagaan

Dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat bukan menjadi objek pengembangan, namun sebagai subjek yang berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya untuk mengembangkan perekonomian lokal. Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang sistem kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi, dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan.

Kelembagaan dalam PEL tergambar dalam kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan skala kota

dibentuk antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan pelaku industri serta *stakeholder* lainnya. Kemitraan skala komunitas berarti kerjasama antara pihak warga, organisasi masyarakat beserta pemerintah yang melayani masyarakat secara langsung. Dalam kemitraan, peran serta pemerintah salah satunya dalam membentuk kebijakan pembangunan.

Hoselitz dalam Irianto (1996) berpendapat bahwa penciptaan iklim usaha akan dapat mengarahkan masyarakat lebih inovatif. Penciptaan iklim usaha ini bergantung pada keberadaan lembaga sosial dan memberikan kesempatan dan pengembangan kepribadian yang berorientasi pada produktivitas (Heru Sutojo dan Jusuf Irianto, 1996). Kebijakan pemerintah seharusnya pro industri kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Berdasarkan teori Pengembangan Ekonomi Lokal diatas, maka dapat dirumuskan variabel dalam pengembangan ekonomi lokal sebagai berikut.

Tabel 2.2 Variabel dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Sumber	Indikator	Variabel
Riyadi (2000)	Kelembagaan	Pelaku usaha
Lincolin Arsyad (1999:109)	Klaster Bisnis	Industri alternatif
	Sistem Produksi	Kualitas tenaga kerja
	Pemasaran	Pasar-pasar baru
	Daya Saing	Perusahaan baru
Blakely dan Bradshaw (2002: 67)	Sistem Produksi	Inovasi teknologi produksi
	Pemasaran	Inovasi Teknologi Pemasaran
	Kelembagaan	Kemitraan/kerjasama
Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto (2007)	Sistem Produksi	Nilai tambah
	Daya Saing	investasi
	Infrastruktur	Jalan raya
		Listrik
		Telekomunikasi
Michael E. Porter (1990:75)	Pasar	Air bersih
		Permintaan
	Daya Saing	Pesaing

Sumber	Indikator	Variabel
Michael E. Porter (1990:75)	Sistem Produksi	Inovasi
	Klaster Bisnis	Bisnis baru
Risfan Munir dan Bahtiar Fitanto (2007)	Kelembagaan	Pelatihan
		Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta
Lincoln Arsyad (1999:119-120)	Kelembagaan	Peran lembaga
Hoselitz dalam Irianto (1996)	Kelembagaan	Kebijakan

Sumber: Hasil Kompilasi, 2014.

Dari beberapa variabel berdasarkan pernyataan para ahli diatas, maka dapat diambil beberapa variabel dalam penelitian. Variabel tersebut adalah pelaku usaha, pelatihan, kerjasama, peran lembaga, kualitas tenaga kerja, jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih, nilai tambah, teknologi produksi, kemitraan (kerjasama), inovasi dan kebijakan. Penentuan variabel tersebut berdasarkan ruang lingkup substansi dalam penelitian, yaitu Sistem Produksi, Infrastruktur dan kelembagaan. Variabel dalam indikator Sistem produksi adalah kualitas tenaga kerja, nilai tambah, teknologi produksi dan inovasi, sedangkan variabel infrastruktur adalah jalan raya, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Variabel dalam indikator Kelembagaan adalah pelaku usaha, pelatihan, kerjasama, peran lembaga, kerjasama, dan kebijakan.

2.3. Industri

Industri memiliki beberapa pengertian, diantaranya dalam arti sempit dan pengertian secara garis besar. Hasibuan (1993:12) mendefinisikan industri dalam arti sempit sebagai kumpulan dari perusahaan yang memproduksi barang sejenis dimana terdapat kesamaan *input* bahan baku, proses, serta *output* (produk), serta konsumen akhir. Mudarajat Kuncoro (2007: 135) memberikan pengertian industri secara garis besar sebagai sekelompok dari

perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sifatnya sejenis atau substitusi. Industrialisasi saat ini telah berkembang dan menjadi *leading sector* dalam beberapa negara maju. Sehingga untuk dapat menyeimbangkan dengan perubahan struktur ekonomi global agar tidak semakin terbelakang, maka setiap wilayah dapat mengembangkan industri berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki.

2.3.1. Industri Kreatif

Industri kreatif menurut Adorno dan Horkheimer dalam Drake (2003) adalah industri yang memproduksi benda-benda seni dalam jumlah yang besar. Selain itu, UK DCMS *Task Force* (1998) mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang mengandalkan kreativitas individual, kemampuan, talenta, dan berpotensi untuk mensejahterakan dan penyediaan lapangan kerja dengan membangkitkan dan mengeksplorasi kemampuan intelektual yang dimiliki. Industri kreatif ini memproduksi barang dan jasa yang memiliki nilai utama berupa atribut estetika (Banks, dkk dalam Drake, 2003). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan produk berupa benda-benda seni, dimana dalam proses produksinya mengutamakan kreatifitas dan talenta individual.

Industri kreatif pada umumnya diproduksi oleh usaha kecil yang bergerak berdasarkan prinsip kewirausahaan serta sifatnya fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Simatupang (2007) menambahkan bahwa industri kreatif harus memiliki modal intelektual yang dibentuk oleh seni, teknologi, budaya dan bisnis. Briyan Putra (2014) dalam penelitiannya terhadap industri kreatif di Kota Bandung menyebutkan industri kreatif dipengaruhi oleh kreatifitas, dukungan keuangan dan komitmen organisasi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa kreativitas menjadi inti dari industri kreatif. Kreativitas dalam hal ini harus berkelanjutan yang dibuktikan dengan adanya inovasi dalam produk industri kreatif yang dihasilkan. Disamping itu karena industri kreatif pada umumnya

memang merupakan industri kecil dan menengah, maka dukungan keuangan memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri kreatif.

2.3.2. Industri Kecil Menengah (IKM)

Lincoln Arsyad (1999) menyatakan pengembangan industri kecil merupakan upaya untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan dan pemeratakan pendapatan serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan industri kecil merupakan salah satu pola pengembangan industri. Dengan pengembangan industri kecil partisipasi masyarakat akan semakin luas, sehingga membangun kesiapan secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi dinamika industrialisasi. Jusuf Irianto (1996) mengatakan bahwa pada bidang produksi industri kecil umumnya kurang efisien dalam penggunaan bahan baku, proses dan biaya produksi, mutu, kapasitas teknologi, dan keterampilan.

Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep *external economic*, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam *external economic* adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):

- a) Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri
- b) Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri *subsidiary*
- c) Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus
- d) Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api

Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa *external economic* saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan *joint action*. Dalam *joint action* ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama. Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha

yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horisontal (diantara *competitor*) dan kerjasama vertikal (antara produsen, *supplier* input, dan penjual output).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh industri kecil menengah diantaranya adalah penguasaan produk hulu hilir mulai dari penyediaan bahan baku dan penjualan yang berdampak pada lemahnya nilai tambah produk yang dihasilkan. Permasalahan lainnya adalah pemahaman teknologi, akses kepada sumber dana dan kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pada kenyataannya, rendahnya akses industri kecil terhadap kredit dari lembaga keuangan formal mengakibatkan sebagian besar industri kecil bergantung pada modal pribadi (Jusuf Irianto, 1996: 146). Tambunan (2002) menambahkan permasalahan yang dihadapi usaha atau industri kecil menengah adalah mobilisasi modal awal dan akses modal kerja dalam jangka panjang.

Variabel yang mempengaruhi produktivitas industri kecil menengah akan berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan memungkinkan terdapat variabel lain yang belum terdapat pada pernyataan beberapa pakar diatas. Sebagaimana penelitian IKM yang dilakukan oleh Hidayat dan Herlambang (2009) di Pulau Madura yang menunjukkan beberapa penyebab rendahnya produktivitas dan daya saing IKM di Madura diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, kualitas produk yang rendah, kurangnya informasi yang akurat, lemahnya permodalan, dan kebijakan yang tidak berpihak pada IKM.

Industri kecil menengah pada dasarnya merupakan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Akibatnya, pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan dalam permodalan yang juga menjadi kendala rendahnya kinerja industri. Peran lembaga keuangan juga sangat lemah, sehingga pelaku industri benar-benar terdesak dalam masalah permodalan.

2.3.3. Kinerja Industri

Kinerja industri merupakan hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur dan perilaku industri dimana hasil biasa diidentikkan dengan besarnya penguasaan pasar atau besarnya keuntungan suatu perusahaan di dalam suatu industri (Kuncoro, 2007: 151). Mudarajat Kuncoro dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Industri Indonesia* menjelaskan terdapat beberapa ukuran kinerja diantaranya melalui nilai tambah (*value added*), produktivitas dan efisiensi. Dari tiga ukuran tersebut, produktivitas merupakan indikator kinerja ekonomi yang cukup penting (Samuelson dan Nordhaus dalam Kuncoro, 2002). Casetti, dkk dalam Malecki (1986) menyatakan bahwa dalam ekonomi wilayah yang paling ditekankan adalah hubungan antara peningkatan produktivitas wilayah yang berimplikasi pada peningkatan output yang dihasilkan. Dengan demikian mengindikasikan bahwa produktivitas penting dalam mengukur kinerja. Begitu halnya dengan pernyataan Paul Krugman dalam Kuncoro (2002) yang menegaskan bahwa produktivitas bukan segalanya untuk jangka pendek, namun dalam jangka panjang produktivitas hampir menjadi segalanya. Produktivitas merupakan indikator utama bagi kemajuan industri. Laju pertumbuhan ekonomi industri dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas pada seluruh bagian sistem (Kusumadiantho, 1998)

Kinerja suatu industri menjadi gambaran pengembangan ekonomi berbasis industri. Kinerja yang baik akan mampu mereduksi permasalahan ekonomi salah satunya tingkat pendapatan pelaku industri karena kinerja yang baik akan meningkatkan keuntungan. Kinerja yang baik dapat diukur melalui produktivitas industri dengan melihat perbandingan antar unit variabel produksi.

2.3.4. Produktivitas Industri

Produktivitas merupakan suatu hubungan antara *output* yang dihasilkan dari sebuah sistem dengan *input* yang digunakan untuk menghasilkan *output* (Sink, 1985). Kusumadiantho (1998) mendefinisikan produktivitas sebagai suatu pendekatan untuk

menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi yang produktif untuk memanfaatkan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Selanjutnya, Mudarajad Kuncoro (2007:152) mendefinisikan produktivitas sebagai suatu hasil yang dicapai setiap tenaga kerja atau unit faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, alat produksi dan keahlian tenaga kerja. Sedangkan produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara nilai output dengan tenaga kerja. Guild Laura dalam Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa produktivitas dapat menggambarkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur berdasarkan rasio antara nilai output yang diproduksi terhadap nilai input yang digunakan. Menurut Bruce Stiffel (2007) terdapat empat variabel utama yang dibutuhkan untuk menciptakan produktivitas yang tinggi, yaitu:

1. Teknologi dan metode proses produksi yang tepat guna
2. Manajemen dan organisasi yang baik
3. Pekerja yang memiliki pendidikan atau keterampilan
4. Jiwa kewirausahaan

Jusuf Irianto (1996: 55) menegaskan bahwa variabel yang terpenting yang mempengaruhi produksi bukanlah sumber daya alam saja, tetapi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan didukung infrastruktur yang memadai. Lincoln Arsyad (1999) menyatakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah dapat disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya modal fisik dan manajemen yang baik.

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh komponen *input*, proses, maupun *output*. Secara komprehensif produktivitas dipengaruhi oleh teknologi, organisasi, SDM, infrastuktur, kualitas produk, informasi, modal, dan kebijakan.

2.3.5. Kinerja Industri Batik

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja industri batik telah banyak dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa pakar bahwa produktivitas merupakan indikator dalam

mengukur kinerja, sehingga beberapa penelitian mengenai kinerja industri batik dilihat dari produktivitasnya. Beberapa penelitian industri batik diantaranya dilakukan oleh Qomarudin (2011) yang menemukan bahwa penyebab inefisiensi yang berakibat pada rendahnya produktivitas industri batik di Pekalongan adalah penggunaan dalam bahan baku dan kapasitas tenaga kerja yang hanya bermodalkan ilmu turun temurun. Penelitian terkait industri batik lainnya dilakukan Ratna dan Fatmawati (2013) yang menyebutkan bahwa kelemahan industri batik di Kabupaten Sumenep adalah kualitas tenaga kerja yang rendah, kurangnya dukungan pemerintah berupa pelatihan, dan rendahnya aksesibilitas, bahan baku yang harus impor dari kota lain, persaingan pengepul dan minimnya dukungan modal. Penelitian lainnya dilakukan di Semarang oleh Anisyah (2011) mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi industri batik adalah kelemahan pada input produksi berupa permodalan, rendahnya kualitas SDM dari segi pengetahuan dan keterampilan, lemahnya pemasaran yang meliputi jaringan usaha dan kemampuan pemasaran. Penelitian tersebut didukung oleh Tamaya bahwa kelemahan industri batik Semarang terdapat pada kuantitas SDM yang kurang memadai, kurangnya pelatihan, koordinasi SKPD dengan klaster batik, minimnya anggaran dinas. Penelitian industri batik di Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh Mufarrikoh (2011) yang menghasilkan bahwa permasalahan terbesar adalah kurangnya perhatian pemerintah, kualitas SDM, persaingan antara batik tulis dan batik printing serta kondisi alam (cuaca), dan infrastruktur yang meliputi jalan, listrik, fasilitas pendidikan, pengolahan limbah, perdagangan dan lembaga keuangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rendahnya kinerja industri batik dapat disebabkan dari internal industri itu sendiri dan eksternal industri. Kondisi internal berupa aliran bahan baku, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, pengolahan limbah, serta modal. Kondisi eksternal seperti dukungan pemerintah berupa pelatihan dan bantuan modal, aksesibilitas,

jaringan usaha, pemasaran, persaingan, infrastruktur jalan, listrik, fasilitas pendidikan, perdagangan, lembaga keuangan, serta kondisi alam.

Berdasarkan beberapa teori terkait industri secara makro dan industri batik secara mikro dapat dirumuskan variabel yang berpengaruh dalam pengembangan industri batik sebagai berikut.

Tabel 2.3 Variabel dalam Industri

Sumber	Indikator	Variabel
Jusuf Irianto (1996)	Efisiensi	Penggunaan bahan baku
		Biaya
		Mutu
	SDM	Keterampilan
(Hidayat dan Herlambang, 2009).	Daya Saing	Informasi
Mudarajad Kuncoro (2007)	Sistem Produksi	Nilai tambah
Bruce Stiffel (2007)	Sistem Produksi	Kompetensi tenaga kerja
Jusuf Irianto (1996: 55)	Sistem Produksi	Jumlah tenaga kerja
		Jumlah produksi
Ratna dan Fatmawati (2013)	Kelembagaan	Pelatihan
	Infrastruktur	Aksesibilitas/jalan
Anisyah (2011)	Kelembagaan	Lembaga Pemodalan
	Klaster Bisnis	Jaringan Usaha
Mufarrikoh (2011)	SDA	Kondisi alam
	Daya Saing	Persaingan
	Infrastruktur	Listrik
		Pengolahan limbah

Sumber: Hasil Kompilasi, 2014.

Dari pernyataan beberapa ahli diatas, maka dapat diambil beberapa variabel dalam penelitian. Variabel tersebut adalah nilai tambah, kompetensi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, pelatihan, jalan, lembaga pemodalan, listrik dan pengolahan limbah. Nilai tambah, jumlah tenaga kerja dan jumlah

produksi serta kompetensi tenaga kerja tergolong dalam indikator Sistem Produksi. Pengolahan limbah, jalan dan listrik merupakan variabel dalam indikator infrastruktur, sedangkan pelatihan dan lembaga pemodalan merupakan variabel dalam indikator kelembagaan.

2.4. Sintesa Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa teori terkait pengembangan ekonomi wilayah, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Industri pada pembahasan sebelumnya, tidak seluruh variabel yang diperoleh dari teori menjadi variabel dalam penelitian. Penentuan variabel penelitian menyesuaikan dengan ruang lingkup substansi, sehingga variabel-variabel yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan industri batik pada penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sintesa Kajian Pustaka

Indikator	Variabel
Sistem Produksi	Jumlah tenaga kerja
	Kualitas Tenaga Kerja
	Jumlah produksi
	Teknologi Produksi
	Inovasi
	Nilai Tambah
Infrastruktur	Air bersih
	Listrik
	Jalan
	Pengolahan limbah
	Jaringan Telekomunikasi
Kelembagaan	Kebijakan
	Pelatihan
	Pelaku usaha
	Kerjasama masyarakat, pemerintah dan swasta
	Lembaga pemodalan

Sumber : Hasil Analisis, 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik merupakan pendekatan yang memaparkan hasil kajian pustaka atau pola pikir peneliti mengenai suatu masalah atau topik (Syahban, 2012). Pemikiran rasionalisme ini didasarkan atas analisis teori dan analisis empiri. Pemilihan pendekatan rasionalistik dalam penelitian ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu merumuskan arahan pengembangan industri batik Pamekasan yang dilakukan dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif ini meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan. Penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna (Sujana dan Ibrahim dalam Soendari, 2014). Penelitian deskriptif ini dilakukan pada tahap identifikasi karakteristik industri batik di Kabupaten Pamekasan dan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel terukur yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur terkait. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung melalui perhitungan statistik.

3.3. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah sesuatu yang menjadi pusat atau fokus perhatian dalam penelitian, yang memberikan pengaruh dan memiliki nilai sehingga dapat berubah. Dengan adanya variabel ini data yang diperoleh lebih spesifik pada masalah dalam penelitian dan analisis akan lebih terarah pada tujuan. Variabel merupakan konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (Siregar, 2013). Pada penelitian ini variabel diperoleh dari tinjauan pustaka yang berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan sasaran penelitian. Indikator, variabel dan definisi operasional pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional

Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Sistem Produksi	Jumlah SDM	Jumlah pengrajin batik dalam setiap unit usaha
	Kualitas SDM	Kualitas diukur dari tingkat pendidikan pengrajin batik
	Jumlah produksi	Jumlah produksi yang dihasilkan selama kurun waktu tertentu
	Teknologi	Jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi
	Nilai tambah	Nilai tambah yang diperoleh pengrajin dalam satuan Rupiah
	Inovasi	Perkembangan inovasi motif batik
Infrastruktur	Jalan	Kondisi jalan dilihat dari kondisi jalan baik, sedang dan rusak.
	Listrik	Tingkat pelayanan listrik dilihat dari jumlah pelanggan dan intensitas pelayanan
	Air Bersih	Air bersih terlayani oleh pemerintah atau secara mandiri disediakan masyarakat
	Pengolahan limbah	Ada tidaknya pengolahan limbah cair

Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Kelembagaan	Jaringan telekomunikasi	Ketersediaan menara telekomunikasi dan sinyal
	Kebijakan	Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung industri
	Pelatihan	Ada tidaknya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah
	Pelaku usaha	Keberadaan kelompok usaha yang mewadahi kegiatan industri antar pelaku usaha
	Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta	Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta yang mendukung pengembangan industri batik baik dalam segi pemasaran maupun penyediaan bahan baku
	Lembaga keuangan	Jumlah lembaga keuangan yang dapat membantu pemodal dalam pengrajin

Sumber: Hasil Sintesa Kajian Pustaka, 2014.

3.4. Data dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Data dan Metode Pengumpulan Data Primer

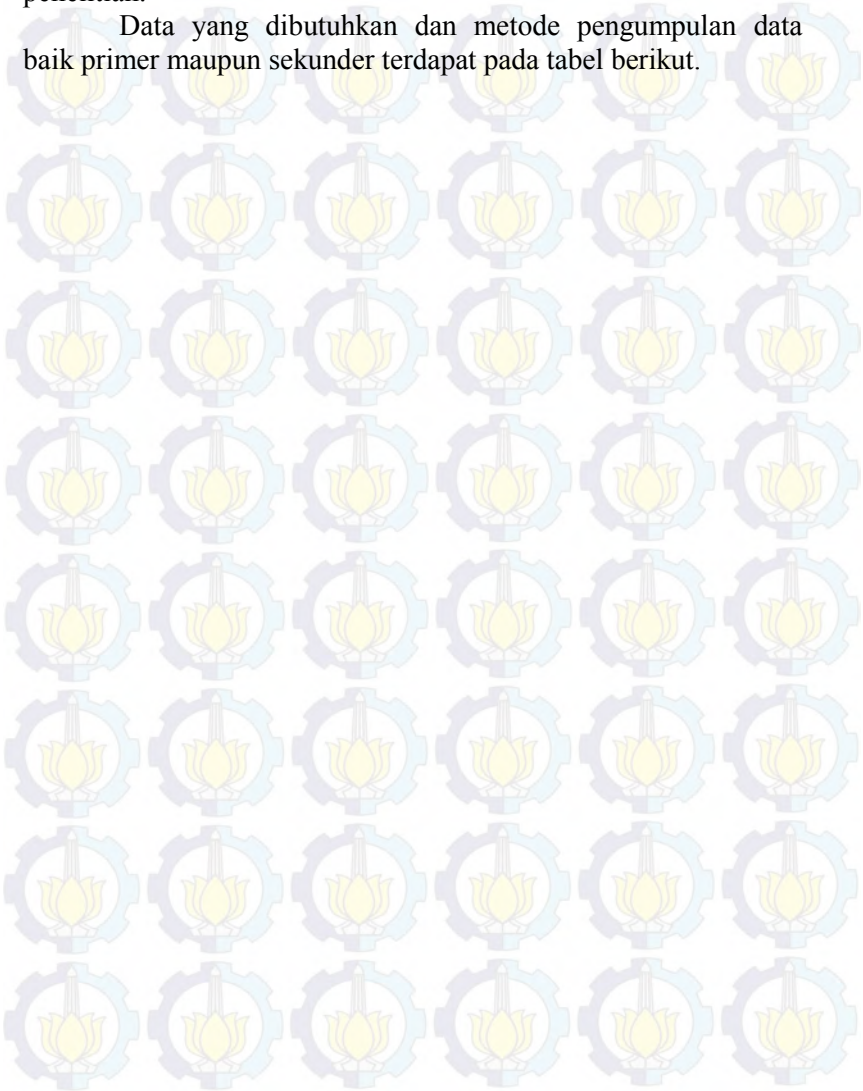
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden (Darmawan, 2013). Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei primer untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dilakukan dalam memperoleh data mengenai kualitas SDM, teknologi, nilai tambah, pengolahan limbah, pelaku usaha dan inovasi. Metode survei primer yang digunakan adalah observasi dan wawancara

3.4.2. Data dan Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi atau hasil penelitian dari dinas/instansi maupun narasumber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2013). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan survei terhadap data-data instansi dan atau literatur. Pada pengumpulan data sekunder ini objek penelitian berupa dokumen-dokumen atau

buku-buku yang menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang dibutuhkan dan metode pengumpulan data baik primer maupun sekunder terdapat pada tabel berikut.



Tabel 3.2 Data dan Sumber Data

Sasaran	Data	Jenis data	Metode pengumpulan data	Sumber data	Instansi
Identifikasi karakteristik usaha Batik Pamekasan	Produktivitas	Jumlah tenaga kerja	Sekunder	Data UMKM Kabupaten Pamekasan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM
		Jumlah produksi	Sekunder		
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik Pamekasan	Sistem Produksi	jumlah tenaga kerja	Sekunder	Lokasi penelitian	Lokasi penelitian
		Tingkat pendidikan tenaga kerja	sekunder		
		Jumlah produksi	Sekunder		
		Jenis teknologi produksi	Primer		
		Nilai tambah			
	Inovasi motif				
	infrastruktur	Jaringan jalan	Sekunder	Data panjang jalan dan kondisi jalan	Badan Pusat Statistik
		Listrik	Sekunder	Distribusi listrik	PLN
		Air bersih	Sekunder	RI-SPAM Kabupaten Pamekasan	Bappeda Kabupaten Pamekasan
		Instalasi pengolahan limbah	Primer dan Sekunder	Data ketersediaan instalasi pengolahan air limbah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran	Data	Jenis data	Metode pengumpulan data	Sumber data	Instansi
		Jaringan telekomunikasi	Primer dan sekunder	Data Persebaran menara telekomunikasi	- Dinas Perhubungan dan Kominfo - Observasi
	Kelembagaan	Kebijakan Pemda yang berkaitan dengan industri batik	Sekunder	Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri batik	- Bappeda - Disperindag Kabupaten Pamekasan
		Pelaku usaha	Primer	Lokasi penelitian	Lokasi penelitian
		Lembaga Keuangan	Sekunder	Data lembaga keuangan dan pelatihan	Dinas Koperasi dan UKM
		Pelatihan			
		Kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat	Primer	Kerjasama yang pernah dilakukan dan pihak terkait yang dilibatkan	- Dinas Koperasi dan UKM - Disperindag
Mentipologikan industri batik	Berdasarkan faktor-faktor yang dihasilkan dari analisis faktor				
Merumuskan arah pengembangan industri batik	Berdasarkan hasil identifikasi analisis faktor dan tipologi yang terbentuk				

Sumber: Penulis, 2014.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas (Darmawan, 2013). Populasi pada penelitian terdiri 1.636 pengrajin yang tersebar dalam 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Galis. Populasi yang ada tidak seluruhnya menjadi responden dalam penelitian, sehingga dilakukan *sampling* agar lebih efektif dan efisien untuk mewakili populasi pengrajin batik.

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2003). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sample, yaitu:

1. *Probability Sampling/Random Sampling*
Probability Sampling/Random Sampling merupakan cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi (Darmawan, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan *disproportional stratified random sampling* untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan. Pengambilan sampel melalui *disproportional sampling* ini didasarkan pada kondisi populasi penelitian dimana jumlah anggota populasi setiap kecamatan jumlahnya tidak proporsional. Rumus pengambilan sampel Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

E = Persentase kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir sebesar 10%.

Jumlah keseluruhan populasi dari 13 desa adalah 1.636 pengrajin. Dengan demikian, jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 pengrajin dengan teknis perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{1.636}{1+1.636(0,1)^2}$$

$$n = 94,23 \sim 95$$

Disamping perhitungan jumlah sampel secara keseluruhan, dalam *disproportional stratified random sampling* dilakukan perhitungan sampel pada setiap strata, dimana dalam penelitian tergambar dalam desa/kelurahan yang ada terdapat industri batik. Perhitungan sampel pada masing-masing sentra dilakukan dengan rumus berikut.

$$n \text{ sentra} = \frac{\text{jumlah populasi desa/kelurahan}}{\text{Total Populasi}} \times n$$

Dalam pengambilan sampel menggunakan *disproportional stratified random sampling* tidak semua desa menggunakan rumus diatas. Untuk Kecamatan Tlanakan dan Waru jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga agar tiga sentra tersebut tetap terwakili maka populasi dalam sentra sekaligus menjadi sampel. Berikut sampel pada setiap sentra.

Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Sampel menggunakan *Disproportional Stratified Random Sampling*

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
Kecamatan Proppo			
1.	Desa Toket	225	13
2.	Desa Candi Burung	137	8
3.	Desa Klampar	453	25
4.	Desa Rang Perang Daya	142	8
Kecamatan Paelengaan			
5.	Desa Larangan Bedung	350	20

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
6.	Desa Rek Kerek	45	3
7.	Desa Angsanah	49	3
8.	Desa Panaan	15	1
9.	Desa Banyupelle	137	8
Kecamatan Pamekasan			
10.	Desa Kowel	30	2
Kecamatan Waru			
11.	Desa Waru Barat	3	3
Kecamatan Pegantenan			
12.	Desa Pegantenan	35	2
Kecamatan Galis			
13.	Desa Pagendingan	15	1

Sumber: Penulis, 2014.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terdapat desa dengan jumlah sampel yang sangat rendah, yaitu Desa Panaan, dan Desa Pagendingan dengan jumlah sampel 1 (satu) pada masing-masing desa. Disamping itu, pada Desa Kowel dan Pegantenan jumlah sampel terhitung adalah 2 (dua), jumlah sampel tersebut kurang representatif karena dikawatirkan responden memiliki jawaban yang berbeda, sehingga tidak akan terlihat kecenderungan karakteristik dari masing-masing desa. Oleh karena itu, pada keempat desa tersebut dilakukan sampling ulang. Gay dan Dehl (1992) menyatakan bahwa sampel untuk penelitian deskriptif minimal sebesar 10% dan untuk jumlah populasi banyak sampel minimal 20% dari jumlah populasi. Sampel dikatakan banyak apabila lebih dari 30. Dengan demikian, untuk empat desa tersebut menggunakan teknik sampling Gay dan Dehl dengan jumlah sampel 20% dari jumlah populasi. Sehingga hasil perhitungan pada tiga desa tersebut adalah :

1. Desa Panaan : $15 \times 20\% = 3$
2. Desa Pagendingan : $15 \times 20\% = 3$
3. Desa Pagantenan : $35 \times 20\% = 7$
4. Desa Kowel : $30 \times 20\% = 6$

Tabel 3.4. Sampel Pengrajin Industri Batik Pamekasan di Setiap Desa

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
Kecamatan Proppo			
1.	Desa Toket	225	13
2.	Desa Candi Burung	137	8
3.	Desa Klampar	453	25
4.	Desa Rang Perang Daya	142	8
Kecamatan Paelengaan			
5.	Desa Larangan Bedung	350	20
6.	Desa Rek Kerek	45	3
7.	Desa Angsanah	49	3
8.	Desa Panaan	15	3
9.	Desa Banyupelle	137	8
Kecamatan Pamekasan			
10.	Desa Kowel	30	6
Kecamatan Waru			
11.	Desa Waru Barat	3	3
Kecamatan Pegantenan			
12.	Desa Pegantenan	35	7
Kecamatan Galis			
13.	Desa Pagendingan	15	3
Total		1.636	110

Sumber: Penulis, 2014.

2. *Non Probability Sampling/ Nonrandom Sampling*

Teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling/ Nonrandom Sampling* merupakan cara pengambilan sampel dimana setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijangkau sampel (Darmawan, 2013). Jenis pengambilan sampel non probabilitas pada penelitian ini digunakan untuk menentukan sampel sebagai subyek dalam perumusan arahan. Teknik sampling yang digunakan adalah *Stakeholder Analysis Sampling*.

Stakeholder adalah orang, kelompok atau institusi yang dikenai dampak dari suatu intervensi program atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi hasil intervensi tersebut (Mc. Cracken dalam Prafitri, 2010). Analisis *stakeholder*

merupakan alat untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari suatu program atau kebijakan (Mc. Cracken dalam Martadwiprati, 2013). Analisis *stakeholder* dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengembangan industri batik. Dengan demikian, dalam analisis *stakeholder* ini diperoleh informasi awal berupa:

1. Pihak yang akan terkena dampak dari suatu program, baik dampak positif maupun dampak negatif
2. Pihak yang dapat mempengaruhi program tersebut, baik berupa pengaruh positif maupun negatif
3. Individu atau kelompok yang perlu dilibatkan dalam program
4. Bagaimana caranya dan kapasitas siapa yang perlu dibangun untuk memberdayakan mereka dalam berpartisipasi.

Analisis *stakeholder* memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *stakeholder* kunci

Pada tahap ini diidentifikasi *stakeholder* yang berpotensi dapat memberikan perubahan dan yang terkena dampak dari adanya program.

2. Menganalisis wewenang *stakeholder* terhadap kebijakan

Kewenangan dari setiap *stakeholder* diperoleh berdasarkan informasi dari pihak yang telah mengetahui wewenang *stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian.

3. Menilai dan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*.

Tingkat kepentingan adalah seberapa besar peranan aktif *stakeholder* dalam menentukan kebijakan. Pengaruh merupakan kekuatan *stakeholder* dalam membuat keputusan atau mengontrol pelaksanaan program.

4. Menyediakan landasan dan strategi partisipasi *stakeholder* dalam kebijakan

Pada tahap ini posisi *stakeholder* diatur berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap kebijakan.

Proses analisis *stakeholder* pada penelitian ini terdapat pada **Lampiran A**. Dari analisis tersebut, diperoleh *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan
4. Ahli Ekonomi Pembangunan
5. Asosiasi Batik Pamekasan

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan berdasarkan pada tujuan dan sasaran penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut analisis data yang dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian.

Tabel 3.5 Teknik Analisis Data

Sasaran	Variabel	Teknik Analisis
Identifikasi karakteristik usaha Batik di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Tenaga Kerja	Deskriptif kuantitatif, dengan menghitung produktivitas pengrajin
	Jumlah produk yang dihasilkan	
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik Pamekasan	Jumlah tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Likert - <i>Confirmatory Factor Analysis</i>
	Kualitas tenaga kerja	
	Jumlah produksi	
	Teknologi	
	Inovasi	
	Nilai tambah	
	Air bersih	
	Listrik	
	Jalan	
	Pengolahan limbah	
	Jaringan telekomunikasi	
	Kebijakan	
	Pelatihan	

Sasaran	Variabel	Teknik Analisis
	Pelaku usaha	
	Kerjasama, pemerintah, masyarakat dan swasta	
	Lembaga keuangan	
Mentipologikan industri batik	Hasil analisis faktor yang dijadikan dasar dalam membentuk klaster. Klaster dikomparasikan dengan karakteristik industri untuk menghasilkan tipologi industri batik	Analisis Klaster
Merumuskan arahan pengembangan industri batik	Hasil analisis faktor dan tipologi industri	Delphi

Sumber: Penulis, 2014.

3.7. Tahapan Penelitian

3.7.1. Identifikasi Karakteristik Usaha Batik

Karakteristik industri batik dilihat dari produktivitas industri dalam satuan lembar/waktu. Untuk mengetahui produktivitas industri batik di Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif ini meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan. Dengan metode deskriptif ini, akan terlihat gambaran eksisting lapangan mengenai komponen-komponen yang dapat mengukur produktivitas industri batik.

Metode deskriptif dilakukan terhadap data-data atau informasi yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas industri batik. Variabel yang digunakan pada tahap ini adalah:

1. Jumlah pengrajin

2. Jumlah produksi

Menurut Umar (1998:156), pengukuran produktivitas dilakukan berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi, sehingga diperoleh angka produktivitas pengrajin menggunakan rumus:

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$$

Hasil tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 2 (dua) berdasarkan nilai mean (rata-rata). Industri batik diklasifikasikan dalam produktivitas tinggi apabila nilai produktivitas desa diatas rata-rata satu kabupaten dan diklasifikasikan dalam Produktivitas rendah apabila nilai produktivitas desa dibawah rata-rata satu kabupaten. Hasil dari perhitungan tersebut menjadi dasar dalam analisis deskriptif kualitatif.

3.7.2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik

3.7.2.1. Analisis *Likert*

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri menggunakan analisis likert. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala *Likert*, variabel yang akan diukur disusun menjadi item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Variabel yang digunakan dalam analisis likert ini adalah seluruh variabel penelitian. Variabel tersebut terdiri dari variabel jumlah produksi, jumlah pengrajin, kualitas pengrajin, inovasi motif, nilai tambah, teknologi produksi, jalan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, pelaku usaha, kerjasama dan lembaga pemodalan.

Pada penelitian, Skala *Likert* dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan industri batik berdasarkan pembobotan dari preferensi responden

(pengrajin). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

1. Sangat Tidak Setuju (STS),
2. Tidak Setuju (TS),
3. Setuju (S),
4. Sangat Setuju (SS)

Prosedur dalam membuat skala *Likert* adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai.
2. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.
3. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia sepakat (+) atau tidak sepakat (-). Respon tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi sangat sepakat diberi skor tertinggi.

3.7.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrument dalam kuesioner telah valid dan reliabel atau konsisten sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan terhadap instrument dalam kuesioner likert yang telah disusun. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrument (Misbahudin dan Hasan, 2013). Uji validitas instrument ini dilakukan dengan uji validitas butir. Adapun tahapan dalam uji validitas sebagai berikut (Misbahudin dan Hasan 2013):

1. Menentukan nilai skor setiap butir pertanyaan beserta total skor

2. Skor setiap butir pertanyaan sebagai X (variabel bebas) dan skor total butir bertindak sebagai Y (variabel terikat).
3. Mengkorelasikan jumlah skor setiap butir pertanyaan dengan jumlah skor total, sehingga menghasilkan koefisien korelasi.

Penentuan validitas tiap butir instrument/pertanyaan adalah dengan membandingkan nilai standar indeks validitas, yaitu 0,3. Apabila nilai koefisien korelasi $\geq 0,3$ membuktikan bahwa instrument valid. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi $< 0,3$ menunjukkan bahwa instrument tidak valid. Untuk menentukan validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung $> r$ tabel maka instrument dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung $< r$ tabel, maka instrument dinyatakan tidak valid.

Instrument yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu (Sarwono, 2006). Jonathan Sarwono (2006) juga menyebutkan terdapat tiga model dalam menghitung reliabilitas, yaitu:

1. Tes Ulang, dimana dalam tes ini dilakukan dengan cara menguji kuesioner kepada kelompok tertentu, kemudian beberapa waktu kemudian kuesioner yang sama diuji kembali kepada responden yang sama. Skor yang dihasilkan pada pengujian pertama dan kedua dikorelasikan. Instrument dinyatakan reliabel apabila hasil korelasinya $\geq 0,8$.
2. Tes Pararel, dimana pada tes ini kuesioner/instrument diberikan kepada kelompok tertentu, kemudian responden yang sama diberikan kuesioner baru dengan isi pertanyaan ekuivalen. Skor dari kedua nilai tersebut

dikorelasikan. Apabila nilai korelasi $\geq 0,8$ maka instrument dinyatakan reliabel.

3. Tes Belah Dua, dimana pada tes ini instrument/pertanyaan yang telah diajukan kepada responden dilihat skornya kemudian dibagi secara acak dalam bentuk ganjil dan genap dari semua jawaban responden. Kelompok ganjil dan genap tersebut dihitung dan kemudian dikorelasikan. Apabila hasil korelasi $\geq 0,8$ maka instrument tersebut dinyatakan reliabel.

Pada penelitian ini menggunakan model tes belah dua, yaitu instrument dalam kuesioner diajukan kepada 30 orang responden. Penetapan jumlah responden ini berdasarkan jumlah responden minimal untuk uji coba, yaitu 30 responden karena jumlah tersebut mendekati kurva normal sesuai teorema limit pusat. Skor setiap instrument selanjutnya dikelompokkan menjadi dua bagian secara acak yang kemudian kedua kelompok instrument tersebut dikorelasikan. Proses korelasi menggunakan *software* SPSS. Ketentuan pada uji reliabilitas adalah nilai *Cronbach's Alpha* harus $\geq 0,8$ untuk dinyatakan reliabel. Langkah pelaksanaan uji reliabilitas ini adalah (Misbahudin dan Hasan 2013):

1. Instrument dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok instrument ganjil dan genap
2. Skor dari kedua instrument dikorelasikan untuk memperoleh *r* hitung.
3. Nilai *r* hitung dibandingkan dengan *r* tabel dengan taraf nyata 5% atau 1 %.

Penentuan reliabilitas instrument dapat dilihat dari hasil perbandingan *r* hitung dengan *r* tabel. Apabila *r* hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen dinyatakan reliabel. Sebaliknya, apabila *r* hitung $< r$ tabel maka instrument tidak valid.

3.7.2.3. Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan salah satu analisis untuk mengidentifikasi dimensi yang mendasari sekelompok variabel kemudian membangun struktur pengelompokan baru yang lebih sederhana berdasarkan sifat dasar tertentu. Pada dasarnya analisis faktor terdiri dari analisis faktor eksploratori/*Exploratory Factor Analysis* dan analisis faktor konfirmatori/*Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Analisis faktor eksploratori merupakan analisis dimana dilakukan eksplorasi dari indikator-indikator atau variabel-variabel manifest yang ada. Indikator atau variabel manifest tersebut nantinya akan terbentuk faktor-faktor yang kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya untuk menentukan variabel-variabel laten. Analisis faktor konfirmatori merupakan teknik analisis faktor yang secara apriori berdasarkan teori dan konsep yang telah diketahui dan dipahami atau ditentukan sebelumnya, sehingga dibuat sejumlah faktor serta variabel apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor tersebut.

Dalam penentuan faktor yang mempengaruhi pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan menggunakan analisis faktor konfirmatori/CFA. *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menurut Joreskog dan Sorborn (1993) digunakan untuk menguji unidimensional, validitas dan reliabilitas model pengukuran konstruk yang tidak dapat diukur langsung. Model pengukuran atau disebut juga model deskriptif (Ferdinand, 2002), atau *confirmatory factor model* (Long, 1983) yang menunjukkan operasionalisasi variabel atau konstruk penelitian menjadi indikator-indikator terukur yang dirumuskan dalam bentuk persamaan dan atau diagram jalur tertentu.

Tujuan CFA adalah untuk mengkonfirmasikan atau menguji variabel, yaitu variabel pengukuran yang perumusannya berasal dari teori. Sehingga, CFA bisa dikatakan memiliki dua fokus kajian, yaitu: (1) apakah indikator-indikator yang dikonsepsikan secara unidimensional, tepat, dan konsisten; (2) indikator-indikator apa yang dominan membentuk konstruk yang diteliti (Kusnendi, 2008).

Input data yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil skala likert. Oleh karena itu, variabel yang digunakan sama dengan variabel dalam kuesioner likert, yaitu seluruh variabel penelitian yang terdiri dari variabel jumlah produksi, jumlah pengrajin, kualitas pengrajin, inovasi motif, nilai tambah, teknologi produksi, jalan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, pelaku usaha, kerjasama dan lembaga pemodalan.

Tahapan-tahapan dalam analisis *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* adalah:

1. Mengelompokkan variabel menjadi beberapa indikator, sesuai telaah kajian pustaka/teori.
2. Melakukan sampling kepada responden, dalam hal ini sampling digunakan untuk memperoleh data melalui analisis likert.
3. Melakukan analisis faktor untuk setiap kelompok variabel (satufaktor) secara terpisah.
4. Melakukan reduksi tiap variabel yang memiliki $MSA < 0.5$ (terkecil satu demi satu, hingga tersisa hanya variabel yang berpengaruh ($MSA > 0.5$)) (Suhr, 2013).

Pengujian validitas dari CFA dilakukan dengan mengukur nilai KMO (*Kaiser Meyer Olkin Measure*) pada hasil analisis melalui bantuan software SPSS. Standar validitas untuk CFA adalah apabila nilai KMO $> 0,5$ (Suhr, 2013).

Kriteria yang harus terpenuhi dalam analisis ini adalah:

1. Probabilitas
 - a. Jika Probabilitas (sig) $< 0,05$, maka variabel dapat dianalisis lebih lanjut
 - b. Jika Probabilitas (sig) $> 0,05$, maka variabel tidak dapat dianalisis lebih lanjut
2. *Measure of Sampling Adequacy (MSA)*
 - a. Jika $MSA = 1$, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan

- b. Jika $MSA \Rightarrow 0,5$, maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- c. Jika $MSA < 0,5$, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu variabel tersebut harus direduksi.

3.7.3. Penentuan Tipologi Industri Batik

Penentuan tipologi industri dilakukan untuk mengetahui pengelompokan sentra industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri. Dengan mentipologikan industri akan diketahui karakteristik industri dalam setiap tipologi yang terbentuk. Tipologi industri ini dilakukan dengan menggunakan analisis klaster. Analisis klaster adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria (Kuncoro dalam Suprianto, 2012). Analisis klaster digunakan untuk mengelompokkan elemen yang mirip sebagai objek penelitian menjadi kelompok yang berbeda dan *mutually exclusive* (Supranto dalam Suprianto, 2012).

Terdapat dua jenis analisis klaster, yaitu *hierarchical Cluster*/klaster hirarki dan *K-Means Cluster*. Dalam Klaster hirarki, subyek dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik subyek. Hirarki Klaster pada umumnya digunakan untuk mengelompokkan subyek yang relatif sedikit dengan sampel (data) yang relatif sedikit pula, karena pada klaster hirarki terjadi proses yang membandingkan setiap pasang subyek, sehingga akan menyulitkan proses *clustering* apabila jumlah subyek banyak. Berbeda halnya dengan klaster hirarki, *K-Means Cluster* lebih efektif untuk pembuatan klaster banyak kasus dan untuk jumlah data (sampel) banyak (diatas 200) (Pradana, 2011).

Oleh karena jumlah subyek dalam penelitian yang akan dikelompokkan tergolong sedikit, yaitu 13 desa dan jumlah responden sebanyak 110 sampel, maka jenis analisis klaster yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah Metode Hirarki. Metode ini mengelompokkan dua atau lebih obyek yang memiliki

kesamaan paling dekat. Dilanjutkan pada obyek lain yang memiliki kemiripan dan seterusnya hingga membentuk pohon yang menunjukkan tingkatan atau hirarki antar obyek mulai dari yang paling mirip hingga paling tidak mirip.

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah output dari sasaran 2, yaitu seluruh variabel dalam penelitian yang telah terkonfirmasi dalam analisis faktor. Input data untuk analisis kluster pada penelitian ini menggunakan data hasil skala likert. Bentuk data dalam kuiseioner likert adalah data ordinal, sedangkan untuk dapat menjadi input dalam analisis kluster jenis data harus interval atau rasio. Oleh karena, data ordinal pada likert harus ditransformasi menjadi data interval atau rasio. Untuk mengubah data ordinal ke data interval menggunakan metode suksesif interval (*Method of Succesiver Interval/MSI*). Tahapan dalam suksesif interval ini adalah (Sarwono, 2015)

1. Menghitung frekuensi
2. Menghitung proporsi
3. Menghitung proporsi kumulatif
4. Menghitung nilai z
5. Menghitung nilai densitas fungsi z
6. Menghitung *scale value*
7. Menghitung penskalaan

Data ordinal yang telah ditranfromasi menjadi data interval, selanjutnya diolah dalam analisis kluster hirarki menggunakan SPSS. Pengelompokan pada analisis ini berdasarkan pada kesamaan karakteristik. Hasil pengelompokan subyek (desa) secara jelas dapat dilihat pada dendogram. Dendogram berbentuk semacam pohon yang menunjukkan tingkatan (hirarki) antar subyek secara jelas. Pada dendogram akan terlihat pengelompokan subyek mulai dari yang paling mirip hingga paling tidak mirip.

3.7.4. Penentuan Arahana Pengembangan Industri Batik

Untuk menentukan arahan pengembangan industri batik Kabupaten Pamekasan menggunakan analisis Delphi. Delphi merupakan metode yang digunakan untuk membantu peneliti

dalam menyusun pohon keputusan optimal seraya melakukan penilaian tentang bobot kepentingan setiap cabang alternatif penyelesaian masalah (Suharso, 2009). Metode delphi ini melibatkan pakar, baik praktisi, akademisi, pejabat, pengusaha dan sebagainya. Dengan demikian, metode delphi dapat digunakan untuk menentukan arahan pengembangan industri batik karena telah melibatkan pemikiran pemerintah yang pada dasarnya perannya sangat besar dalam penentuan kebijakan khususnya dalam penentuan arahan pengembangan batik.

Sebelum mengajukan kuesioner delphi, disusun indikasi arahan sebagai instrument dalam kuesioner delphi. Penyusunan indikasi arahan berdasarkan atas permasalahan pada masing-masing tipologi industri, teori terkait dan *best practice*. Selanjutnya, indikasi arahan diajukan kepada *stakeholder* terkait untuk menghasilkan keputusan berupa arahan pengembangan industri batik Pamekasan. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat kemungkinan adanya perubahan indikasi arahan, baik disebabkan karena adanya ketidaksepakatan *stakeholder* terhadap indikasi arahan maupun adanya arahan tambahan dari *stakeholder*.

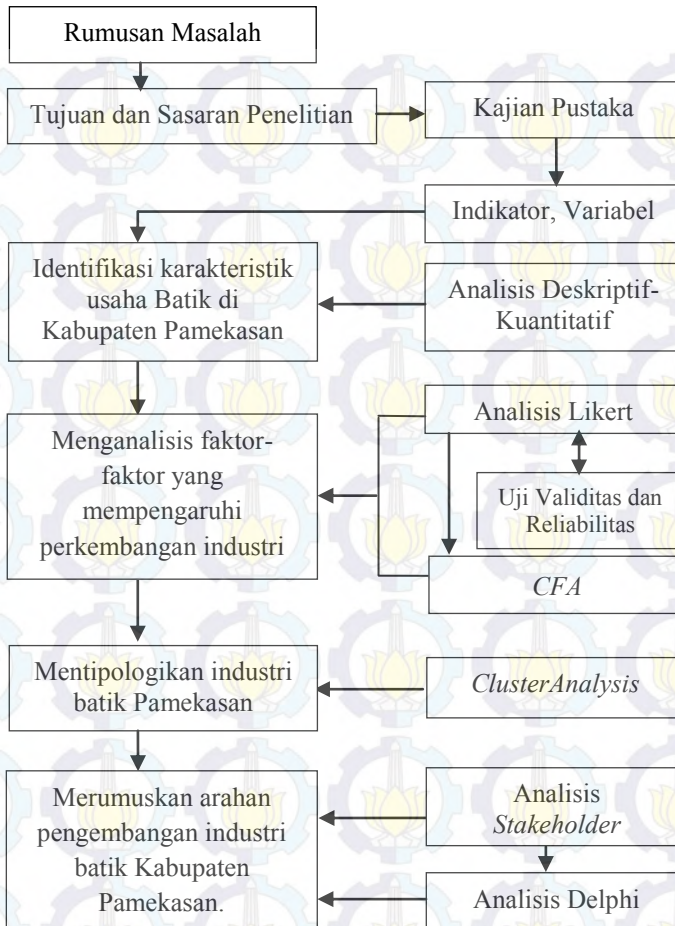
Mansoor (1989:72) menyebutkan langkah-langkah dalam analisis delphi adalah:

1. Identifikasi masalah melalui seperangkat pertanyaan yang disusun cermat.
2. Kuesioner pertama diisi oleh anggota secara terpisah dan bebas tanpa mencantumkan nama.
3. Hasil kuesioner pertama dihimpun, dicatat dan diperbanyak.
4. Setiap anggota dikirim tembusan hasil rekaman
5. Setelah meninjau hasil, responden ditanyai lagi tentang kesimpulan-kesimpulan mereka. Hasil yang baru biasanya mendorong responden untuk memberi kesimpulan baru. Proses tersebut disebut iterasi. Selama iterasi, terdapat kemungkinan perubahan kesimpulan awal dari setiap responden.

Pengajuan kuesioner delphi dihentikan apabila seluruh indikasi arahan yang diajukan telah menghasilkan konsensus dari responden. Indikasi arahan yang menghasilkan konsensus berupa kesepakatan terhadap indikasi arahan, maka indikasi tersebut ditetapkan sebagai arahan pengembangan industri. Apabila indikasi arahan menghasilkan konsensus berupa ketidaksepakatan terhadap indikasi arahan, maka indikasi tersebut direduksi.

Tahapan penelitian menunjukkan tahapan analisis dalam penelitian Industri Batik Pamekasan beserta alat analisis yang digunakan secara jelas terdapat pada **gambar 3.1** berikut.





Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Sumber : Penulis, 2014

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki potensi lokal, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu potensi lokal Kabupaten Pamekasan adalah batik yang berkembang dengan modal utama berupa sumber daya manusia yang memiliki keterampilan membatik secara turun temurun.

Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 79.230 Ha yang terbagi menjadi 13 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 189. Secara geografis, Kabupaten Pamekasan terletak pada $113^{\circ}19'$ - $113^{\circ}58'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}51'$ - $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Pamekasan secara administratif adalah:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Selat Madura
- Barat : Kabupaten Sampang
- Timur : Kabupaten Sumenep

4.1.2. Gambaran Umum Wilayah Studi

Wilayah studi merupakan desa di Kabupaten Pamekasan yang memiliki industri batik. Dengan demikian, wilayah studi meliputi 13 Desa yang tersebar dalam 6 wilayah administratif kecamatan, yaitu

- 1) Desa Kowel di Kecamatan Pamekasan
- 2) Desa Pagendingan di Kecamatan Galis
- 3) Desa Toket, Candi Burung, Klampar dan Rang Perang Daya di Kecamatan Proppo
- 4) Desa Larangan Badung, Rek Kerek, Angsanah, Panaan, dan Banyupelle di Kecamatan Palengaan
- 5) Desa Pegantenan di Kecamatan Pegantenan
- 6) Desa Waru Barat di Kecamatan Waru.

Wilayah studi memiliki total luas wilayah mencapai 71,69 Km². Dengan masing-masing kecamatan memiliki luas, sebagai berikut.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Penelitian

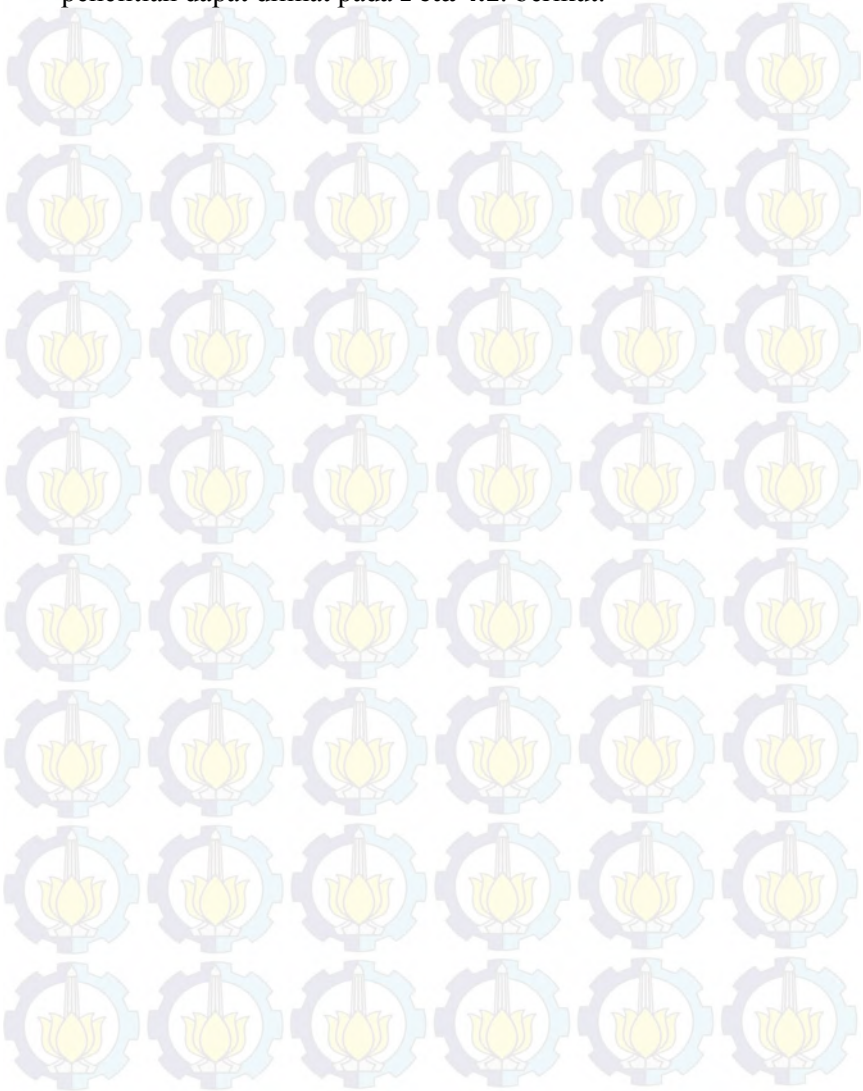
No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Kecamatan Proppo		
1.	Desa Toket	4,70
2.	Desa Candi Burung	4,32
3.	Desa Klampar	2,79
4.	Desa Rang Perang Daya	4,50
Kecamatan Palengaan		
5.	Desa Larangan Badung	7,27
6.	Desa Rek Kerek	15,26
7.	Desa Angsanah	5,18
8.	Desa Panaan	3,00
9.	Desa Banyupelle	10,08
Kecamatan Pamekasan		
10.	Desa Kowel	2,48
Kecamatan Waru		
11.	Desa Waru Barat	8,07
Kecamatan Pegantenan		
12.	Desa Pegantenan	2,86
Kecamatan Galis		
13.	Desa Pagendingan	1,18
Total		71,69

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2014.

Wilayah studi memiliki batas administratif sebagai berikut.

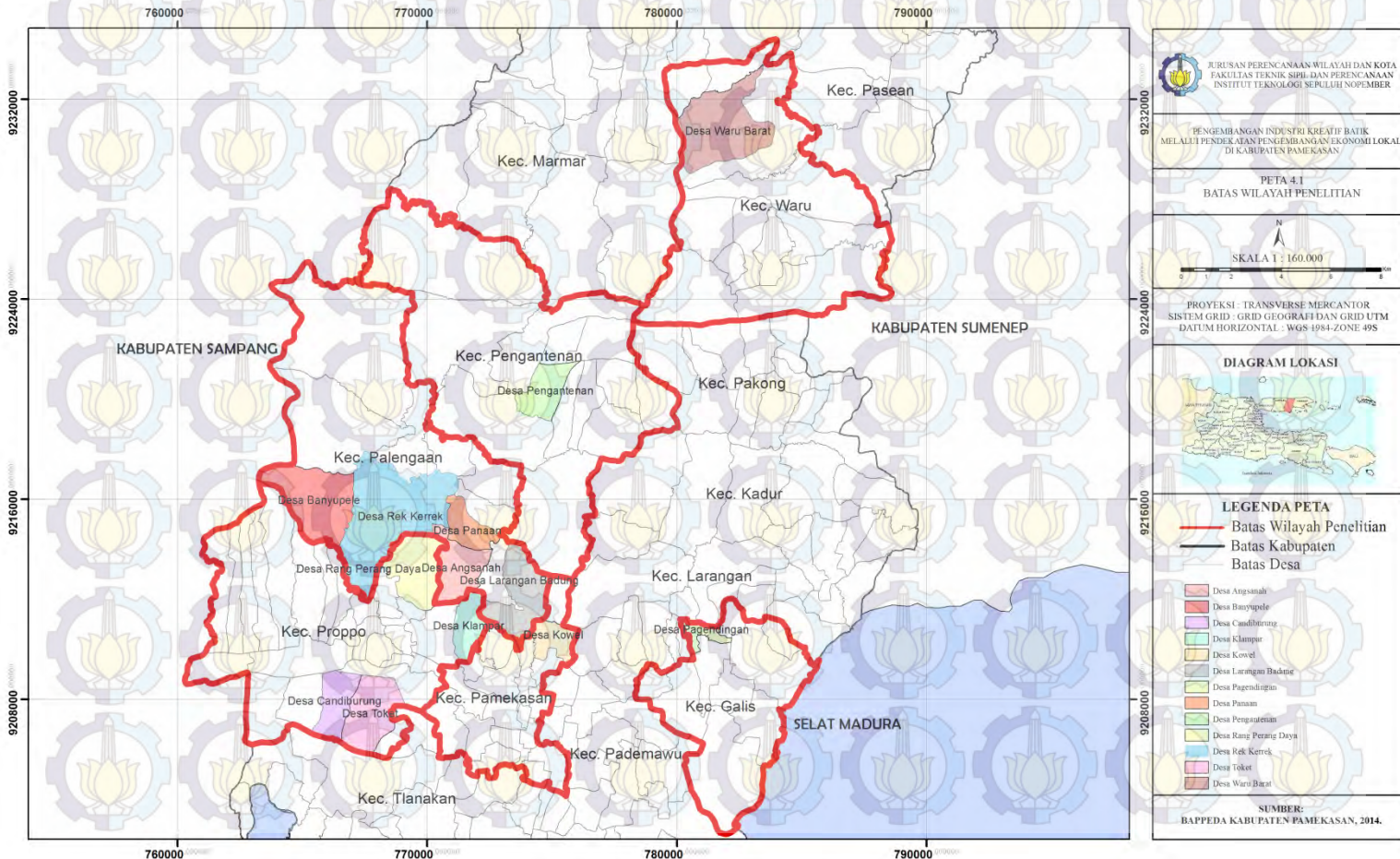
- Utara :Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batu Marmar
- Selatan :Selat Madura dan Kecamatan Pademawu
- Barat :Kabupaten Sampang
- Timur :Kabupaten Sumenep

Untuk lebih jelas mengenai batas administratif wilayah penelitian dapat dilihat pada **Peta 4.1.** berikut.





Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan

4.1.3. Gambaran Umum Industri Batik

Gambaran mengenai industri batik meliputi kondisi Sistem Produksi, infrastruktur, dan kelembagaan. Sistem Produksi terdiri dari jumlah dan kualitas tenaga kerja, jumlah produksi, teknologi, inovasi dan nilai tambah. Gambaran mengenai infrastruktur meliputi air bersih, listrik, jalan, pengolahan limbah dan telekomunikasi. sedangkan kelembagaan terdiri dari pelatihan, institusi, lembaga keuangan, kebijakan dan kerjasama pihak pemerintah, masyarakat dan swasta.

4.1.3.1. Sistem Produksi

Sistem produksi pengaruhnya cukup besar dalam perkembangan dan keberhasilan suatu industri. Sistem produksi meliputi sumber daya manusia, teknologi dan modal. Sistem produksi dilihat dari sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas pengrajin batik, jumlah produksi yang dihasilkan, teknologi, kemampuan menghasilkan nilai tambah dan menciptakan inovasi.

A. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja salah satu faktor yang memengaruhi kinerja suatu industri. Semakin banyak tenaga kerja mengindikasikan bahwa industri batik telah banyak menyerap tenaga kerja dan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian lokal. Jumlah tenaga kerja merupakan jumlah pengrajin batik. Berikut jumlah tenaga kerja pada masing-masing desa di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.2 Jumlah Pengrajin Batik di Kabupaten Pamekasan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengrajin
Kecamatan Proppo		
1.	Desa Toket	225
2.	Desa Candi Burung	137
3.	Desa Klampar	453
4.	Desa Rang Perang Daya	142
Kecamatan Palengaan		
5.	Desa Larangan Badung	350

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengrajin
6.	Desa Rek Kerek	45
7.	Desa Angsanah	49
8.	Desa Panaan	15
9.	Desa Banyupelle	137
Kecamatan Pamekasan		
10.	Desa Kowel	30
Kecamatan Waru		
11.	Desa Waru Barat	3
Kecamatan Pegantenan		
12.	Desa Pegantenan	35
Kecamatan Galis		
13.	Desa Pagendingan	15
Total		1.636

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014.

Secara keseluruhan jumlah pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan cukup banyak, yaitu mencapai 1.636 pengrajin. Pengrajin batik paling banyak dijumpai di Desa Klampar Kecamatan Proppo dan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, sedangkan di desa lainnya memiliki jumlah pengrajin lebih sedikit, bahkan terdapat beberapa desa dengan jumlah pengrajin yang sangat sedikit, yaitu Desa Waru Barat. Pengrajin batik yang berada di Desa Waru Barat merupakan penduduk pendatang yang berasal dari Desa Klampar Kecamatan Proppo.

B. Tingkat Pendidikan Pengrajin

Pengrajin batik pada umumnya memiliki usaha batik karena secara turun temurun pekerjaan tersebut diwariskan oleh keluarganya. Kemampuan membatikpun diperoleh secara turun temurun. Kondisi yang demikian mengakibatkan sebagian besar pengrajin batik memiliki latar belakang pendidikan SD. Sebanyak 59 orang responden memiliki latar belakang pendidikan SD atau belum lulus SD, 21 pengrajin adalah lulusan SMP, 29 pengrajin lulusan SMA dan 1 orang pengrajin lulusan S1. Pengrajin yang

merupakan lulusan S1 adalah pengrajin yang meneruskan usaha orang tuanya.

C. Jumlah Produksi

Jumlah produksi batik merupakan salah satu komponen dalam melihat produktivitas industri batik. Produksi batik dilihat dari berapa lembar batik yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Berikut hasil produksi batik Kabupaten Pamekasan pada setiap minggunya.

Tabel 4.3. Jumlah Produksi Batik di Kabupaten Pamekasan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Produksi (lembar/minggu)
Kecamatan Proppo		
1.	Desa Toket	1.125
2.	Desa Candi Burung	412
3.	Desa Klampar	3.785
4.	Desa Rang Perang Daya	497
Kecamatan Palengaan		
5.	Desa Larangan Badung	1.400
6.	Desa Rek Kerek	90
7.	Desa Angsanah	122
8.	Desa Panaan	75
9.	Desa Banyupelle	343
Kecamatan Pamekasan		
10.	Desa Kowel	105
Kecamatan Waru		
11.	Desa Waru Barat	10
Kecamatan Pegantenan		
12.	Desa Pegantenan	55
Kecamatan Galis		
13.	Desa Pagendingan	33
Total		8.052

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014.

Produksi batik paling banyak adalah Desa Klampar yang mencapai 3.785 lembar batik setiap minggunya. Banyaknya hasil produksi batik Desa Klampar salah satunya dipengaruhi oleh

jumlah pengrajin batik yang cukup banyak, bahkan terbanyak diantara desa lainnya.

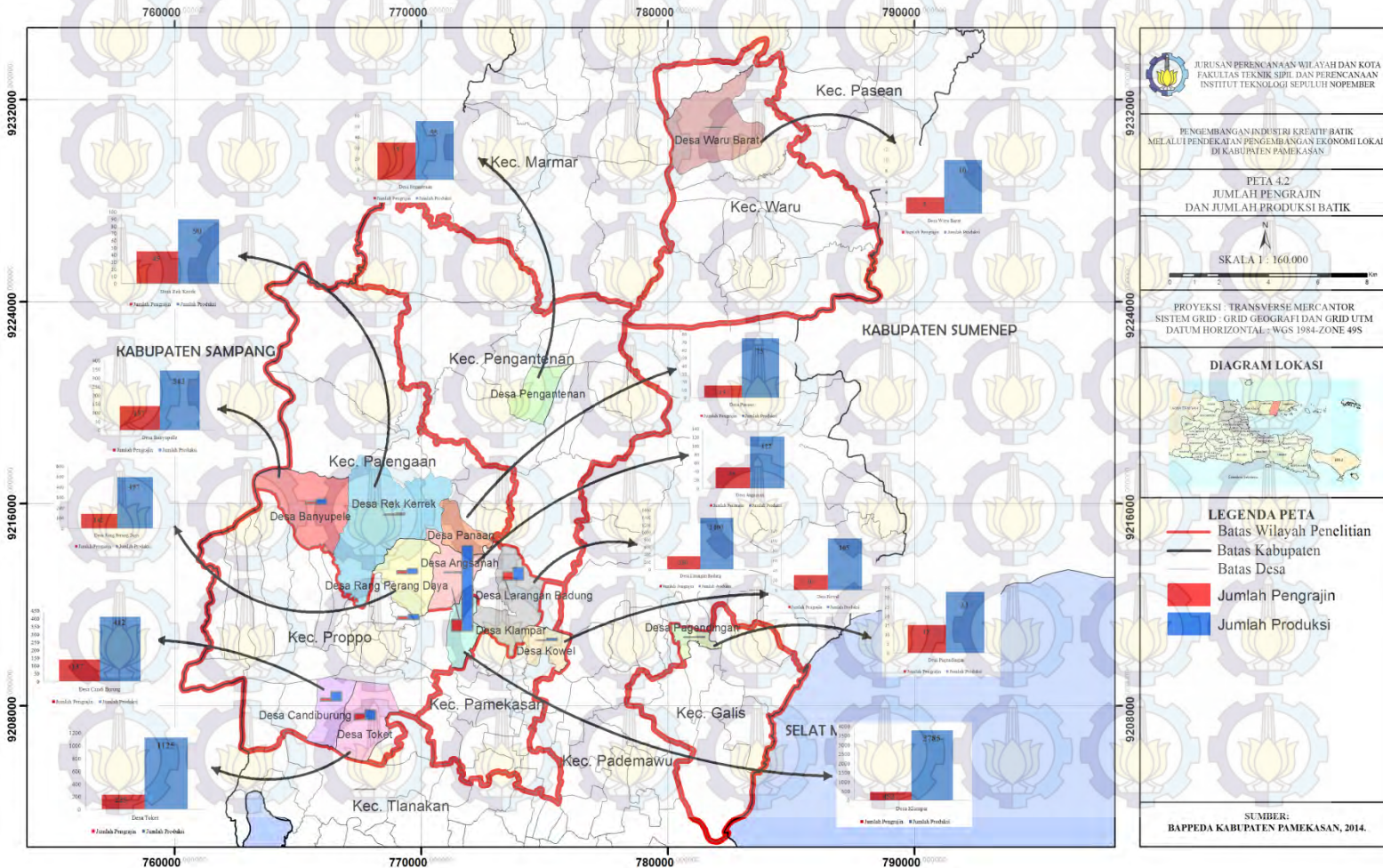
Jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi batik di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Produksi dan Jumlah Pengrajin Batik Pamekasan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengrajin	Jumlah Produksi
Kecamatan Proppo			
1.	Desa Toket	225	1.125
2.	Desa Candi Burung	137	412
3.	Desa Klampar	453	3.785
4.	Desa Rang Perang Daya	142	497
Kecamatan Palengaan			
5.	Desa Larangan Badung	350	1.400
6.	Desa Rek Kerek	45	90
7.	Desa Angsanah	49	122
8.	Desa Panaan	15	75
9.	Desa Banyupelle	137	343
Kecamatan Pamekasan			
10.	Desa Kowel	30	105
Kecamatan Waru			
11.	Desa Waru Barat	3	10
Kecamatan Pegantenan			
12.	Desa Pegantenan	35	55
Kecamatan Galis			
13.	Desa Pagendingan	15	33
Total		1.636	8.052

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014.

Jumlah pengrajin batik yang tinggi tidak menjamin jumlah produksi batik yang tinggi pula. Sebagaimana Desa Rek Kerek dan Desa Kowel, jumlah pengrajin Desa Rek Kerek lebih banyak dari Desa Kowel, namun jumlah produksi Desa Kowel lebih banyak dari jumlah produksi Desa Rek Kerek. Berikut peta grafik jumlah pengrajin dan jumlah produksi batik di Kabupaten Pamekasan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

D. Teknologi Produksi

Teknologi dalam hal ini adalah teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Penggunaan teknologi pada proses produksi dilakukan untuk mempercepat proses produksi, misalnya dalam proses pengeringan. Pada proses produksi pengrajin batik masih menggunakan cara konvensional. Kegiatan produksi batik dibagi menjadi tiga, yaitu tahap membatik (menggambar di kain batik menggunakan malan), tahap pewarnaan, dan tahap pengeringan. Karena ciri khas wilayah adalah batik tulis, sudah dapat dipastikan bahwa dalam proses membatik dilakukan secara manual oleh pengrajin. Pada proses pewarnaan juga masih menggunakan cara konvensional dan dengan perlengkapan yang sederhana, yaitu menggunakan timba atau tong. Pada tahap pengeringan masih mengandalkan cahaya matahari dan belum ada pengrajin yang menggunakan teknologi pengeringan. Berikut proses pengeringan dan proses produksi Batik Pamekasan.



Gambar 4.1. Perlengkapan dan Peralatan Produksi Batik

Sumber: Survey Primer, 2015.

Sebagaimana gambar diatas, peralatan membatik yang digunakan dalam proses produksi sangat konvensional. Pemanasan air untuk kegiatan pewarnaan menggunakan tungku dari batu. Wadah sebagai tempat bahan pewarna memakai benda seadanya dan sebagian besar pengrajin menggunakan tong bekas. Pada proses pengeringan, batik dijemur dibawah terik matahari

tanpa menggunakan teknologi apapun. Berikut proses pengeringan Batik Pamekasan dengan cara dijemur.



Gambar 4.2. Proses Pengeringan Batik

Sumber: Survey Primer, 2015.

E. Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan besarnya nilai yang diperoleh oleh pengrajin. Nilai tambah diperoleh dari pengurangan harga penjualan dengan total modal yang digunakan untuk menghasilkan satu lembar batik.

Nilai tambah setiap industri batik Pamekasan beraneka ragam sesuai dengan jenis batik yang diproduksi. Batik dengan kualitas tinggi dengan harga mencapai Rp.500.000,00 hingga Rp. 15.000.000,00 setiap lembarnya, sedangkan batik dengan kualitas yang tergolong biasa memiliki harga berkisar RP. 80.000,00- Rp.200.000,00. Jenis batik yang diproduksi beraneka ragam, sehingga nilai tambah yang diperoleh juga beraneka ragam. Pada umumnya batik dengan kualitas tinggi memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan batik dengan kualitasnya rendah. Nilai tambah berdasarkan jenis batik yang diproduksi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Nilai Tambah

Waktu pengerjaan (Hari/lembar)	Biaya produksi (Ribuan Rupiah)	Harga Jual (Ribuan Rupiah)	Nilai Tambah/keuntungan (Ribuan Rupiah)
3	50-60	80-100	20-50
3-4	80-100	150-200	50-120
4-7	150-250	500	250-350
15-30	500-800	1.500-2.000	700-1.500
60-90	3.000-5.000	±15.000	10.000-12.000

Sumber : Survey Primer, 2014.

Batik yang diproduksi umumnya batik dengan kualitas biasa, sehingga nilai tambah yang dihasilkan setiap industri pada umumnya sama. Pengrajin batik hanya berani memproduksi batik dengan kualitas tinggi apabila mereka mendapat pesanan. Industri batik yang secara konsisten memproduksi batik dengan kualitas tinggi adalah industri batik di Desa Rang Perang Daya Kecamatan Proppo. Industri batik di Desa Rang Perang Daya ini dapat memproduksi batik hingga mencapai harga Rp. 15.000.000,00 dengan lamanya produksi berkisar dua hingga tiga bulan. Modal yang digunakan dalam memproduksi batik dengan kualitas paling tinggi ini berkisar antara Rp. 3.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00. Dengan memproduksi batik yang berkualitas tinggi nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak.

F. Inovasi

Dalam industri kreatif inovasi menjadi indikator keberhasilan. Inovasi menunjukkan kreativitas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam industri batik, inovasi dapat berupa inovasi motif batik.

Motif batik Pamekasan pada sebagian besar telah mengalami perkembangan. Beberapa desa yang telah melakukan inovasi motif batik, yaitu Desa Klampar, Panaan, Toket, Rang Perang Daya, Candi Burung, Larangan Badung, Angsanah, Pegantenan dan Kowel. Perkembangan inovasi batik dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Desa yang motif batiknya tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun adalah Desa Waru Barat, Rek Kerek, Banyupelle dan Desa Pagendingan.

Berdasarkan wawancara dengan pengrajin, tidak berkembangnya inovasi motif batik karena pengrajin tidak memiliki kreativitas untuk mengembangkan motif batik. Berikut beberapa motif batik Pamekasan.



(a)

(b)

Gambar 4.3 (a) Motif Batik dengan Inovasi

(b) Motif Batik tanpa Inovasi

Sumber : Survey Primer, 2014.

4.1.3.2. Infrastruktur

Keberadaan Infrastruktur pendukung industri batik yang memadai sangat mempengaruhi kinerja industri. Infrastruktur yang berpengaruh terhadap kinerja industri batik secara umum adalah jaringan jalan, jaringan listrik, air bersih, pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi.

A. Jaringan Jalan

Ketersediaan jaringan jalan akan memperlancar kegiatan industri batik, baik dalam proses penyaluran bahan baku maupun dalam proses distribusi hasil produksi. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten tertinggal, dimana pembangunan infrastruktur khususnya jaringan jalan masih sangat kurang, yaitu masih banyak terdapat jalan makadam dan tanah. Persentase jalan makadam masih tergolong banyak, yaitu mencapai 22,74% dan jalan tanah sebanyak 18,47% (Badan Pusat Statistik, 2014). Disamping itu, masih banyak jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Panjang jalan dengan jenis perkerasan aspal di Kabupaten Pamekasan adalah 692,975 Km, dimana jalan dengan kondisi baik sebanyak 58,3%, kondisi sedang 35,9%, kondisi rusak ringan sebanyak 4,6% dan kondisi rusak berat sebanyak

1,2% (Dinas PU Kabupaten Pamekasan, 2015). Berikut gambaran mengenai kondisi jalan di 6 (enam) kecamatan yang memiliki industri batik.

Tabel 4.6. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (%)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Propopo	16,8	38,7	46,7	4,5	3,0
Pamekasan	51,9	74,4	23,9	1,6	0
Palengaan	23,63	72,9	24,2	1,7	1,3
Pegantenan	36,31	29,3	64,6	6,2	0
Waru	49,67	31,3	56,2	11,9	0,6
Galis	28,78	88,1	46,2	0	0,5

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pamekasan, 2015.

Dari data kondisi jalan di 6 (enam) desa batik tersebut menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur jalan di desa batik masih rendah. Kondisi jalan yang merupakan akses menuju lokasi industri batik masih banyak yang kondisinya tidak baik. Sebagaimana di Kecamatan Pegantenan kondisi jalan sedang sebesar 64,6% dan kondisi rusak ringan sebanyak 6,2%. Apabila dibandingkan dengan kondisi jalan di satu Kabupaten Pamekasan, persentase jalan di desa batik dalam kondisi tidak baik (sedang, rusak ringan dan rusak berat) lebih besar dari persentase kondisi jalan yang tidak baik dalam satu kabupaten. Kondisi jaringan jalan yang demikian sulit dilalui oleh kendaraan bermotor, sehingga dapat menghambat pergerakan barang, baik bahan baku maupun barang hasil produksi.



(a) (b) (c)
 Gambar 4.4. (a) Kondisi Jalan Desa Rang Perang Daya
 (b) Kondisi Jalan Desa Rek Kerek
 (c) Kondisi Jalan Desa Banyupelle
Sumber: Survey primer, 2015.

Berdasarkan hasil observasi kondisi jaringan jalan di 13 desa penelitian, sebagian besar desa memiliki kondisi jaringan jalan yang tidak baik, sebagaimana terdapat pada gambar 4.4. Akan tetapi, kondisi jalan yang demikian tidak secara keseluruhan mengganggu kegiatan industri batik. Dengan kondisi jalan yang ada, pengrajin batik di beberapa desa seperti Desa Toket, Panaan, Larangan Badung, Angsanah, Waru Barat, Pegantenan, Pagendingan dan Kowel tidak merasa terhambat dalam melaksanakan kegiatan industri batik. Hal tersebut karena kondisi jalan yang rusak berlokasi jauh dari industri dan saat ini tidak menjadi akses bagi pengrajin dalam melaksanakan kegiatan industri. Akan Tetapi, beberapa desa memiliki kondisi jalan yang sangat buruk hampir disepanjang jalan menuju industri batik, diantaranya Desa Rang Perang Daya dan Desa Rek Kerek dengan kondisi jalan aspal yang sudah rusak berat, sebagaimana terdapat pada gambar 4.4 diatas. Selain itu, Desa Banyupelle dengan jenis perkerasan jalan sebagian besar berupa jalan makadam sebagai akses menuju lokasi industri batik di desa tersebut. Kondisi jalan yang demikian mengakibatkan

terhambatnya kelancaran kegiatan industri batik di Kabupaten Pamekasan.

B. Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses produksi batik. Saat ini telah ada perlengkapan produksi batik yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. Penggunaan perlengkapan atau alat tersebut bergantung pada pelayanan jaringan listrik yang ada. Industri batik berkembang sebagai industri rumah tangga, sehingga pelayanan jaringan listrik dilihat dari jumlah KK yang terlayani listrik.

Tabel 4.7. Jumlah KK Berlistrik Kabupaten Pamekasan

No	Desa/Kelurahan	Persentase KK Terlayani Listrik	
		PLN	Non PLN
Kecamatan Proppo			
1.	Desa Toket	54,64%	-
2.	Desa Candi Burung	62,60%	-
3.	Desa Klampar	73,98%	-
4.	Desa Rang Perang Daya	82,58%	-
Kecamatan Palengaan			
5.	Desa Larangan Badung	46,21%	-
6.	Desa Rek Kerek	13,06%	-
7.	Desa Angsanah	59,35%	-
8.	Desa Panaan	35,90%	-
9.	Desa Banyupelle	28,08%	-
Kecamatan Pamekasan			
10.	Desa Kowel	76,45%	-
Kecamatan Waru			
11.	Desa Waru Barat	64,44%	-
Kecamatan Pegantenan			
12.	Desa Pegantenan	50,74%	-
Kecamatan Galis			
13.	Desa Pagendingan	55,28%	-
Total			

Sumber : PT.PLN, APJ Pamekasan.

Sebagian besar KK masih belum terlayani listrik, dimana rata-rata persentase KK yang terlayani listrik hanya sebesar 54,09%. Desa batik yang sebagian besar penduduknya terlayani listrik adalah Desa Klampar, Rang Perang Daya, Kowel, Candi Burung dan Waru Barat dengan persentase pelayanan diatas 60%. Rendahnya pelayanan listrik di beberapa desa disebabkan karena lokasi permukiman penduduk yang tersebar pada lokasi-lokasi yang berjauhan, sehingga apabila menambah jaringan listrik akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan jangka waktu balik modal yang cukup lama, sehingga PLN sebagai penyedia layanan listrik di Kabupaten Pamekasan masih belum melayani seluruh KK yang ada. Kebutuhan listrik Rumah Tangga yang tidak secara langsung terlayani oleh listrik membuat sambungan sendiri ke daerah atau rumah-rumah yang dialiri listrik oleh PLN.

C. Air Bersih

Ketersediaan air bersih mempengaruhi kelancaran proses produksi batik. Air bersih biasanya digunakan dalam proses pewarnaan. Apabila kebutuhan air bersih dalam industri batik tidak terpenuhi, maka akan menghambat kegiatan produksi. Berikut penyediaan air bersih pada setiap desa yang terdapat industri batik.

Tabel 4.8. Penyediaan Air Bersih

Tabel No.1 Penyediaan Air Bersih							
No	Desa/Kelurahan	Penyediaan Air Minum				Daerah Rawan Air	Keterangan
		PDAM	WSLIC	HIPAM	Sumur Warga		
Kecamatan Proppo							Sebesar 7,8% dari total penduduk Kecamatan Proppo terlayani oleh PDAM. Kapasitas sumur bor seringkali menurun disaat musim kemarau.
1.	Desa Toket	-	-	-	-	√	
2.	Desa Candi Burung	-	√	-	-	√	
3.	Desa Klampar	-	√	-	√	-	
4.	Desa Rang Perang Daya	-	√	-	-	√	
Kecamatan Palengaan							Penyediaan air bersih di Kecamatan Pegantenan telah terlayani oleh WSLIC dan HIPAM
5.	Desa Larangan Badung	-	-	-	√	-	
6.	Desa Rek Kerek	-	√	-	-	-	
7.	Desa Angsanah	-	-	-	√	√	
8.	Desa Panaan	-	-	-	√	-	
9.	Desa Banyupelle	-	√	-	√	-	
Kecamatan Pamekasan							Yang terlayani oleh PDAM sebanyak 58,77% dari total penduduk di Kecamatan Pamekasan
10.	Desa Kowel	√	-	-	√	-	
Kecamatan Waru							Sebagian besar air bersih terpenuhi dengan sumur bor
11.	Desa Waru Barat	√	-	-	√	√	

No	Desa/Kelurahan	Penyediaan Air Minum				Daerah Rawan Air	Keterangan
		PDAM	WSLIC	HIPAM	Sumur Warga		
Kecamatan Pegantenan							Penyediaan air bersih di Kecamatan Pegantenan telah terlayani oleh WSLIC dan HIPAM
12.	Desa Pegantenan	-	-	-	√	-	
Kecamatan Galis							Sekitar 9,9% penduduk Kecamatan Galis terlayani oleh PDAM. Tingginya permintaan penambahan jaringan distriusi.
13.	Desa Pagendingan	-	-	-	√	-	

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Pamekasan, 2007.

Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana kekeringan, sehingga dibutuhkan pelayanan air bersih yang memadai. Dengan adanya pelayanan air bersih yang memadai akan memperlancar proses produksi batik. Masih banyak desa yang belum terlayani oleh PDAM. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk terpenuhi dengan adanya sumur warga. Selain itu, masih ada desa yang memiliki ancaman bencana kekeringan, namun masih menggunakan sumur warga, yaitu Desa Toket. Pelayanan air bersih perlu ditingkatkan terutama pada desa-desa yang memiliki kerawanan bencana kekeringan.

D. Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah dalam industri batik sangat menunjang keberlanjutan industri batik. Limbah kimia yang dihasilkan pada proses produksi apabila tidak diolah sebelum dibuang akan menimbulkan eksternalitas berupa pencemaran lingkungan, sehingga tidak menutup kemungkinan biaya eksternal yang harus dikeluarkan akan semakin besar.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dilapangan, industri batik di Kabupaten Pamekasan tidak memiliki pengolahan limbah. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi seperti limbah hasil proses pewarnaan biasanya dibuang disaluran drainase atau lahan kosong yang ada. Masyarakat belum menyadari dampak negatif yang ditimbulkan apabila limbah industri batik langsung dibuang disaluran drainase atau lahan kosong tanpa diolah terlebih dahulu. Berikut salah satu saluran pembuangan limbah hasil produksi batik di Kabupaten Pamekasan.



**Gambar 4.5. Saluran Pembuangan Limbah
Pengolahan Batik Desa Pagendingan**
Sumber: Survey Primer, 2014.

E. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri batik, khususnya kegiatan pemasaran. Sarana telekomunikasi yang berkembang saat ini adalah telepon selular dan internet, sehingga jaringan telekomunikasi dilihat dari keberadaan menara telekomunikasi. Berikut jumlah menara telekomunikasi di wilayah penelitian.

Tabel. 4.9. Ketersediaan Menara Telekomunikasi

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Tower	Tinggi Tower (Meter)
Kecamatan Proppo			
1.	Desa Toket	-	-
2.	Desa Candi Burung	1	52
3.	Desa Klampar	-	-
4.	Desa Rang Perang Daya	-	-
Kecamatan Palengaan			
5.	Desa Larangan Badung	2	72 dan 51
6.	Desa Rek Kerek	1	52
7.	Desa Angsanah	1	52
8.	Desa Panaan	1	72
9.	Desa Banyupelle	-	-
Kecamatan Pamekasan			

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Tower	Tinggi Tower (Meter)
10.	Desa Kowel	2	50 dan 72
Kecamatan Waru			
11.	Desa Waru Barat	1	61
Kecamatan Pegantenan			
12.	Desa Pegantenan	3	68, 70, dan 62
Kecamatan Galis			
13.	Desa Pagendingan	1	70

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pamekasan, 2014.

Menara telekomunikasi atau tower tidak tersebar merata di seluruh desa, sehingga mengakibatkan sering terputusnya sinyal di beberapa lokasi. Untuk mendukung kelancaran kegiatan industri khususnya pemasaran, penyediaan jaringan telekomunikasi perlu ditingkatkan.

4.1.3.3. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi salah satu penggerak dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya pengembangan industri batik. Kelembagaan dilihat dari pelatihan yang pernah diberikan, keberadaan institusi, lembaga keuangan, dan kerjasama *stakeholders*.

A. Pelatihan

Dalam pengembangan ekonomi lokal dengan pemberdayaan masyarakat pelatihan sangat penting guna menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian sehingga mereka lebih mandiri. Dalam pengembangan industri batik, pelatihan yang dibutuhkan terkait pengembangan inovasi motif, cara mengolah limbah dan pelatihan lainnya yang dapat mendukung dalam kegiatan produksi maupun pemasaran. Sebagian besar tenaga kerja memang memiliki keterampilan membuat batik secara turun temurun, sehingga sangat jarang ada inovasi dari motif batik yang dihasilkan. Disamping itu, limbah hasil proses produksi tidak diolah terlebih dahulu. Rendahnya inovasi motif maupun tidak adanya pengolahan limbah pada umumnya disebabkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan

yang cukup untuk berinovasi maupun mengolah limbah, sehingga adanya pelatihan sangat penting untuk membangun keahlian pengrajin.

Pelatihan pernah diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Berikut data pelatihan yang pernah diberikan kepada pengrajin batik.



Tabel 4.10. Data Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Pelaksana	2012		2013		2014	
			Jumlah peserta	Asal Peserta	Jumlah peserta	Asal Peserta	Jumlah peserta	Asal Peserta
1.	Pelatihan Sistem Pembukuan	Dinas Koperasi dan UKM	Seluruh anggota koperasi	Anggota Koperasi	Seluruh anggota koperasi	Anggota Koperasi	Seluruh anggota koperasi	Anggota Koperasi
2.	Pelatihan Keterampilan Membatik		50	Anggota koperasi di -Klampar -Candi burung -Toket -Kowel	50	Anggota koperasi di -Kowel -Rang perang	50	Anggota Koperasi di -Klampar -Rang Perang Daya
3.	Pelatihan desain batik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	200	Perwakilan setiap desa	400	Perwakilan setiap desa
			-	-	-	-	100	Perwakilan setiap desa
4.	Pelatihan Manajemen Industri		-	-	150	Perwakilan setiap desa	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan, 2014.

Halaman ini sengaja dikosongkan

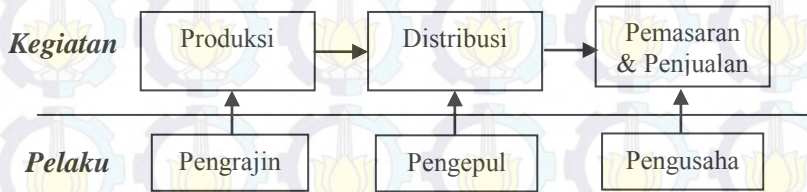
Pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait khususnya Dinas Koperasi dan UKM hanya melayani anggota Koperasi saja, padahal sebagian besar pengrajin batik tidak tergabung dalam keanggotaan koperasi. Untuk pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada umumnya tidak mencakup seluruh desa dan didominasi oleh pengrajin pada industri yang ada di wilayah perkotaan atau wilayah yang memiliki jumlah industri cukup banyak. Untuk wilayah utara seperti Desa Waru Barat dan Pegantenanan serta wilayah Timur seperti Desa Pegendingan seringkali kurang mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Pelatihan sangat penting bagi perkembangan industri batik terutama untuk wilayah yang industrinya masih sedikit sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan akan mengalami perkembangan.

B. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan produksi hingga pemasaran batik. Pelaku usaha pada industri batik tulis Pamekasan ini terdiri dari pengrajin, pengepul dan pengusaha. Antara pelaku usaha yang lokasinya berdekatan membentuk suatu kelompok, dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari pengrajin, pengepul dan pengusaha. Akan tetapi, pada beberapa desa belum terbentuk kelompok. Beberapa desa yang pengrajinnya telah tergabung dalam kelompok batik adalah Desa Klampar, Larangan Badung, Toket, Angsanah.

Antara pengrajin, pengepul dan pengusaha membentuk suatu kegiatan yang saling berkaitan. Pengrajin adalah orang yang hanya melakukan kegiatan produksi. Pengepul bertugas mengumpulkan seluruh hasil produksi batik dari pengrajin yang kemudian disalurkan ke pedagang atau pengusaha. Dengan kata lain, pengepul menjadi distributor produk batik yang dihasilkan. Pengusaha batik atau pedagang adalah pihak yang menjual batik, baik ke pasar maupun penjualan ke luar wilayah. Pengusaha ini biasanya orang-orang yang telah memiliki *link* atau kerabat di luar wilayah untuk memasarkan hasil produksinya. Diagram

mengenai pelaku usaha batik di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut.



Gambar 4.6 Pelaku Usaha Batik Pamekasan

Sumber: Penulis, 2014.

C. Lembaga Pemodalán

Sebagian besar pengrajin batik memiliki kendala dalam modal. Lambatnya perkembangan industri batik karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki modal yang cukup besar untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi yang dihasilkan menyesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki.

Sebagian besar industri batik di Kabupaten Pamekasan mengandalkan modal pribadi. Masyarakat masih belum terbiasa dan belum cukup berani menggunakan modal pinjaman, hal tersebut disebabkan karena penjualan dan produksi batik yang tidak menentu, sehingga apabila mengandalkan modal pinjaman mereka akan terbebani dengan bayaran yang harus dilunasi setiap bulannya.

Kabupaten Pamekasan memiliki koperasi yang khusus melayani pelaku IKM batik. Selain itu, terdapat pula Koperasi khusus UKM yang didalamnya juga dapat melayani pelaku IKM batik. berikut koperasi yang melayani IKM batik di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.11. Koperasi yang melayani IKM Batik Pamekasan

No	Lokasi	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1.	Desa Klampar	Koperasi Batik	1	25
2.	Larangan Badung	Koperasi Batik	1	23

No	Lokasi	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
3.	Desa Banyupelle	Koperasi Batik	1	43
4.	Desa Bugih	Koperasi Batik	1	46
5.	Desa Bunder	Koperasi UKM	1	25 (pelaku IKM batik)
Total			5	162

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2014.

Pelaku usaha dalam industri batik yang memanfaatkan koperasi batik hanya sebesar 9.90% dari keseluruhan pelaku IKM batik yang ada. Disamping karena *mindset* masyarakat yang cenderung memiliki ketidakberanian memanfaatkan koperasi, keberadaan koperasi juga masih sedikit dan tidak seluruh desa dilengkapi koperasi batik. Selain koperasi batik dan koperasi IKM, terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dapat membantu pengrajin batik dalam hal pemodalan. BPR di Kabupaten Pamekasan berlokasi di pusat kota. Permasalahan klasik yang sering dialami pelaku IKM khususnya industri batik berupa lemahnya modal, akan terbantu dengan adanya BPR, koperasi batik dan koperasi UKM.

D. Kerjasama masyarakat, pemerintah dan *private sector*.

Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan industri batik. Disamping itu, peran pihak swasta juga sangat diperlukan mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat khususnya dalam hal finansial.

Bentuk kerjasama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan batik hingga saat ini masih sebatas pelaksanaan pameran. Pameran dilakukan tidak hanya dilingkup wilayah Kabupaten Pamekasan saja, tetapi telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Pameran yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan biasanya tidak spesifik produk batik, tetapi seluruh produk kerajinan yang dihasilkan di Kabupaten

Pamekasan, namun batik tetap menjadi produk unggulan. Berbeda halnya dengan pameran yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Pamekasan yang memang bertujuan mempromosikan Batik Pamekasan. Pameran biasanya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan instansi-instansi lokal, instansi dari kota/kabupaten lain dan pihak swasta. Berikut pameran yang pernah dilakukan dalam rangka memasarkan produk unggulan batik.

Tabel 4.12. Pameran Batik

Tahun	Jenis	Frekuensi	Lokasi	Keterangan
2014	Pameran Batik	4 kali	Banjarmasin, Sutrabaya, Bali, Jakarta	Pengrajin sebagai subyek penyedia produk batik. pengrajin yang mengikuti pameran dibatasi sebanyak 2 (dua) orang. Akan tetapi tidak ada pembatasan produk batik yang dibawa, sehingga pengrajin lain berhak menitipkan barang hasil produksinya.
2013	Pameran Batik	2 kali	Medan, Surabaya	
2012	Pameran Batik	2 kali	Jogja, Jakarta	
Setiap tahun	Pameran	Sekali dalam satu tahun	Kabupaten Pamekasan	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014.

Kerjasama lainnya adalah kerjasama pemasaran antara pelaku usaha batik Pamekasan dengan beberapa butik dan *Art shop*, seperti Mirota di Kota Surabaya. Kerjasama dalam bentuk lain yang secara langsung untuk mengembangkan industri batik Pamekasan masih belum ada. Kabupaten Pamekasan memang mengalami kesulitan dalam hal menarik investor. Bahkan, saat ini investasi yang pernah dilakukan hanya pada industri garam saja.

Untuk mengembangkan industri batik dibutuhkan bentuk kerjasama misalnya dalam penyediaan bahan baku, sarana dan prasarana pendukung industri serta pemasaran.

E. Kebijakan

Kebijakan pemerintah harus mendukung keberlanjutan industri batik. Beberapa kebijakan pemerintah terkait batik di Kabupaten Pamekasan telah tertuang dalam beberapa bentuk rencana, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan dan Rencana Kawasan Potensial Kecamatan Proppo yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan BPWS.

a) RTRW Kabupaten Pamekasan 2012-2032

Dalam RTRW Kabupaten Pamekasan ditetapkan lokasi IKM batik yang akan dikembangkan pada 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru. Saat ini, masih terdapat 6 kecamatan yang telah berkembang industri batik, sehingga dibutuhkan pengembangan di 4 (empat) kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pakong.

b) RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018

Dalam RPJMD 2013-2018 Kabupaten Pamekasan disebutkan beberapa arahan yang didalamnya mencakup industri batik. Arahan tersebut antara lain:

1. Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah Industri (Jumlah Usaha Mikro dan Menengah). Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

2. Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif.

Dengan indikator keberhasilan yaitu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan program yakni pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

Arahan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD diatas mencakup industri batik yang tergolong dalam industri kecil, menengah dan kreatif. Untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas manajemen dan pemasaran ditetapkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.

c) Rencana Penataan Kawasan Kecamatan Proppo

Dalam rencana penataan kawasan Kecamatan Proppo direncanakan pengembangan tiga jenis sentra industri batik, yaitu:

Tabel 4.13. Lokasi Pengembangan Sentra Industri Batik di Kecamatan Proppo

No	Jenis Sentra	Lokasi
1.	Sentra Produksi	Desa Klampar.
2.	Sentra Pengolahan	Desa Toket dan Rang perang Daya.
3.	Sentra Pemasaran	Pasar TujuhBelas Agustus Desa Bugih

Sumber: Rencana Kawasan Potensial Proppo, 2014.

Disamping sebagai sentra produksi Desa Klampar juga direncanakan sebagai pusat pariwisata batik. Desa Klampar diarahkan sebagai penahan wisatawan dalam mengenal produk khas batik Madura. Rencana pengembangan wisata batik ini bertujuan untuk mengenalkan batik Pamekasan kepada wilayah lainnya dan membangun daya tarik wisatawan serta investor untuk mengembangkan industri batik,

Untuk mengembangkan sektor industri batik di Kawasan Potensial Kecamatan Proppo, diperlukan beberapa strategi, antara lain:

1. Perlunya promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan sentra batik di Desa Klampar

2. Perlunya pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kualitas produksi dalam hal inovasi produk turunan
3. Perlunya sarana IPAL untuk mengelola limbah batik yang dihasilkan
4. Penyediaan prasarana jalan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan industri batik.

Secara lebih detail rencana pengembangan industri batik di Kecamatan Proppo ini mencakup beberapa komponen tata ruang, yaitu :

Tabel 4.14. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial Kecamatan Proppo

No	Aspek	Rencana
1.	Penataan Kawasan	Penataan <i>showroom</i> yang didesain dengan menggunakan unsur-unsur batik sebagai ciri khas kawasan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jalan poros desa sebagai jalan utama rute wisata di Kampung Batik - Pengadaan PJU di sepanjang jalan utama rute wisata di Kampung Batik - Pengadaan IPAL untuk mengelola limbah hasil industri - Pengadaan <i>sign board</i>
3.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pelatihan SDM guna kaderisasi pembatik - Adanya pelatihan SDM untuk meningkatkan inovasi membuat produk turunan batik - Adanya pelatihan SDM guna melatih mengelola limbah hasil industri - Adanya sosialisasi kepada pemilik industri dalam kegiatan produksi lebih ramah lingkungan - Adanya pelatihan SDM melek teknologi internet sebagai media pemasaran yang efektif.
4.	Utilitas	- Rencana pengembangan area konservasi

No	Aspek	Rencana
		<p>pada area pengembangan jaringan listrik SUTT di Kecamatan Pamekasan – Kecamatan Proppo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SUTT, di Desa Gro'om, Desa Batukalangan, Desa Candi Burung, Desa Samatan - Pengembangan SUTM di Desa Klampar - Pengadaan PJU di Desa Klampar - Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di seluruh desa - Pembangunan dan pemeliharaan embung-embung di seluruh desa - Pemeliharaan sumber air di seluruh desa - Peningkatan kualitas dan kuantitas PDAM di Desa Tattangoh, Desa Panaguan, Desa Jambringin, Desa Proppo, Desa Pangaruyan, Desa Billaan, Desa Lenteng, Desa Samatan - Penyediaan air minum dari mata air di seluruh desa - Pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air di seluruh desa - Pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan. - Perencanaan pembangunan drainase - Pembangunan LPS di Desa Pangurayan, Pasar 17 Agustus, dan Desa Klampar - Pembangunan IPAL di Desa Klampar

Sumber: Rencana Pengembangan Kawasan Potensial Kecamatan Proppo.

4.1.4. Penelitian Sejenis

Beberapa permasalahan industri batik di berbagai wilayah pada umumnya sama, baik berupa rendahnya kualitas tenaga kerja, pemodalan, kebijakan pemerintah, kerjasama dan berbagai

permasalahan lainnya. Wilayah-wilayah tersebut memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk permasalahan sejenis di Kabupaten Pamekasan. Permasalahan kualitas tenaga kerja Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan *skill*, sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan. Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membatik yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM. Disamping itu, dalam pelaksanaan pelatihan tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengembangkan batik Jambi. Salah satunya kerjasama antara pemerintah daerah Jambi dengan universitas untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin. Kerjasama dapat dilakukan oleh *stakeholder* dan pada berbagai aspek, disamping dalam pengadaan pelatihan dapat juga berupa kerjasama pemasaran. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan luar wilayah Jambi, yaitu telah disediakan *Art Shop* Kembang Seri Wisma Perwakilan Jambi-Jakarta.

Dapat dilihat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan industri batik, beberapa wilayah salah satunya Surakarta telah menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan industri batik. Hwienawati dkk (1989-1990) menyebutkan bahwa pemerintah sangat terlihat dalam mendorong industri batik untuk berkembang salah satunya dengan promosi batik dalam maupun luar negeri. Adapun upaya pemerintah yang dilakukan adalah:

- Promosi pada even resmi pemerintah daerah
- Iklan melalui berbagai media, meliputi surat kabar, radio, majalah, brosur, bioskop, kalender, papan iklan, dan televisi

- *Personal selling*, yaitu promosi dari mulut ke mulut
- *Sales Promotion*, dilakukan melalui pengadaan fashion show, *cofashion show*, *sponsorship*, donator, hadiah-hadiah dan lain-lain.

Sedangkan bentuk keterlibatan pemerintah di Kota Jambi khususnya dalam pemasaran disamping telah dibangun *showroom* Dewan Kajinan Nasional Daerah Jambi, Balai Kerajinan Rakyat dan Galeri Batik, sedangkan pada tingkat nasional telah disediakan *Art Shop* Kembang Seri Wisma Perwakilan Jambi-Jakarta (Mulyadi, 2012).

Industri kecil menengah batik di beberapa lokasi pada umumnya memiliki kendala di bidang kelompok usaha, pemodal dan kerjasama. Permasalahan kelompok usaha atau organisasi di Surakarta oleh Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang tegas berguna menunjang kelancaran industri. Sedangkan permasalahan pemodal batik Surakarta erat kaitannya dengan masalah perbelanjaan bahan baku, produksi, penjualan, kepegawaian dan lainnya. Modal untuk industri batik Surakarta untuk mengatasi masalah pemodal umumnya berasal dari pinjaman dari kredit bank asing dan bank swasta nasional serta bank pemerintah.

Pada industri batik lainnya, yaitu Industri Batik Simbangkulon Kabupaten Lamongan oleh Purwaningsih (2008) menyebutkan bahwa hubungan antar pelaku usaha diwujudkan melalui proses saling bertukar pikiran dan *sharing* informasi antar pelaku usaha untuk memperbaiki manajemen internal produksi. Adanya sistem jaringan baik antar stakeholder yang melakukan kerjasama meliputi koordinasi antar stakeholder, pengembangan SDM dan perluasan jaringan informasi merupakan kunci keberhasilan kerjasama dalam upaya mencapai eko-efisiensi.

4.2. Analisis

4.2.1. Identifikasi Karakteristik Usaha Batik di Kabupaten Pamekasan

Karakteristik usaha batik di Kabupaten Pamekasan dilihat dari tingkat produktivitas usaha batik di setiap desa. Produktivitas diperoleh melalui perbandingan antara jumlah pengrajin dengan jumlah produksi batik. Untuk menentukan produktivitas tidak mempertimbangkan kualitas batik yang dihasilkan. Dalam Penelitian ini, produktivitas diperoleh melalui rumus yang dinyatakan Umar (1998), sebagai berikut.

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$$

Tabel 4.15. Produktivitas Industri Batik di Kabupaten Pamekasan

Desa	Jumlah Pengrajin	Jumlah Produksi (minggu)	Produktivitas
Desa Toket	225	1125	5,00
Desa Candi Burung	137	412	3,01
Desa Klampar	453	3785	8,36
Desa Rang Perang Daya	142	497	3,50
Desa Larangan Badung	350	1400	4,00
Desa Rek Kerek	45	90	2,00
Desa Angsanah	49	122	2,49
Desa Panaan	15	75	5,00
Desa Banyupelle	137	343	2,50
Desa Kowel	30	105	3,50
Desa Waru Barat	3	10	3,33
Desa Pegantenan	35	55	1,57
Desa Pagendingan	15	33	2,20
Rata-rata produktivitas			3,57

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa perbedaan jumlah pengrajin dan jumlah produksi yang dihasilkan

mengakibatkan perbedaan produktivitas industri batik di Kabupaten Pamekasan. Produktivitas paling tinggi adalah Desa Klampar dengan produktivitas 8,36, sedangkan paling rendah adalah Desa Pegantenan dengan produktivitas 1,57.

Produktivitas industri batik di Kabupaten Pamekasan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu produktivitas tinggi dan produktivitas rendah. Suatu desa diklasifikasikan sebagai produktivitas tinggi apabila produktivitas desa $>$ rata-rata dan diklasifikasikan sebagai produktivitas rendah apabila produktivitas desa $<$ rata-rata. Nilai produktivitas rata-rata industri batik di Kabupaten Pamekasan adalah 3,57. Dengan demikian, klasifikasi industri batik di Kabupaten Pamekasan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Klasifikasi Produktivitas Industri Batik

Desa	Produktivitas	Klasifikasi
Desa Klampar	8,36	Produktivitas Tinggi
Desa Toket	5,00	
Desa Panaan	5,00	
Desa Larangan Badung	4,00	
Desa Kowel	3,50	Produktivitas Rendah
Desa Candi Burung	3,01	
Desa Rang Perang Daya	3,50	
Desa Waru Barat	3,33	
Desa Banyupelle	2,50	
Desa Angsanah	2,49	
Desa Pagendingan	2,20	
Desa Rek Kerek	2,00	
Desa Pegantenan	1,57	

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Desa yang memiliki produktivitas tinggi adalah Desa Klampar, Desa Toket, Panaan dan Larangan Badung. Desa klampar merupakan desa yang memiliki pengrajin paling banyak dan produk batik yang dihasilkan juga paling banyak dibandingkan dengan desa lainnya. Begitu halnya dengan Desa Toket dan Larangan Badung yang memiliki jumlah pengrajin dan

produk yang dihasilkan cukup banyak dengan nilai produktivitas diatas rata-rata, sehingga dua desa tersebut memiliki produktivitas tinggi. Berbeda dengan tiga desa lainnya, Desa Panaan memiliki jumlah pengrajin yang sangat sedikit dan jumlah produk batik yang dihasilkan sangat sedikit apabila dibandingkan dengan tiga desa lainnya yang tergolong produktif. Akan tetapi, perbandingan antara jumlah pengrajin dan jumlah produksi menunjukkan bahwa produktivitas pengrajin batik di Desa Panan tergolong tinggi, hal tersebut disebabkan karena setiap orang mampu menghasilkan batik yang melebihi rata-rata produksi batik tiap orang setiap minggu.

Lebih dari 50% desa batik memiliki produktivitas yang rendah. Meskipun demikian, terdapat beberapa desa yang menghasilkan produk batik jauh lebih banyak dari batik yang diproduksi oleh Desa Panaan, yaitu Desa Candi Burung, Rang Perang Daya dan Banyupelle. Tiga desa tersebut memiliki jumlah pengrajin dan jumlah produksi yang tinggi. Akan tetapi, setiap pengrajin di tiga desa tersebut hanya mampu menghasilkan batik yang jumlahnya dibawah rata-rata produksi batik satu kabupaten. Desa Kowel, Angsanah, Waru Barat, Rek Kerek, Pagendingan dan Desa Pegantenan memang memiliki jumlah pengrajin maupun jumlah produksi yang sedikit dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga desa-desa tersebut tergolong dalam produktivitas rendah. Peta produktivitas industri batik Pamekasan sebagai berikut.





JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK
MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
DI KABUPATEN PAMEKASAN

PETA 4.3
PRODUKTIVITAS INDUSTRI BATIK



SKALA 1 : 160.000

0 1 2 4 6 8 Km

PROYEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
SISTEM GRID : GRID GEOGRAFI DAN GRID UTM
DATUM HORIZONTAL : WGS 1984-ZONE 49S

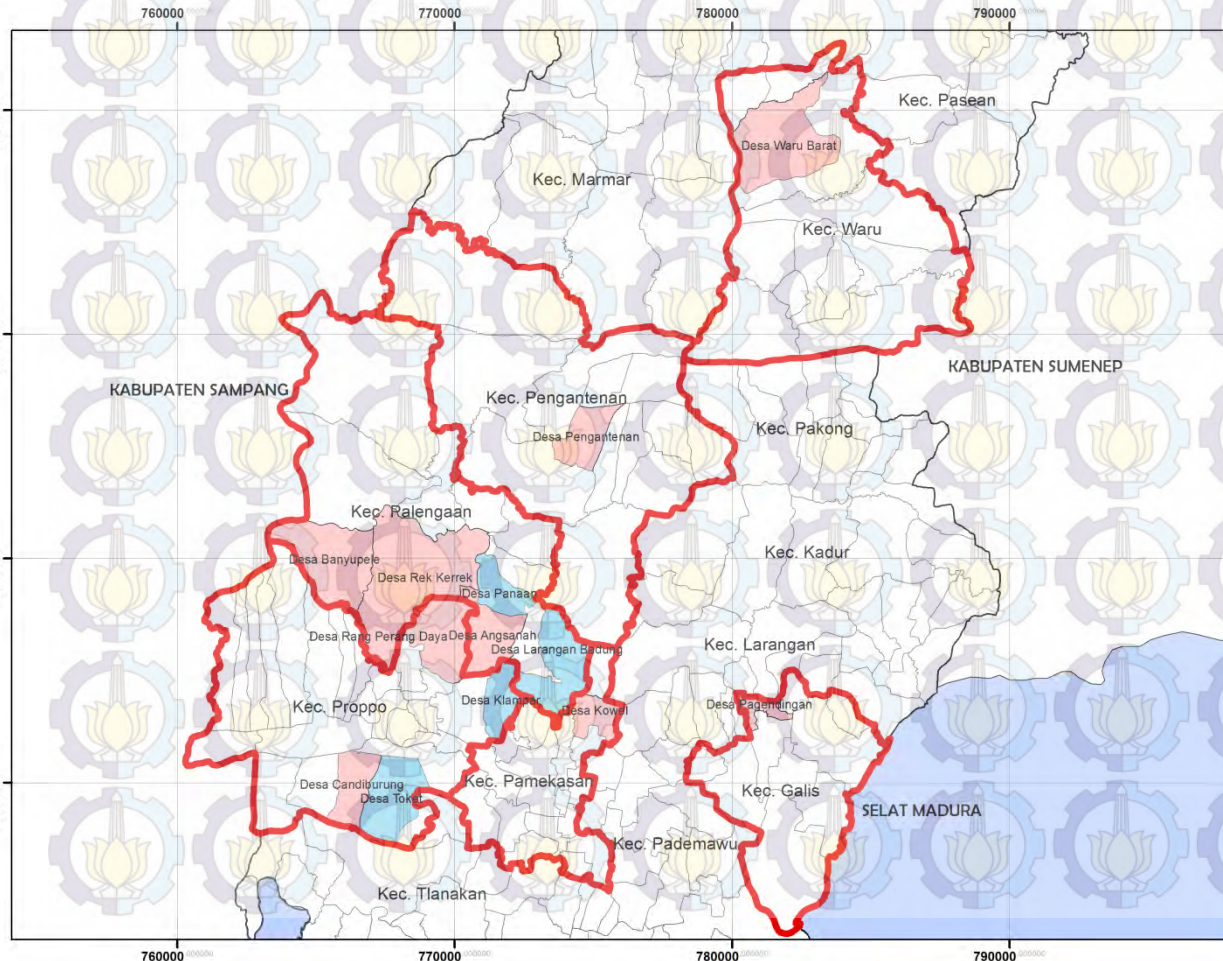
DIAGRAM LOKASI



LEGENDA PETA

- Batas Wilayah Penelitian
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Produktivitas Rendah
- Produktivitas Tinggi

SUMBER:
HASHANALISIS, 2015.



Halaman ini sengaja dikosongkan

4.2.2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik Pamekasan

Analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan. Faktor dihasilkan setelah pengrajin batik melakukan konfirmasi terhadap variabel penelitian melalui skala likert. Sebelum dilakukan proses analisis melalui kuesioner likert, instrument dalam kuesioner likert perlu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk melihat apakah instrumen atau pertanyaan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa instrument tersebut valid, sedangkan reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel *Reliability Statistics* dan dinyatakan valid apabila nilainya $> 0,80$.

Untuk menguji validitas dan reliabilitas menggunakan 30 responden. Nilai r_{tabel} untuk 30 sampel dengan taraf signifikansi 99% adalah 0,463. Dengan demikian, nilai r_{hitung} dari masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,463. Berikut hasil perhitungan uji validitas.

Tabel 4.17. Penentuan Validitas Hasil Kuesioner Likert

Variabel	Koefisien Korelasi	Keterangan
Jumlah Pengrajin	0,664	Valid
Pendidikan pengrajin	0,720	Valid
Jumlah Produksi	0,651	Valid
Teknologi Produksi	0,544	Valid
Nilai tambah	0,699	Valid
Inovasi Motif	0,496	Valid
Jalan	0,524	Valid
Listrik	0,477	Valid
Air Bersih	0,739	Valid
Jaringan Telekomunikasi	0,482	Valid
IPAL/pengolahan limbah	0,742	Valid
Kebijakan	0,624	Valid
Pelatihan	0,526	Valid
Kelompok Usaha	0,500	Valid
Kerjasama Pemasaran	0,581	Valid
Kerjasama Penyediaan Bahan Baku	0,476	Valid

Variabel	Koefisien Korelasi	Keterangan
Peran lembaga pemodalan	0,720	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrument yang diajukan kepada responden “valid” dengan taraf signifikansi 99% atau tingkat kesalahan 1%. Reliabilitas instrument dapat dilihat pada tabel *Reliability Statistics*, yaitu nilai *Cronbach’s Alpha*. Nilai *Cronbach’s Alpha* adalah 0,920. Karena nilai *Cronbach’s Alpha* lebih besar dari 0,8 maka jawaban responden reliabel atau konsisten.

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka dinyatakan bahwa instrument valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Dengan demikian, kuesioner likert dapat diajukan kepada responden dan skor yang dihasilkan diproses melalui *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dilakukan pada masing-masing faktor, yaitu sistem produksi, infrastruktur dan kelembagaan.

4.2.2.1. Faktor Sistem Produksi

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai probabilitas (sig) memiliki nilai 0,00 dan nilai *Measure of Sampling Adequacy (MSA)* adalah 0,639, maka variabel dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.18. Hasil Uji Validitas Faktor Sistem Produksi

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.639
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	87.321
	df	15
	Sig.	.000

Sumber: Analisis, 2015.

Untuk mengetahui variabel apa saja dalam sistem produksi yang berpengaruh terhadap pengembangan industri batik, dilihat dari nilai MSA setiap variabel. Variabel dengan nilai $MSA > 0,5$ dinyatakan sebagai variabel yang mempengaruhi

faktor sistem produksi dalam pengembangan industri batik. Hasil analisis tersebut sebagai berikut

Tabel 4.19. Hasil Konfirmasi Variabel dalam Sistem Produksi

Variabel	MSA
Jumlah Pengrajin	0,643
pendidikan pengrajin	0,665
Jumlah Produksi	0,593
Teknologi Produksi	0,338
Nilai tambah	0,643
Inovasi Motif	0,662

Sumber: Analisis, 2015.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) variabel yang memiliki nilai $MSA < 0,5$, yaitu sub variabel teknologi produksi dengan nilai $MSA = 0,338$. Dengan demikian, sub variabel teknologi produksi harus direduksi. Hasil analisis setelah dilakukan proses reduksi sebagai berikut.

Tabel 4.20. Hasil Uji Validitas Faktor Sistem Produksi Tahap 2

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.645
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	86.395
	df	10
	Sig.	.000

Sumber: Analisis, 2015.

Nilai $MSA > 0,5$, yaitu 0,645 dan nilai probabilitas (sig) adalah 0,000. Maka variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu dengan melihat nilai MSA setiap variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $MSA > 0,5$. Hasil tersebut mengartikan bahwa seluruh variabel jumlah pengrajin, pendidikan pengrajin, jumlah produksi, nilai tambah dan inovasi motif adalah variabel dalam faktor sistem produksi yang berpengaruh dalam pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan. Berikut nilai MSA masing-masing variabel.

Tabel 4.21. Hasil Akhir Konfirmasi Variabel dalam Sistem Produksi

Variabel	MSA
Jumlah Pengrajin	0,650
pendidikan pengrajin	0,666
Jumlah Produksi	0,604
Nilai tambah	0,643
Inovasi Motif	0,663

Sumber: Analisis, 2015

4.2.2.2. Faktor Infrastruktur

Melalui proses analisis yang sama dengan analisis pada faktor sistem produksi, dari tabel KMO and Bartlett's Test menunjukkan bahwa nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) adalah 0,657 dan nilai probabilitas (sig) adalah 0,000. Oleh karena nilai $MSA > 0,5$ dan nilai probabilitas (sig) $< 0,05$, maka variabel dalam faktor infrastruktur dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut tabel KMO and Bartlett's Test.

Tabel 4.22. Hasil Uji Validitas Faktor Infrastruktur

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.657
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	35.079
	df	10
	Sig.	.000

Sumber: Analisis, 2015

Faktor infrastruktur terdiri dari variabel jalan, listrik, air bersih, pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi. Setelah dilakukan analisis menggunakan CFA, Variabel-variabel tersebut memiliki nilai $MSA > 0,5$. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa faktor infrastruktur yang terdiri dari jalan, listrik, air bersih, pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi berpengaruh terhadap pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan. Berikut nilai MSA pada masing-masing variabel dalam faktor infrastruktur.

Tabel 4.23. Hasil Konfirmasi Variabel dalam Faktor Infrastruktur

Variabel	MSA
Jalan	0,638
Listrik	0,631
Air Bersih	0,688
Jaringan Telekomunikasi	0,701
IPAL/pengolahan limbah	0,677

Sumber: Analisis, 2015

4.2.2.3. Faktor Kelembagaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor kelembagaan menunjukkan variabel dalam faktor kelembagaan dapat dianalisis lebih lanjut. Dari tabel *KMO and Bartlett's Test* terbukti bahwa nilai MSA > 0,5, yaitu 0,575 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,000. Berikut tabel *KMO and Bartlett's Test* dari faktor kelembagaan.

Tabel. 2.24. Hasil Uji Validitas Faktor Kelembagaan

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.575
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	40.064
	df	15
	Sig.	.000

Sumber: Analisis, 2015

Untuk mengetahui variabel dari faktor kelembagaan yang berpengaruh terhadap pengembangan industri batik Pamekasan, dapat dilihat dari nilai MSA pada tabel *Anti Image Matrices*. Dari tabel tersebut diketahui bahwa variabel kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku, kemudahan memperoleh modal dan peran lembaga pemodal memiliki nilai MSA > 0,5. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam faktor kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap pengembangan

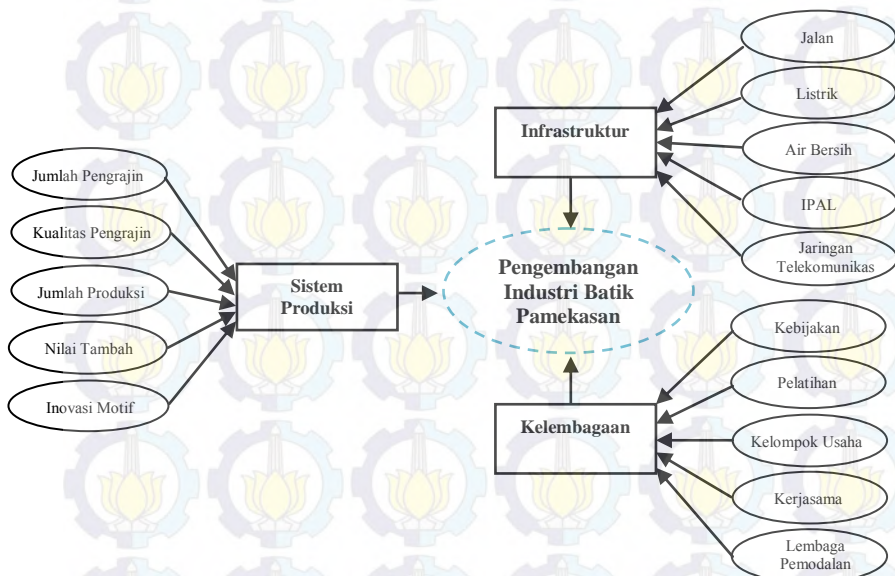
industri batik di Kabupaten Pamekasan. berikut nilai MSA masing-masing variabel pada faktor kelembagaan.

Tabel 4.25. Hasil Konfirmasi Variabel dalam Faktor Kelembagaan

Variabel	MSA
Kebijakan	0,608
Pelatihan	0,576
Kelompok Usaha	0,702
Kerjasama Pemasaran	0,520
Kerjasama Penyediaan Bahan Baku	0,536
Peran lembaga pemodalan	0,569

Sumber: Analisis, 2015.

Faktor yang mempengaruhi pengembangan industri batik Pamekasan terangkum dalam diagram berikut.



Gambar 4.7 Faktor Pengembangan Industri Batik Pamekasan

Sumber: Analisis, 2015.

4.2.3. Penentuan Tipologi Industri Batik Pamekasan

Tipologi industri batik dilakukan dengan mengkomparasikan antara hasil analisis kluster dengan produktivitas industri batik. Oleh karena itu, sebelum mentipologikan industri, perlu dilakukan analisis kluster. Dengan analisis kluster akan terbentuk pengelompokan desa-desa yang memiliki karakteristik yang cenderung sama. Variabel dalam analisis kluster ini adalah output sasaran 2, dengan input data adalah hasil skala likert setelah ditransformasi ke data interval. Berikut variabel dalam analisis kluster yang terbagi ke dalam 3 (tiga) faktor:

A. Faktor Sistem Produksi, terdiri dari 5 (lima) variabel, yaitu:

1. Jumlah pengrajin
2. Kualitas pengrajin
3. Jumlah produksi
4. Nilai tambah
5. Inovasi motif

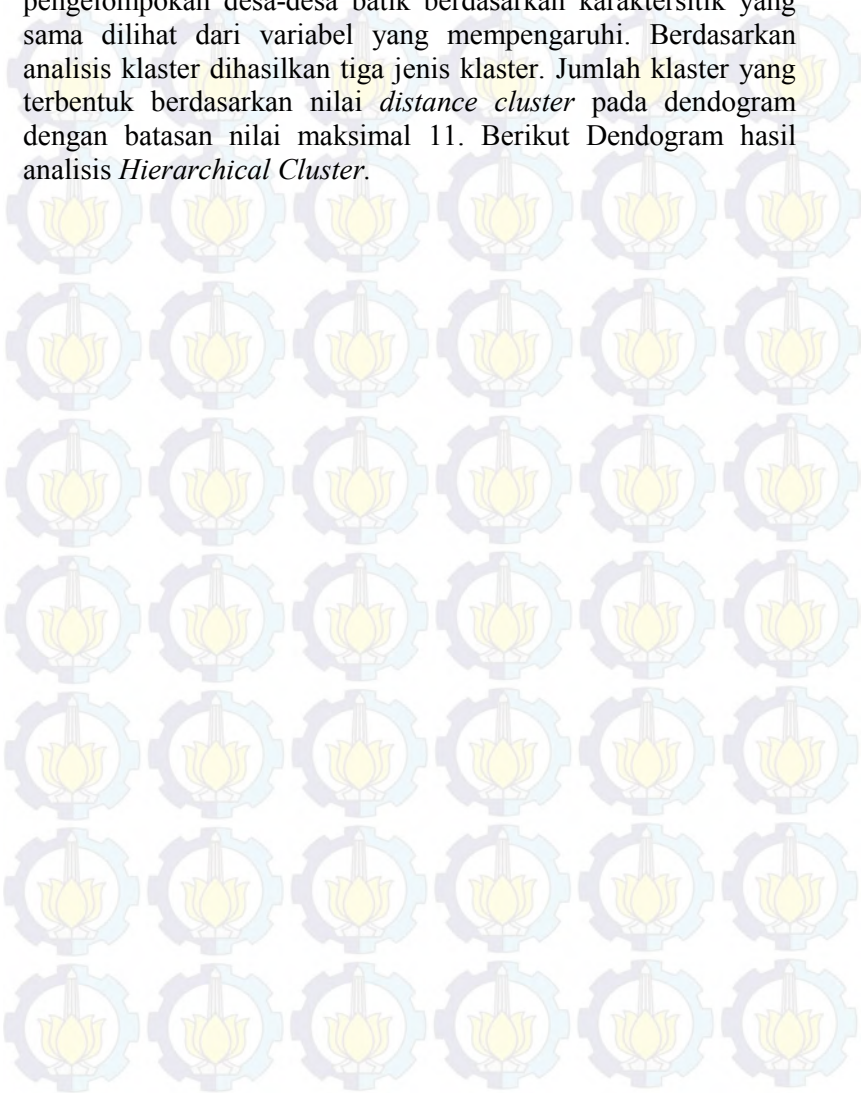
B. Faktor Infrastruktur, terdiri dari 5 (lima) variabel, yaitu:

1. Jalan
2. Listrik
3. Air bersih
4. Jaringan telekomunikasi
5. IPAL

C. Faktor Kelembagaan, terdiri dari 5 (lima) variabel, yaitu:

1. Kebijakan
2. Pelatihan
3. Kelompok usaha
4. Kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku
5. Lembaga pemodalan

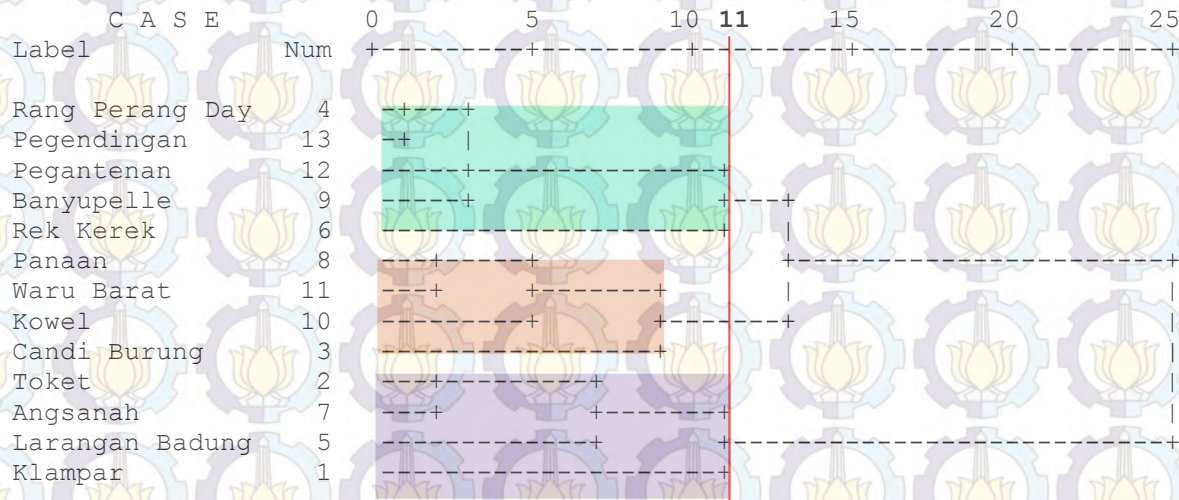
Hasil analisis menggunakan *Hierarchical Cluster* dapat dilihat pada gambar 4.8, yaitu dendrogram yang menunjukkan pengelompokan desa-desa batik berdasarkan karakteristik yang sama dilihat dari variabel yang mempengaruhi. Berdasarkan analisis kluster dihasilkan tiga jenis kluster. Jumlah kluster yang terbentuk berdasarkan nilai *distance cluster* pada dendrogram dengan batasan nilai maksimal 11. Berikut Dendrogram hasil analisis *Hierarchical Cluster*.



* * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Dendrogram using Ward Method

Rescaled Distance Cluster Combine



Gambar 4.8. Dendrogram Hasil Analisis Klaster

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Berdasarkan hasil analisis kluster diatas, tebentuk 3 (tiga) klaster, yaitu:

- a. **Klaster 1**, terdiri dari Desa Klampar, Toket, Larangan Badung dan Desa Angsanah
- b. **Klaster 2**, terdiri dari Desa Canburung, Panaan, kowel dan Waru Barat
- c. **Klaster 3**, terdiri dari Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Banyupelle, Pegantenan, dan Pagantenan.

Pembentukan klaster didasarkan pada kemiripan karakteristik sehingga desa-desa tersebut mengelompok menjadi beberapa klaster. Pada klaster hirarki ini, ciri klaster tidak dapat dideteksi secara otomatis sebagaimana *K-Means Cluster*, sehingga perlu dianalisis apa sajakah kesamaan desa-desa dalam satu klaster yang menyebabkan desa-desa tersebut mengelompok. Untuk melihat ciri klaster dalam penelitian ini melihat data hasil kuesioner likert yang menggambarkan kondisi eksisting dilapangan beserta gambaran umum yang telah diperoleh. Ciri-ciri masing-masing klaster industri batik tersebut sebagai berikut.

Tabel. 4.26. Klaster Industri Batik Pamekasan

Klaster	Anggota Klaster	Ciri-ciri Klaster
1	Klampar Toket Larangan Badung Angsanah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengrajin dan jumlah produksi tinggi - Tidak tersedia pengolahan limbah - Kurangnya dukungan kebijakan - Pelatihan yang pernah diterima tidak sesuai kebutuhan - kelompok usaha tidak berjalan secara efektif - tidak ada kerjasama dibidang pemasaran dan penyediaan bahan baku - kurangnya akses ke lembaga pemodal
2	Candi Burung Panaan Kowel Waru Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas tenaga kerja rendah dilihat dari tingkat pendidikan - Rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah dan inovasi motif. - Tidak tersedia pengolahan limbah - Kurangnya dukungan kebijakan

Klaster	Anggota Klaster	Ciri-ciri Klaster
		<ul style="list-style-type: none"> - Jarang mendapat pelatihan - Belum memiliki kelompok usaha - Tidak ada kerjasama dibidang pemasaran dan penyediaan bahan baku - kurangnya akses ke lembaga pemodalan
3	Rang Perang Daya Rek Kerek Banyupelle Pegantenan Pegendingan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas tenaga kerja rendah dilihat dari tingkat pendidikan - Rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah - Kreatifitas pengrajin dalam melakukan inovasi motif masih rendah - Kurangnya pelayanan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi serta tidak tersedia pengolahan limbah - Kurangnya dukungan kebijakan - Jarang mendapat pelatihan - Belum memiliki kelompok usaha - Tidak ada kerjasama dibidang pemasaran dan penyediaan bahan baku, - Kurangnya akses ke lembaga pemodalan

Sumber: Analisis, 2015.

1. **Klaster 1**

Pada klaster ini terdapat 4 desa, yaitu Desa Klampar, Toket, Larangan Badung dan Angsanah. Klaster ini memiliki kelemahan dalam pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dibidang pemasaran dan penyediaan bahan baku, serta peran lembaga keuangan.

Meskipun klaster ini menunjukkan kinerja yang paling baik diantara klaster lainnya, dalam hal kerjasama baik pemasaran maupun penyediaan bahan baku pada klaster ini masih belum ada. Padahal, apabila dilihat dari karakteritik desa, anggota dalam klaster ini tergolong potensial dibandingkan desa pada klaster lainnya, sehingga memiliki peluang yang cukup baik untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Peningkatan kemampuan pengrajin dalam mengolah limbah maupun inovasi motif pada dasarnya dapat dicapai dengan diberikannya pelatihan secara intensif kepada pengrajin.

Akan tetapi pada kenyataannya pemberian pelatihan sangat terbatas. Jarang dilakukan pelatihan dan pengrajin yang bisa mengikuti pelatihan hanya sebagian kecil. Peran pelatihan dalam pengembangan industri cukup besar, pelatihan juga berguna dalam kegiatan pasca produksi, yaitu pengolahan limbah. Tidak sedikit pengrajin yang mengaku tidak dapat mengolah limbah, sehingga limbah dari proses produksi batik tidak mengalami proses pengolahan terlebih dahulu langsung dibuang ke saluran drainase atau lahan kosong.

Permasalahan lainnya adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung industri untuk berkembang. Kebijakan pemerintah mengenai industri batik seperti penetapan *showroom* dan pasar kurang dirasakan manfaatnya oleh pengrajin pada klaster ini. Beberapa pengrajin mengatakan bahwa *showroom* hanya dapat diakses oleh pengusaha batik saja, sedangkan pengrajin hanya dapat memanfaatkan pasar batik yang ada.

Beberapa penghambat berkembangnya industri batik lainnya pada klaster ini adalah terkait pemodal. Pengrajin batik pada umumnya memakai modal pribadi yang jumlahnya cenderung sedikit. Modal menjadi kendala utama bagi pengrajin untuk mengembangkan usahanya. Lembaga pemodal yang berfungsi membantu pengrajin dalam memenuhi kebutuhan modal belum dimanfaatkan secara efektif oleh pengrajin. Padahal telah tersedia Koperasi Batik di Desa Larangan Badung dan Desa Klampar. Disamping karena kekhawatiran tidak dapat membayar cicilan, pengrajin mengaku tidak mengetahui bagaimana cara atau prosedur agar dapat terakses dengan Koperasi Batik.

Selain beberapa hal diatas, berkembangnya industri batik juga terhambat karena tidak adanya kelompok usaha. Kelompok usaha pada dasarnya berguna dalam penyelesaian permasalahan dalam kelompok, misalnya dalam menyediakan bahan baku secara komunal agar lebih efektif dan efisien. Kelompok usaha pada klaster ini belum terkoordinasi dan belum berfungsi secara optimal, salah satunya dapat dilihat dari kesulitan dalam penyediaan bahan baku maupun modal yang tidak dapat diselesaikan melalui kelompok usaha yang ada.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada klaster 1 adalah pada kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodalan serta pengolahan limbah. Permasalahan pengolahan limbah dimiliki oleh seluruh klaster. Oleh karena itu, permasalahan yang ditekankan pada klaster 1 meliputi kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodalan, dimana seluruh permasalahan tersebut termasuk dalam faktor kelembagaan.

2. Klaster 2

Klaster ini terdiri dari Desa Candi Burung, Panaan, Kowel, Waru Barat. Pengembangan industri batik pada klaster ini terhambat oleh beberapa hal, yaitu tingkat pendidikan pengrajin, nilai tambah, pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku, serta peran lembaga pemodalan.

Pendidikan pengrajin pada klaster 2 pada umumnya lulusan SD. Rendahnya kualitas tenaga kerja pada klaster ini berimplikasi terhadap kemampuan menghasilkan nilai tambah dan inovasi motif yang masih rendah.

Sebagaimana pada klaster 1, klaster 2 juga memiliki kelemahan belum tersedianya tempat pengolahan limbah secara khusus di tempat produksi batik. Beberapa kendalanya adalah ketidak tahuan masyarakat dalam mengelola limbah. Hal ini berkaitan dengan lemahnya pelatihan yang diberikan pada klaster 2. Pelatihan kepada pengrajin khususnya tata cara pengolahan limbah dibutuhkan agar keberadaan industri batik tidak berakibat buruk pada lingkungan sekitar.

Beberapa kebijakan pemerintah, misalnya dalam penyediaan pasar batik masih kurang mendukung klaster ini. Disamping karena lokasinya yang cukup jauh dengan lokasi pasar, seperti Desa Waru Barat, justru tidak memberikan dampak yang positif bagi industri batik di Desa Waru Barat terlebih lagi pada klaster ini tidak didukung oleh kerjasama pemasaran.

Penghambat dalam pengembangan industri batik lainnya pada klaster 2 ini adalah pemodalan dan penyediaan bahan baku.

Pengrajin pada umumnya menggunakan modal pribadi dalam mengembangkan usaha batiknya. Padahal modal yang dimiliki pengrajin cenderung sedikit. Hal itulah yang kemudian menyebabkan industri batik menjadi stagnan atau bahkan ada beberapa pengrajin yang berhenti memproduksi batik seperti di Desa Waru Barat yang mengalami penurunan jumlah pengrajin dalam jumlah yang cukup banyak. Lembaga keuangan kurang membantu pemodalannya pengrajin pada klaster ini. Pengrajin merasa lebih aman menggunakan modal pribadi dibandingkan dana pinjaman karena tidak perlu membayar cicilan.

Dalam penyediaan bahan baku, desa-desa pada klaster ini harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke pusat kota. Akan tetapi terdapat satu desa, yaitu Desa Kowel yang letaknya berada di kawasan perkotaan, sehingga dalam memperoleh bahan baku lebih mudah dibandingkan desa lainnya. Bahan baku batik juga disediakan secara perorangan oleh pengrajin, sehingga kurang efisien dibandingkan dengan penyediaan secara komunal.

Klaster 2 belum memiliki kelompok usaha. Sebagian besar pengrajin menjalankan usahanya sendiri-sendiri mulai dari kegiatan produksi, distribusi hingga pemasaran. Kondisi ini mengakibatkan adanya kecenderungan penguasaan industri oleh pengrajin yang memiliki modal besar.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada klaster 2 adalah pada kualitas tenaga kerja, rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah, inovasi motif, tidak tersedia pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodalannya. Sebagaimana disebutkan pada klaster 1 bahwa permasalahan pengolahan limbah dimiliki oleh seluruh klaster. Oleh karena itu, permasalahan yang ditekankan pada klaster 2 meliputi kualitas tenaga kerja dan nilai tambah serta inovasi motif yang tergolong dalam faktor sistem produksi. Disamping itu, permasalahan kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodalannya, dimana seluruh permasalahan tersebut termasuk dalam faktor kelembagaan. Dengan kata lain,

permasalahan pada klaster 2 terdapat pada faktor kelembagaan dan faktor sistem produksi.

3. Klaster 3

Klaster 3 adalah klaster yang paling tertinggal diantara 2 (dua) klaster lainnya. Klaster ini memiliki kelemahan dalam hal pendidikan pengrajin, nilai tambah, inovasi motif, infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pengolahan limbah, jaringan telekomunikasi, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku, pemodal dan peran lembaga pemodal. Klaster ini terdiri dari Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Banyupelle, Pagendingan dan Pegantenan.

Kualitas pengrajin pada klaster ini hampir sama dengan klaster 2, yaitu sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SD. Akibatnya pengrajin kurang mahir dalam pengolahan limbah dan dalam melakukan inovasi motif batik, sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih kecil dibanding dengan klaster lainnya. Penyebab ketertinggalan lainnya adalah motif batik jarang mengalami perkembangan, sehingga nilai jual pun sangat murah, yaitu rata-rata dibawah Rp. 100.000,00. Peran Pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk mengembangkan industri batik Pamekasan belum dirasakan manfaatnya di klaster 3. Desa yang pernah menerima pelatihan hanya Desa Rang Perang Daya.

Beberapa penghambat kegiatan industri dari segi infrastruktur adalah ketersediaan jalan yang masih dalam kondisi buruk. Jalan sebagai akses menuju lokasi pengrajin batik sebagian besar rusak dan tidak jarang ditemukan jalan makadam. Dampaknya adalah kesulitan pada kegiatan distribusi barang hasil produksi maupun bahan baku. Hal ini tidak hanya menghambat kegiatan distribusi, tetapi juga kegiatan produksi barang. Padahal, untuk mengembangkan industri batik, segala hal yang mendukung proses produksi dan distribusi harus ditingkatkan.

Permasalahan lainnya yang dialami klaster 3 adalah pelayanan listrik yang kurang baik. Listrik sering kali mati, padahal tidak jarang pengrajin membatik pada malam hari,

sehingga ketika listrik mati kegiatan membatik terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Masalah air bersih juga dialami klaster 3 dimana dalam kegiatan produksi pengrajin sering mengalami kekurangan air untuk proses mewarnai. Pada klaster ini air disediakan secara mandiri oleh pengrajin menggunakan sumur gali. Kekurangan air bersih terjadi pada musim kemarau, terlebih lagi pada klaster ini terdapat desa yang rawan bencana kekeringan, yaitu Desa Rang Perang Daya. Selain Desa Rang Perang Daya, pengrajin di Desa Rek Kerek dan Desa Banyupelle mengaku sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih pada saat musim kemarau. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air pengrajin harus mengambil air ke sungai apabila air di sungai masih mengalir.

Selain karena kurangnya pelayanan listrik dan air bersih, proses produksi juga dihambat oleh pemodal. Pengrajin masih mengandalkan modal pribadi yang jumlahnya seadanya dan tidak cukup banyak. Apabila kehabisan modal pengrajin akan berhenti sementara waktu dalam kegiatan membatik. Karena kurangnya modal, pengrajin tidak dapat membeli bahan baku. Lembaga pemodal kurang dimanfaatkan dengan baik pada klaster ini, padahal di Desa Banyupelle telah tersedia koperasi batik. Selain karena ketidakberanian memanfaatkan jasa lembaga pemodal, kerjasama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran juga belum dilakukan. Pengrajin secara mandiri menyediakan bahan baku untuk kegiatan produksi. Akibatnya, industri batik pada klaster ini sulit untuk berkembang. Kelompok usaha yang juga dapat berfungsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kelompok belum dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan ini karena pada klaster 3 belum terbentuk kelompok usaha.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada klaster 3 adalah pada kualitas tenaga kerja, rendahnya kemampuan menghasilkan nilai tambah, rendahnya inovasi motif, kurangnya pelayanan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, tidak tersedia pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan

peran lembaga pemodal. Sebagaimana disebutkan pada klaster sebelumnya bahwa permasalahan pengolahan limbah dimiliki oleh seluruh klaster. Oleh karena itu, permasalahan yang ditekankan pada klaster 3 meliputi kualitas tenaga kerja, inovasi motif dan nilai tambah yang tergolong dalam faktor sistem produksi. Disamping itu, permasalahan kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dan peran lembaga pemodal, dimana seluruh permasalahan tersebut termasuk dalam faktor kelembagaan. Permasalahan lainnya pada faktor infrastruktur, yang meliputi jalan air bersih, jaringan telekomunikasi dan listrik. Dengan kata lain, permasalahan pada klaster 3 terdapat pada faktor kelembagaan, faktor sistem produksi dan faktor infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisis klaster diatas, maka desa-desa batik dapat ditipologikan. Berikut dihasilkan 5 (lima) tipologi industri batik dilihat dari produktivitas dan klaster yang terbentuk.

Tabel 4.27. Tipologi Industri Batik Pamekasan

Produktivitas Klaster	Produktivitas Tinggi	Produktivitas Rendah
Klaster 1 Kelemahan pada faktor kelembagaan	Desa Klampar Desa Toket Desa Larangan Badung T1	Desa Angsanah T3
Klaster 2 Kelemahan pada faktor kelembagaan dan sistem produksi	Desa Panaan T2	Desa Candi Burung Desa Kowel Desa Waru Barat T4
Klaster 3 Kelemahan pada faktor kelembagaan, sistem produksi dan infrastruktur		Desa Rang Perang Daya Desa Rek Kerek Desa Banyupelle Desa Pagendingan Desa Pegantenan T5

Sumber: Analisis, 2015.

Berdasarkan tipologi diatas, Kdiketahui bahwa tipologi 1 (Satu) terdiri dari desa dengan produktivitas pengrajin batik tinggi. Begitu halnya dengan tipologi 2 (dua), yang merupakan

desa dengan produktivitas tinggi. Tipologi 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu tipologi dengan produktivitas pengrajin rendah. Dengan demikian dapat dibentuk tipologi industri batik, yaitu:

A. Tipologi 1

Tipologi 1 merupakan pengelompokan desa yang cenderung lebih unggul dari desa pada tipologi lain, khususnya karena jumlah pengrajin dan jumlah produksi yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan desa-desa pada tipologi 1 sebagian besar memiliki produktivitas tinggi. Adapun pengelompokan desa dalam tipologi ini disebabkan karena adanya kesamaan faktor yang mempengaruhi perkembangan industri, yaitu faktor kelembagaan. Desa yang tergolong dalam tipologi 1 adalah Desa Klmpar, Toket dan Larangan Badung.

B. Tipologi 2,

Desa pada tipologi 2 adalah desa yang memiliki produktivitas tinggi, yang dikarenakan jumlah produksi maupun jumlah pengrajin sama-sama sedikit, sehingga perbandingan antara kedua variabel tersebut menghasilkan angka yang tinggi. Anggota klaster 2 adalah Desa Panaan, dimana perkembangan industri batik pada desa ini dipengaruhi oleh faktor faktor kelembagaan dan sistem produksi.

C. Tipologi 3,

Tipologi 3 merupakan desa dengan produktivitas pengrajin rendah dan perkembangannya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Desa pada klaster ini adalah Desa Angsanah.

D. Tipologi 4,

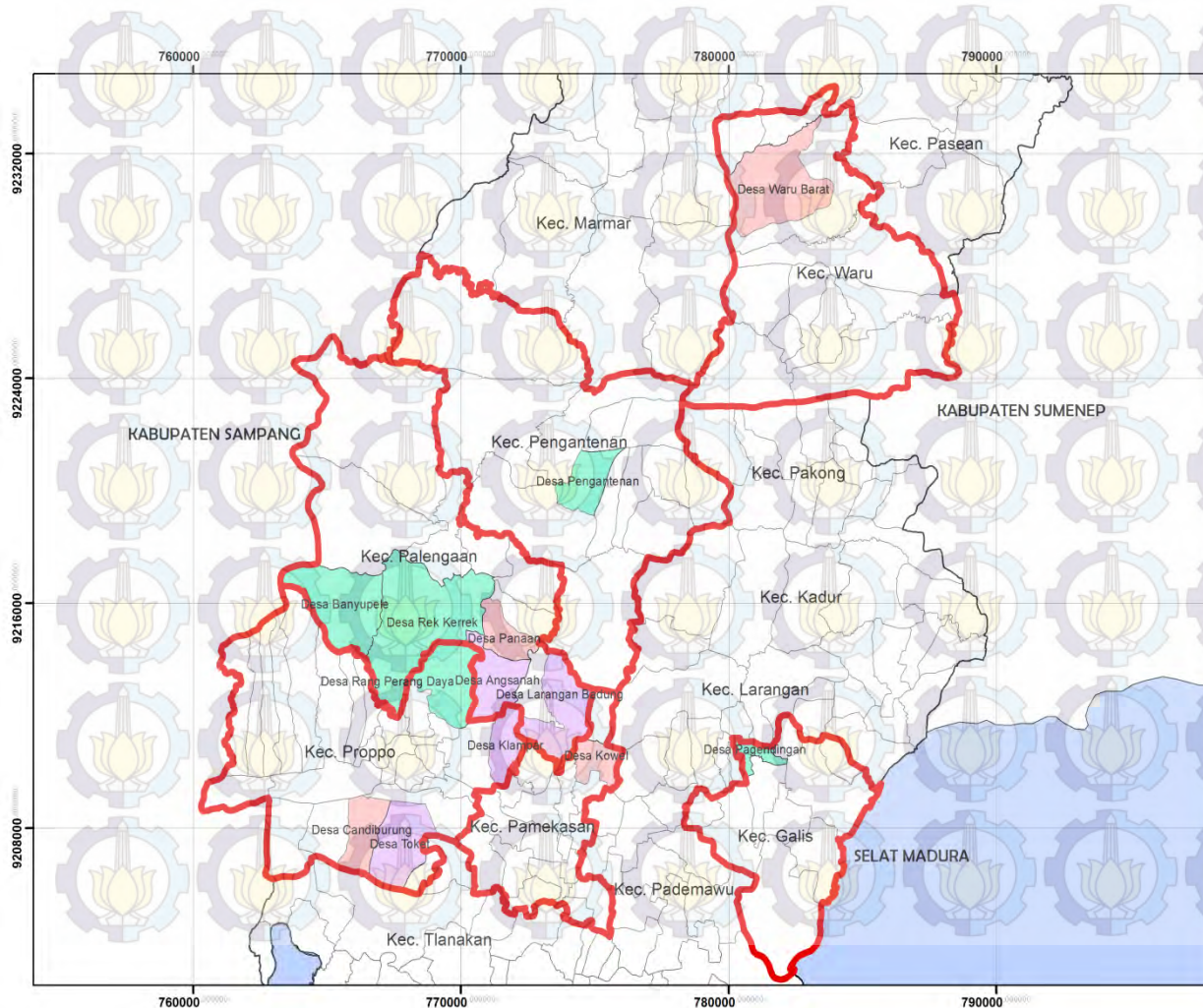
Desa-desa pada tipologi 4 sebagian besar memiliki produktivitas rendah dan karakteristik desa sesuai dengan karakteristik klaster 2. Pengelompokan desa dalam tipologi ini karena adanya kesamaan faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik yang meliputi faktor kelembagaan dan faktor sistem produksi. Desa yang

tergolong dalam tipologi 4 adalah Desa Candi Burung, Kowel dan Waru Barat.

E. Tipologi 5

Desa-desanya yang termasuk dalam tipologi 5 adalah desa yang paling tertinggal diantara desa batik lainnya. Seluruh desa pada tipologi 5 memiliki produktivitas rendah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan industri pada tipologi ini juga lebih banyak dibandingkan tipologi lain, meliputi faktor kelembagaan, faktor sistem produksi dan faktor infrastruktur.

Tipologi ini nantinya akan menjadi input dalam penyusunan arahan. Hasil analisis klaster secara spatial terdapat pada **peta 4.4** berikut ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

4.2.4. Arahan Pengembangan Industri Batik

Untuk menentukan arahan pengembangan industri, dilakukan melalui analisis delphi kepada beberapa instansi pemerintah dan akademisi. Sebelum melakukan analisis delphi dilakukan beberapa tahapan untuk menghasilkan indikasi arahan sebagai input dalam kuesioner delphi. Tahapan penyusunan draft ini dimulai dari penentuan potensi dan permasalahan. Alur dalam penyusunan Arahan Pengembangan Industri Batik Pamekasan, sebagai berikut.



Gambar 4.9. Bagan Alur Penyusunan Arahan Pengembangan Industri Batik Pamekasan

Sumber: Analisis, 2015.

Untuk mempermudah dalam penyusunan arahan, maka disusun potensi dan permasalahan pada masing-masing tipologi. Adapun potensi dan permasalahan diperoleh dari hasil kuesioner likert yang diajukan kepada pengrajin. Berikut potensi dan permasalahan pada setiap tipologi.



Tabel 4.28.Potensi dan Permasalahan

Tipologi	Potensi	Permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan pusat tenaga kerja industri batik, karena memiliki jumlah pengrajin dan jumlah jauh lebih banyak dari desa pada klaster lainnya. - Jumlah pengrajin yang diimbangi dengan jumlah produksi tinggi, sehingga tipologi ini memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi. - Kreativitas pengrajin tinggi, sehingga inovasi motif batik terus mengalami perkembangan - Telah didukung oleh infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi) yang tersedia dengan baik dan telah mencukupi kebutuhan saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan yang pernah diberikan kepada pengrajin tidak sesuai dengan kebutuhan, salah pelatihan yang dibutuhkan adalah manajemen keuangan, namun yang diberikan adalah pelatihan motif batik. - Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal, dibuktikan dengan permasalahan dalam industri batik yang seringkali ditanggung oleh masing-masing anggota tanpa adanya penyelesaian dalam kelompok. - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pengrajin batik tergolong produktif meskipun dengan jumlah pengrajin yang tidak banyak - Telah didukung oleh infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi) yang tersedia dengan baik dan telah mencukupi kebutuhan saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia tempat pengolahan limbah hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pengrajin dalam mengolah limbah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin. - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan keahlian pengrajin rendah khususnya dalam inovasi motif. - Motif batik tidak mengalami perkembangan, dari tahun ketahun motif masih terpaku pada ciri khas motif batik Madura konvensional - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Kreativitas pengrajin tinggi, sehingga inovasi motif batik terus mengalami perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan.

Tipologi	Potensi	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Telah didukung oleh infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi) yang tersedia dengan baik dan telah mencukupi kebutuhan saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 3. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan pengrajin dalam menghasilkan nilai tambah. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Telah didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi dan air bersih yang memadai untuk kegiatan produksi batik - Meskipun jumlah produksi batik sedikit, namun jumlah tersebut telah memnuhi permintaan pasar lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, pengrajin masih mengandalkan modal pribadi, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan keahlian pengrajin rendah khususnya dalam melakukan inovasi motif - Rendahnya kemampuan dalam mengelola industri sehingga kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah cukup rendah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Telah didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai - Meskipun jumlah produksi batik sedikit, namun jumlah tersebut telah memnuhi permintaan pasar lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan pengrajin tergolong rendah, yaitu sebagian besar lulusan SD atau belum lulus SD yang berakibat pada kemampuan pengrajin dalam mengelola industri baik melakukan inovasi batik maupun menghasilkan nilai tambah. - Motif batik tidak mengalami perkembangan dari tahun ke tahun

Tipologi	Potensi	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengrajin belum bisa mengelola keuangan dengan baik ditunjukkan dari nilai tambah yang diperoleh oleh pengrajin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini, padahal melihat kapasitas pengrajin yang rendah, pelatihan sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan inovasi motif dan menghasilkan nilai tambah. - Belum tersedia lembaga pemodal yang dapat membantu permasalahan modal pengrajin industri batik. - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 5. - Kurangnya pelayanan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih), sehingga menghambaberkembangnya industri. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.

Sumber: Survey Primers, 2015

Berdasarkan potensi dan masalah diatas, maka dapat disusun indikasi arahan pada tabel berikut.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tabel 4.29. Proses Penyusunan Indikasi Arah Pengembangan Industri Batik Pamekasan

Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arah
1	<p>Pelatihan yang pernah diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan pengrajin. Pelatihan yang diberikan biasanya adalah sesuatu yang telah pengrajin ketahui sebelumnya, sehingga tidak memberikan tambahan pengetahuan kepada pengrajin.</p> <p>Nilai tambah yang dihasilkan pengrajin sangat minim karena pengrajin seringkali terpaksa menjual batik dengan harga sesuai biaya produksi. Hal ini dilakukan agar batik yang telah dibawa ke pasar tidak lagi dibawa pulang sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi lagi.</p>	<p>Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i>, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri subsidiary - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api. 	<p>Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan skill, sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan.</p> <p>Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membuat yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM.</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi pada tipologi ini adalah keahlian dalam menghasilkan nilai tambah yang masih rendah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan. Sebelumnya sudah pernah dilakukan pelatihan, namun materi pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan pengrajin, seperti pelatihan motif, padahal pengrajin telah mampu melakukan inovasi motif secara mandiri. Dengan demikian dibutuhkan pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengrajin, diantaranya pelatihan manajemen keuangan.</p>	<p>Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah</p>
	<p>Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal. Dilihat dari lemahnya interaksi khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pengrajin dalam hal penyediaan bahan baku dan pemodalannya yang masih menjadi kendala pengrajin untuk mengembangkan batik</p>	<p>Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa <i>external economic</i> saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan <i>joint action</i>. Dalam <i>joint action</i> ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama. Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horizontal (diantara competitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)</p>	<p>Dalam Industri Batik di Surakarta, Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang tegas berguna menunjang kelancaran industri.</p>	<p>Pada tipologi ini telah ada kelompok usaha. Akan tetapi kelompok usaha tidak berfungsi secara optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengrajin yang kesulitan dalam menjual produknya dan dalam penyediaan bahan baku. Dengan adanya kelompok usaha yang difungsikan secara optimal dapat memperluas pangsa pasar dan penyediaan bahan baku secara komunal dalam suatu kelompok usaha akan lebih mudah dilakukan</p>	<p>Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.</p>

Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arah
	Lembaga pemodalan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengrajin. Hal ini dikarenakan pengrajin tidak mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur untuk mengakses lembaga pemodalan. Akibatnya pengrajin seringkali mengalami kekurangan modal, sehingga menghambat proses produksi.	Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang sistem kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi , dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan. Kelembagaan dalam PEL tergambar dalam kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat. Dalam kemitraan, peran serta pemerintah salah satunya dalam membentuk kebijakan pembangunan.	Hwienawati dkk (1989-1990) dalam Industri Batik di Surakarta menyatakan bahwa masalah pemodalan erat kaitannya dengan masalah perbelanjaan bahan baku, produksi, penjualan, kepegawaian dan lainnya . Industri batik Surakarta untuk mengatasi masalah pemodalan umumnya melibatkan pihak lembaga modal , yang berasal dari pinjaman dari kredit bank asing dan bank swasta nasional serta bank pemerintah.	Pada tipologi ini desa yang telah tersedia lembaga pemodalan hanya Desa Klampar. Namun, lembaga pemodalan yang ada di Desa Klampar tidak dimanfaatkan oleh sebagian besar pengrajin karena pengrajin merasa terbebani dengan cicilan yang harus dibayar sedangkan pendapatan dari membuat tidak menentu. Selain itu, pengrajin juga belum mengetahui tata cara dan prosedur untuk memanfaatkan jasa lembaga pemodalan. Dengan demikian, informasi mengenai lembaga pemodalan secara lengkap sangat dibutuhkan oleh pengrajin.	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodalan dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.
2	Pengrajin jarang mendapat pelatihan dari pemerintah bahkan ada yang belum mendapat sama sekali. Disamping itu, pelatihan yang pernah diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan pengrajin. Motif batik tidak mengalami perkembangan dari tahun ketahun	Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i> , yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005): - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri subsidiary - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api.	Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan skill , sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan. Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membuat yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM.	Permasalahan yang dihadapi pada tipologi ini adalah lemahnya pengetahuan pengrajin dalam hal inovasi motif. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan kepada pengrajin. Selama ini, tipologi 2 jarang menerima pelatihan, pelatihan hanya pernah dilakukan satu kali selama 3 tahun terakhir bahkan banyak yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Padahal salah satu cara untuk mengembangkan kapabilitas pengrajin adalah dengan cara memberikan pelatihan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah pemberian pelatihan secara berkala dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan pengrajin.	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.
	Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal . Dilihat dari lemahnya interaksi khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pengrajin dalam hal penyediaan bahan baku dan pemodalan yang masih menjadi kendala pengrajin untuk mengembangkan batik.	Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang sistem kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan	Hwienawati dkk (1989-1990) dalam Industri Batik di Surakarta menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar.	Tipologi ini belum memiliki kelompok usaha yang menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan dalam industri batik. Bentuk interaksi antar pengrajin hanya sebatas penjualan hasil produksi. Ada pengrajin yang menitipkan hasil produksinya kepada pengrajin lain untuk dijual ke pasar.	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.

Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arahan
		<p>seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi, dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan.</p> <p>Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa <i>external economic</i> saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan <i>joint action</i>. Dalam <i>joint action</i> ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama. Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horizontal (diantara competitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)</p>	<p>Disamping itu, batas pekerjaan yang tegas berguna menunjang kelancaran industri.</p> <p>Hwienawati dkk (1989-1990) dalam Industri Batik di Surakarta menyatakan bahwa masalah pemodalan erat kaitannya dengan masalah perbelanjaan bahan baku, produksi, penjualan, kepegawaian dan lainnya. Industri batik Surakarta untuk mengatasi masalah pemodalan umumnya melibatkan pihak lembaga modal, yang berasal dari pinjaman dari kredit bank asing dan bank swasta nasional serta bank pemerintah.</p>	<p>Namun, belum ada bentuk interaksi lainnya dalam tipologi ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kelompok usaha untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan modal.</p> <p>Lembaga pemodalan pada tipologi ini belum tersedia. Apabila melihat permasalahan pengrajin dalam memperoleh modal usaha, peran lembaga pemodalan sangat dibutuhkan untuk membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha. Oleh karena itu, lembaga pemodalan seperti koperasi dan BPR perlu disediakan setidaknya satu dalam satu desa.</p>	
3	<p>Belum tersedia lembaga pemodalan yang dapat membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha. Akibatnya pengrajin seringkali menghentikan proses produksi untuk sementara waktu karena kurangnya modal.</p>	<p>Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang system kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi, dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan.</p> <p>Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa <i>external economic</i> saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan <i>joint action</i>. Dalam <i>joint action</i> ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama. Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horizontal (diantara competitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)</p>		<p>Lembaga pemodalan pada tipologi ini belum tersedia. Apabila melihat permasalahan pengrajin dalam memperoleh modal usaha, peran lembaga pemodalan sangat dibutuhkan untuk membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha. Oleh karena itu, lembaga pemodalan seperti koperasi dan BPR perlu disediakan setidaknya satu dalam satu desa.</p>	<p>Pengadaan lembaga pemodalan dengan akses yang mudah</p>
	<p>Belum ada kelompok usaha antar pengrajin batik Pamekasan. Pengrajin melakukan kegiatan industri mulai dari produksi secara perorangan tanpa terkoordinasi dalam suatu kelompok usaha.</p>		<p>Dalam Industri Batik di Surakarta, Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang tegas berguna menunjang kelancaran industri.</p>	<p>Tipologi ini belum memiliki kelompok usaha yang menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan dalam industri batik. Bentuk interaksi antar pengrajin hanya sebatas penjualan hasil produksi. Ada pengrajin yang menitipkan hasil produksinya kepada pengrajin lain untuk dijual ke pasar. Namun, belum ada bentuk interaksi lainnya dalam tipologi ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kelompok usaha untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan modal.</p>	<p>Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.</p>

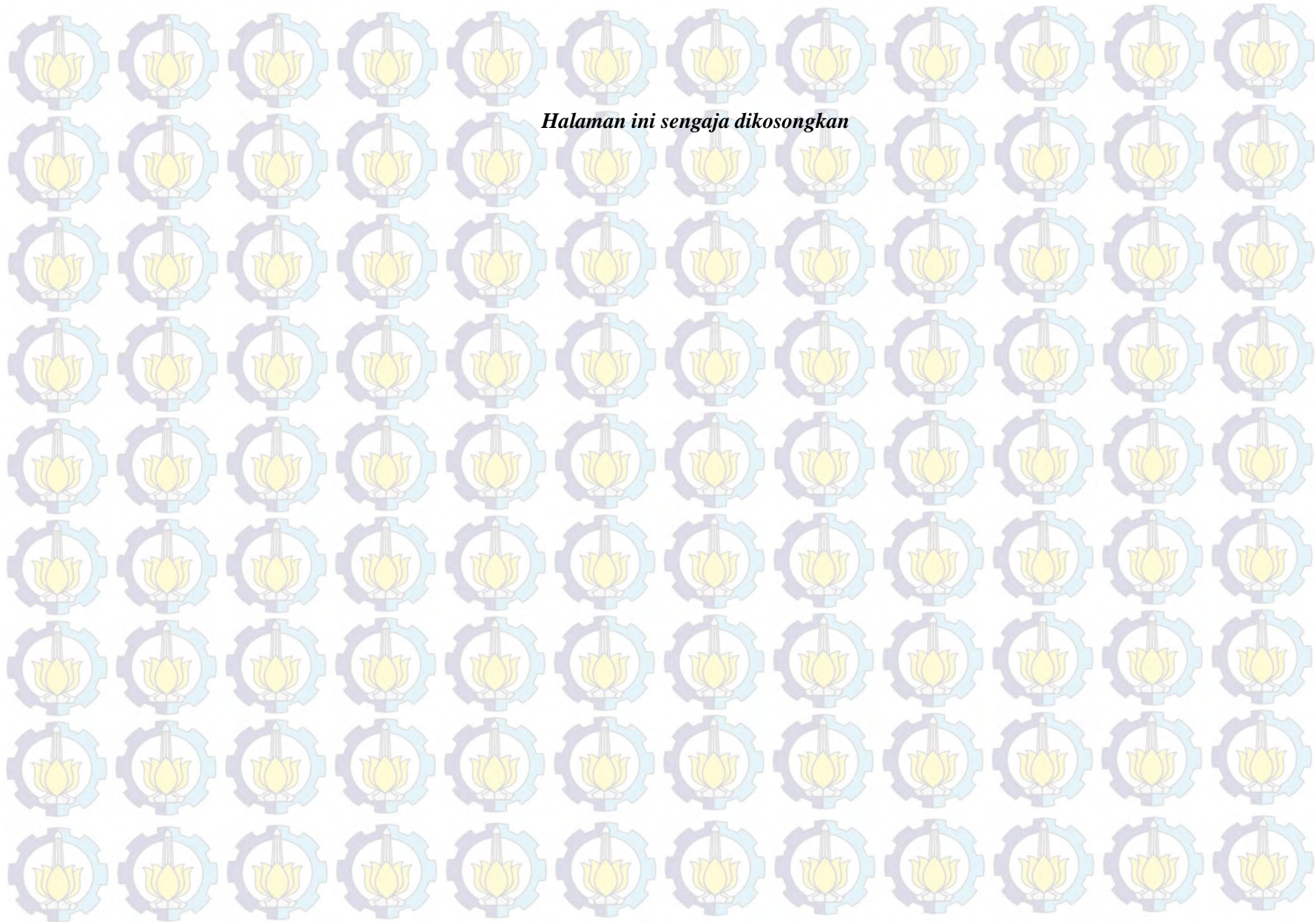
Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arah
	<p>Pengrajin jarang mendapat pelatihan dari pemerintah bahkan ada yang belum mendapat sama sekali. Disamping itu, pelatihan yang pernah diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan pengrajin. Salah satunya pelatihan inovasi motif, yang sebenarnya sudah dikuasai oleh pengrajin, sedangkan pelatihan pengolahan limbah yang benar-benar dibutuhkan belum pernah diberikan.</p> <p>Kemampuan pengrajin dalam menghasilkan nilai tambah sangat rendah. Nilai tambah yang dihasilkan pengrajin sangat minim karena pengrajin seringkali terpaksa menjual batik dengan harga sesuai biaya produksi. Hal ini dilakukan agar batik yang telah dibawa ke pasar tidak lagi dibawa pulang sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi lagi.</p>	<p>Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i>, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri subsidiary - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api. 	<p>Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan <i>skill</i>, sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan. Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membuat yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM.</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi pada tipologi ini adalah lemahnya pengetahuan pengrajin dalam hal mengolah limbah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan kepada pengrajin. Selama ini, tipologi 3 jarang menerima pelatihan dan materi pelatihan yang diberikan seringkali tidak tepat. Pelatihan yang pernah diberikan pada umumnya adalah sesuatu yang telah pengrajin kuasai, misalnya inovasi motif. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah pemberian pelatihan secara berkala dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan pengrajin.</p>	<p>Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.</p>
4	<p>Belum tersedia lembaga pemodalan yang dapat membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha. Akibatnya pengrajin seringkali menghentikan proses produksi untuk sementara waktu karena kurangnya modal.</p>	<p>Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang sistem kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi, dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan.</p> <p>Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa <i>external economic</i> saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan <i>joint action</i>. Dalam <i>joint action</i> ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama. Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama</p>	<p>Hwienawati dkk (1989-1990) dalam Industri Batik di Surakarta menyatakan bahwa masalah pemodalan erat kaitannya dengan masalah perbelanjaan bahan baku, produksi, penjualan, kepegawaian dan lainnya. Industri batik Surakarta untuk mengatasi masalah pemodalannya umumnya melibatkan pihak lembaga modal, yang berasal dari pinjaman dari kredit bank asing dan bank swasta nasional serta bank pemerintah.</p> <p>Dalam Industri Batik di Surakarta, Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang</p>	<p>Lembaga pemodal pada tipologi ini belum tersedia. Permasalahan pengrajin yang seringkali kesulitan dalam memperoleh modal usaha tentunya membutuhkan peran lembaga pemodal untuk membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha. Oleh karena itu, lembaga pemodal seperti koperasi dan BPR perlu disediakan setidaknya satu dalam satu desa.</p>	<p>Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.</p>
	<p>Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal. Dilihat dari lemahnya interaksi khususnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pengrajin dalam hal penyediaan bahan baku dan pemodal yang masih menjadi kendala pengrajin untuk mengembangkan batik.</p>		<p>Dalam Industri Batik di Surakarta, Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang</p>	<p>Pada tipologi ini telah ada kelompok usaha. Akan tetapi kelompok usaha tidak berfungsi secara optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengrajin yang kesulitan dalam menjual produknya dan dalam penyediaan bahan baku. Dengan adanya kelompok usaha yang difungsikan secara optimal dapat memperluas pangsa pasar dan</p>	<p>Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.</p>

Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arahan
		horizontal (diantara competitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)	tegas berguna menunjang kelancaran industri.	penyediaan bahan baku secara komunal dalam suatu kelompok usaha akan lebih mudah dilakukan	
	Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan keahlian pengrajin rendah baik dalam inovasi motif maupun kemampuan mengolah limbah industri.	<p>Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i>, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri subsidiary - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api. 	<p>Mulyadi (2012) dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan <i>skill</i>, sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan. Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membatik yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM.</p>	<p>Permasalahan tidak adanya tempat pengolahan limbah pada tipologi ini salah satunya disebabkan karena pengrajin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengolah limbah. Disamping itu, inovasi motif batik yang tidak mengalami perkembangan dikarenakan rendahnya kreativitas pengrajin. Untuk meningkatkan kapabilitas pengrajin maka dibutuhkan pelatihan secara berkala kepada pengrajin mengenai cara mengolah limbah dan inovasi motif.</p>	<p>Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.</p>
5	<p>Tingkat pendidikan pengrajin tergolong rendah, yaitu sebagian besar lulusan SD atau belum lulus SD yang berakibat pada kemampuan pengrajin dalam mengelola industri baik melakukan inovasi batik, menghasilkan nilai tambah dan mengolah limbah.</p> <p>Pengrajin belum bisa mengelola keuangan dengan baik ditunjukkan dari nilai tambah yang diperoleh oleh pengrajin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.</p> <p>Motif batik tidak mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan</p>	<p>Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i>, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri subsidiary - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api. <p><i>Piore dan Sabel (1984)</i> dalam Rustiana (2005) mendefinisikan <i>Flexible specialization</i></p>	<p>Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa dalam produksi batik Jambi hampir 90% kegiatan dilakukan dengan menggunakan <i>skill</i>, sehingga kompetensi dan keahlian pengrajin sangat dibutuhkan. Peningkatan kompetensi dan keahlian pengrajin batik di Jambi tersebut diupayakan melalui peningkatan pelatihan angkatan kerja yang tersistem dan terencana. Pelatihan membatik yang rutin dalam hal pengembangan pengrajin batik, modifikasi motif, model dan inovasi batik akan mampu mengembangkan SDM.</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi pada tipologi ini adalah tingkat pendidikan pengrajin yang tergolong rendah. Kondisi yang demikian mengakibatkan lemahnya pengetahuan pengrajin dalam hal penggunaan teknologi, mengolah limbah, manajemen keuangan dan dalam melakukan inovasi motif batik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pelatihan kepada pengrajin. Selama ini, tipologi ini jarang menerima pelatihan, pelatihan hanya pernah dilakukan satu kali selama 3 tahun terakhir bahkan banyak yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Padahal salah satu cara untuk mengembangkan kapabilitas pengrajin adalah dengan cara memberikan pelatihan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah pemberian pelatihan secara berkala dengan materi yang</p>	<p>Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.</p>

Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arahan
	<p>kurangnya kreativitas dan kemampuan pengrajin untuk melakukan inovasi motif batik.</p> <p>Pengrajin jarang mendapat pelatihan dari pemerintah bahkan sebagian besar belum pernah mendapat pelatihan.</p>	<p>system sebagai suatu konsekuensi yang timbul karena konsumen menginginkan produk yang special yang tidak dapat dipenuhi sistem produksi massal. <i>Flexible specialization</i> system yang kuncinya adalah pada kelompok tenaga kerja <i>middle</i> yang terampil yang memungkinkan terjadi mobilitas sosial diantara kelas pekerja (Capechi, 1990). <i>Flexible specialization</i> merujuk pada beberapa hal tiga diantaranya, adalah (Van Dijk dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya mental inovatif pada entrepreneur - Teknologi yang digunakan oleh manusia didapatkan dari <i>on the job training</i> - Terjadi spesialisasi yang membuktikan adanya fleksibilitas. 		sesuai dengan kebutuhan pengrajin	
	<p>Belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan industri, seperti jalan, listrik dan air bersih. Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi rusak dan masih banyak yang belum diaspal. Sebagian besar telah terlayani listrik. Akan tetapi, listrik seringkali mati, sehingga menghambat kegiatan membatik di malam hari. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih menggunakan sumur warga dan sering mengalami kekeringan disaat musim kemarau.</p>	<p>Alfred Marshal (1980) menyatakan usaha kecil dapat menjadi kompetitif melalui konsep <i>external economic</i>, yaitu penghematan yang timbul dari kenaikan skala produksi yang tergantung pada pembangunan industri umum. Yang termasuk dalam <i>external economic</i> adalah (Dijk dan Robelotti dalam Rustina, 2005):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan tentang pasar dan teknologi yang mendampingi eksplorasi output industri - Kreasi pasar bagi tenaga kerja terampil, jasa pelayanan khusus dan bagi industri <i>subsidiary</i> - Kemungkinan untuk membagi proses produksi ke dalam tahap-tahap yang khusus - Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan kereta api. <p>Jusuf Irianto (1996: 55) menegaskan bahwa faktor yang terpenting yang mempengaruhi produksi bukanlah sumber daya alam saja, tetapi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan didukung infrastruktur yang memadai.</p>	<p>Mulyadi (2012) dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi menyatakan bahwa penambahan dan perbaikan infrastruktur prasarana yang berkaitan dengan kelancaran produksi dan pemasaran menjadi tombak kekuatan dalam daya saing batik Jambi. Diantaranya penambahan fasilitas produksi seperti kebutuhan air bersih, memperbaiki kelancaran transportasi dan memperbaiki sistem telekomunikasi.</p>	<p>Dalam melaksanakan kegiatan industri, tentunya membutuhkan infrastruktur pendukung industri, diantaranya adalah jaringan jalan untuk kegiatan distribusi, serta listrik dan air bersih untuk kegiatan produksi. Akan tetapi, pelayanan infrastruktur pendukung industri batik belum cukup memadai. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan pelayanan infrastruktur. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga penyediaan infrastruktur pendukung industri batik perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.</p>

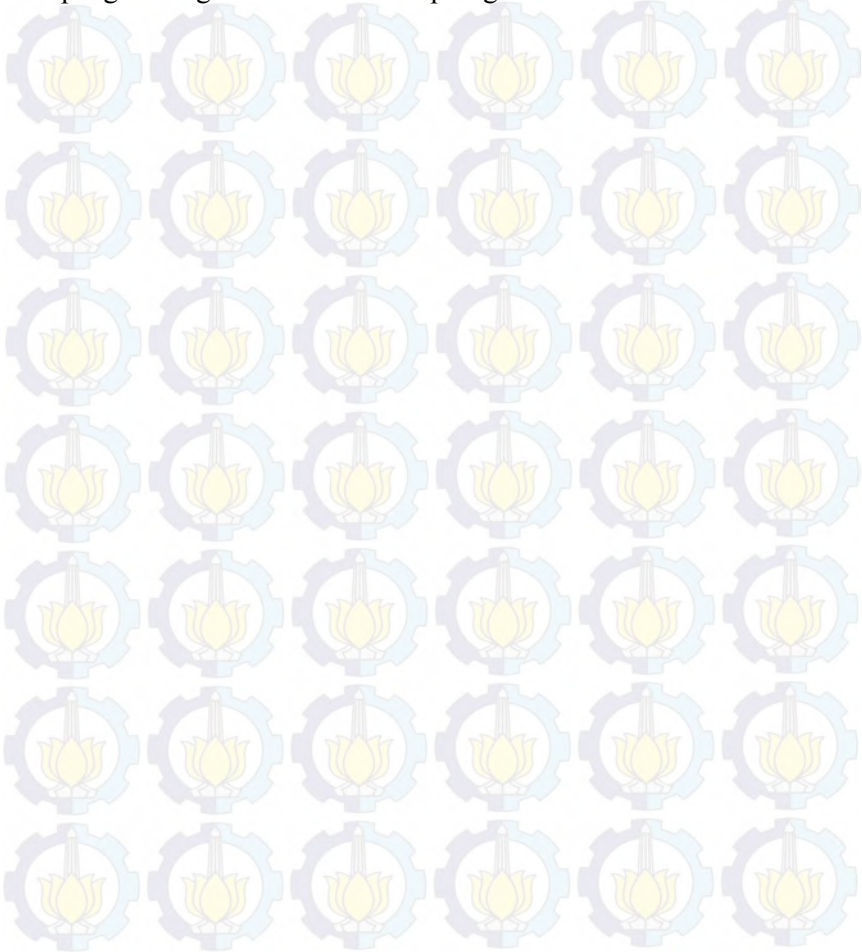
Tipologi	Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Indikasi Arah
	Sebagian besar desa belum tersedia lembaga pemodalan yang dapat membantu pengrajin dalam menyediakan modal usaha, kecuali Desa Banyupelle yang telah tersedia lembaga pemodalan tapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengrajin. Hal ini dikarenakan pengrajin tidak mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur untuk mengakses lembaga pemodalan. Akibatnya pengrajin seringkali mengalami kekurangan modal, sehingga menghambat proses produksi.	Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang system kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah, (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi , dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan. Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa <i>external economic</i> saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan <i>joint action</i> . Dalam <i>joint action</i> ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama . Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horizontal (diantara kompetitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)	Hwienawati dkk (1989-1990) dalam Industri Batik di Surakarta menyatakan bahwa masalah pemodalan erat kaitannya dengan masalah perbelanjaan bahan baku, produksi, penjualan, kepegawaian dan lainnya . Industri batik Surakarta untuk mengatasi masalah pemodalan umumnya melibatkan pihak lembaga modal , yang berasal dari pinjaman dari kredit bank asing dan bank swasta nasional serta bank pemerintah.	Permasalahan pemodalan yang sering kali dialami oleh pengrajin batik salah satunya dapat diatasi melalui penyediaan lembaga pemodalan. Pada tipologi ini lembaga pemodalan hanya tersedia di Desa Banyupelle, sedangkan di Desa lainnya belum tersedia. Akan tetapi lembaga pemodalan yang ada di Desa Banyupelle tidak dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat tidak memahami bagaimana cara agar terakses kepada lembaga pemodalan. Oleh karena itu, perlu pemberian informasi kepada pengrajin mengenai lembaga pemodalan secara lengkap diperlukan dalam tipologi ini. Untuk desa yang belum terlayani lembaga pemodalan, maka perlu disediakan lembaga pemodalan seperti koperasi dan BPR setidaknya satu dalam satu desa.	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan.
	Belum ada kelompok usaha antar pengrajin batik Pamekasan. Pengrajin melakukan kegiatan produksi hingga pemasaran secara perorangan tanpa terkoordinasi dalam suatu kelompok usaha. Untuk Desa Kowel telah ada kelompok usaha namun belum difungsikan secara optimal terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal penyediaan bahan baku, pemodalan dan pemasaran.		Dalam Industri Batik di Surakarta, Hwienawati dkk (1989-1990) menyatakan bahwa susunan organisasi yang baik ditunjukkan dari pembagian tugas yang jelas pada setiap bagian, sehingga dalam proses produksi dan pengelolaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Disamping itu, batas pekerjaan yang tegas berguna menunjang kelancaran industri.	Tipologi ini belum memiliki kelompok usaha yang menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan dalam industri batik. Bentuk interaksi antar pengrajin hanya sebatas penjualan hasil produksi. Ada pengrajin yang menitipkan hasil produksinya kepada pengrajin lain untuk dijual ke pasar. Namun, belum ada bentuk interaksi lainnya dalam tipologi ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kelompok usaha untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, penjualan produk dan modal	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.

Sumber: Analisis, 2015

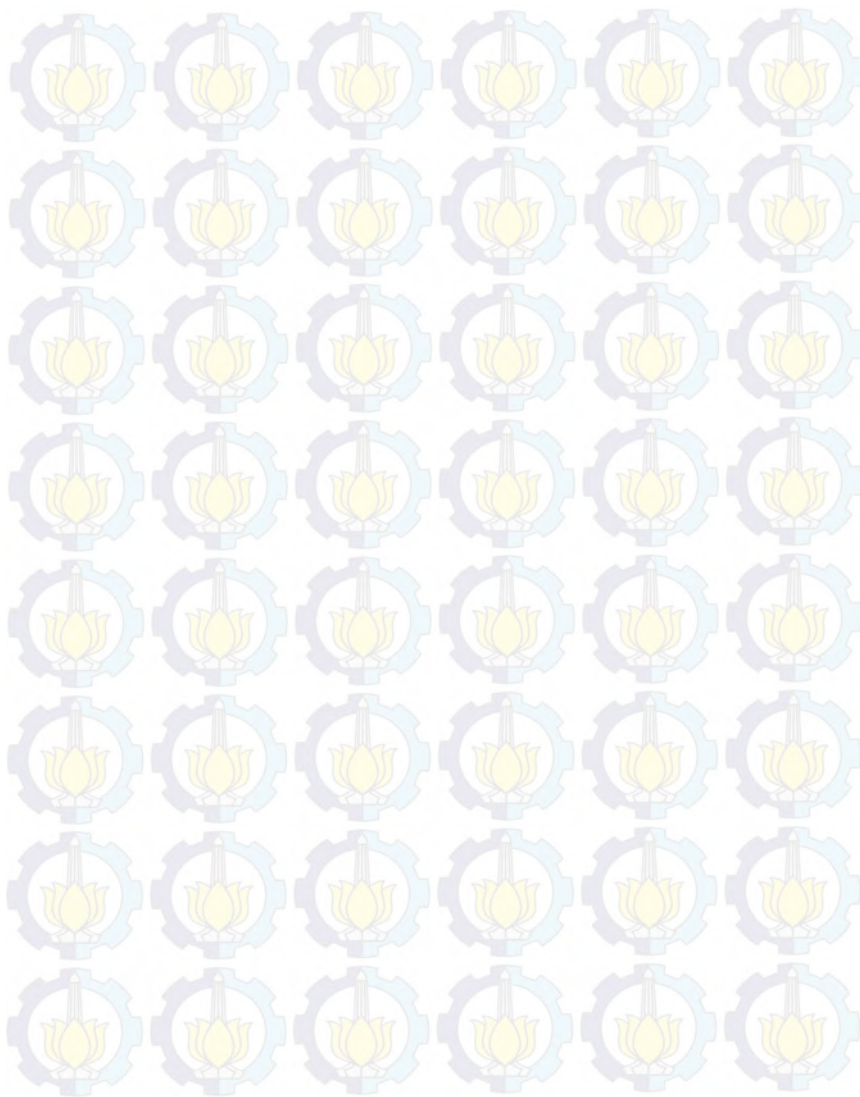


Halaman ini sengaja dikosongkan

Tabel diatas merupakan proses penyusunan indikasi arahan pada masing-masing tipologi berdasarkan permasalahan yang ada. Terdapat beberapa permasalahan yang sama dimiliki oleh seluruh tipologi. Oleh karena itu disusun pula indikasi arahan yang ditujukan untuk seluruh tipologi. Berikut arahan pengembangan untuk seluruh tipologi.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Tabel.4.30. Proses Penyusunan Indikasi Arahan Pengembangan Industri Batik Pamekasan untuk seluruh tipologi

Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Arahan
Kebijakan pemerintah kurang mendukung dalam pengembangan industri batik. dukungan pemerintah saat ini hanya sebatas penetapan pasar batik dan <i>showroom</i> . Belum terlihat usaha pemerintah dalam mempromosikan batik Pamekasan. Padahal, saat ini penjualan batik mengalami penurunan karena semakin banyaknya pengrajin namun jangkauan pemasaran batik tidak mengalami perkembangan.	Menurut Lincoln Arsyad (1999:119-120) dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan informasi tentang system kelembagaan yang meliputi: (1) lembaga masyarakat, (2) struktur ekonomi termasuk organisasi pekerja, asosiasi kelompok usaha, (3) lembaga politik atau pemerintah daerah , (4) lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, lembaga modal, perusahaan asuransi, dan (5) lembaga pelatihan dan pendidikan. Kelembagaan dalam PEL tergambar dalam kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat. Dalam kemitraan, peran serta pemerintah salah satunya dalam membentuk kebijakan pembangunan Daya saing sebagai salah satu komponen dalam PEL dapat diukur melalui empat kategori (Rifan Munir dan Bahtiar Fitanto, 2007), salah satunya, yaitu Kelembagaan, seperti kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro PEL serta perilaku budaya yang mendukung produktivitas.	Dalam Industri Batik di Surakarta oleh Hwienawati dkk (1989-1990) dimana peran pemerintah sangat terlihat dalam mendorong industri batik untuk berkembang salah satunya dengan promosi batik dalam maupun luar negeri. Adapun upaya pemerintah yang dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Promosi pada even resmi pemerintah daerah - Iklan melalui berbagai media, meliputi surat kabar, radio, majalah, brosur, bioskop, kalender, papan iklan, dan televisi - Personal selling, yaitu promosi dari mulut ke mulut - Sales Promotion, dilakukan melalui pengadaan fashion show, cofhasion show, sponsorship, donator, hadiah-hadiah dan lain-lain. <p>Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) menyebutkan keterlibatan pemerintah khususnya dalam pemasaran disamping telah dibangun <i>showroom</i> Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jambi, Balai Kerajinan Rakyat dan Galeri Batik, sedangkan pada tingkat nasional telah disediakan <i>Art Shop</i> Kembang Seri Wisma Perwakilan Jambi-Jakarta</p>	Kebijakan pemerintah yang ada saat ini hanya sebatas menyediakan pasar dan <i>showroom</i> di Kabupaten Pamekasan. Melihat perkembangan jumlah pengrajin dan jumlah produksi yang semakin meningkat pemasaran dan penjualan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan saja belum cukup. Untuk mendukung dan mendorong kemajuan industri batik, pemerintah sangat dibutuhkan perannya dalam pemasaran produk batik khas Pamekasan ini. Dengan demikian, pangsa pasar batik Pamekasan akan semakin luas.	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif
Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.	Schmitz (1995) untuk melengkapi pernyataan Marshal bahwa external economic saja belum cukup untuk mengembangkan klaster, tetapi membutuhkan joint action. Dalam joint action ini memiliki 2 dimensi, yaitu jumlah partisipan dan arah kerjasama . Jumlah partisipan adalah jumlah dari jenis usaha yang bekerja sama, bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan arah kerjasama dibedakan menjadi kerjasama horizontal (diantara competitor) dan kerjasama vertical (antara produsen, supplier input, dan penjual output)	Dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi oleh Mulyadi (2012) menyebutkan bahwa kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengembangkan batik Jambi. Salah satunya kerjasama antara pemerintah daerah Jambi dengan universitas untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin. Kerjasama dapat dilakukan oleh stakeholder dan pada berbagai aspek, salah satunya pemasaran . Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan luar wilayah Jambi, yaitu telah disediakan <i>Art Shop</i> Kembang Seri Wisma Perwakilan Jambi-Jakarta. <p>Dalam Pencapaian Eko-Efisiensi Melalui Kerjasama Antar Pelaku Usaha pada Klatser Industri Batik Simbangkulon Kabupaten Lamongan oleh Purwaningsih (2008) menyebutkan bahwa hubungan antar pelaku usaha diwujudkan melalui proses saling bertukar pikiran dan <i>sharing</i> informasi antar pelaku usaha untuk memperbaiki manajemen internal produksi. Adanya sistem jaringan baik antar stakeholder yang melakukan kerjasama meliputi koordinasi antar stakeholder, pengembangan SDM dan perluasan jaringan informasi merupakan kunci keberhasilan kerjasama dalam upaya mencapai eko-efisiensi.</p>	Keberadaan kelompok usaha sebagaimana dijelaskan diatas menjadi awal untuk mengadakan kerjasama. Melihat permasalahan yang ada dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran produk, maka kerjasama yang sesuai adalah dengan penyedia bahan baku dan butik atau <i>Art Shop</i> . Dengan kerjasama tersebut, akan memudahkan pengrajin dalam kegiatan produksi dan penjualan batik Pamekasan.	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk

Tabel.4.30. Proses Penyusunan Indikasi Arahan Pengembangan Industri Batik Pamekasan untuk seluruh tipologi

Permasalahan	Teori	Best Practice	Analisis	Arahan
Seluruh industri batik di Kabupaten Pamekasan belum tersedia tempat pengolahan limbah. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi batik langsung dibuang ke lahan kosong, sawah atau saluran drainase yang ada.	Jusuf Irianto (1996: 55) menegaskan bahwa faktor yang terpenting yang mempengaruhi produksi bukanlah sumber daya alam saja, tetapi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan didukung infrastruktur yang memadai .	Mulyadi (2012) dalam Analisis Eksplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi menyatakan bahwa penambahan dan perbaikan infrastruktur prasarana yang berkaitan dengan kelancaran produksi dan pemasaran menjadi tombak kekuatan dalam daya saing batik Jambi. Diantaranya penambahan fasilitas produksi seperti kebutuhan air bersih, memperbaiki kelancaran transportasi dan memperbaiki sistem telekomunikasi.	Dalam industri batik IPAL atau tempat pengolahan limbah sangat dibutuhkan mengingat limbah tekstil sangat berbahaya bagi lingkungan. Tidak tersedianya pengolahan limbah dapat berakibat meningkatnya biaya eksternal karena dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar, sehingga pengolahan limbah juga dibutuhkan untuk mengantisipasi membengkaknya biaya produksi akibat adanya biaya eksternal	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin

Arahan pengembangan industri batik berdasarkan proses penyusunan arahan diatas, terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.31. Indikasi arahan Pengembangan Industri Batik Pamekasan

Tipologi	Arahan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodalan dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.
	Pengadaan lembaga pemodalan dengan akses yang mudah
3	Pengadaan lembaga pemodalan dengan akses yang mudah
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.
5.	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.
Arahan untuk seluruh tipologi	
1,2,3,4,dan 5	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Arahan diatas, diajukan kepada 5 (lima) responden yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan (R1), Bappeda Kabupaten Pamekasan (R2), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan (R3), Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Madura (R4) dan Perwakilan dari Asosiasi batik (R5). Berdasarkan kuesioner delphi yang telah diajukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.32. Hasil Analisis Delphi Tahap 1

Arahan	R1	R2	R3	R4	R5
Tipologi 1					
Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	S	S	S	S	S
Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	S	S	S	S	S
Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	S	S	S	S	S
Tipologi 2					
Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.	S	S	S	S	S
Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	S	S	S	S	S
Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	TS	TS	S	TS	S
Tipologi 3					
Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	TS	TS	S	TS	S
Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	S	S	S	S	S
Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	S	S	S	S	S
Tipologi 4					
Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.	TS	TS	S	TS	S
Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	S	S	S	S	S
Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	S	S	S	S	S

Arahan	R1	R2	R3	R4	R5
Tipologi 5					
Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	S	S	S	S	S
Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	S	S	S	S	S
Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan.	TS	TS	S	TS	S
Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	S	S	S	S	S
Arahan untuk seluruh tipologi					
Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	S	S	S	S	S
Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	S	S	S	S	S
Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	S	S	S	S	S

Sumber: Analisis, 2015.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat arahan yang tidak mencapai konsensus, yaitu terdapat *stakeholder* yang menyatakan “Tidak Setuju”. Arahan tersebut adalah:

1. Tipologi 2: Pengadaan lembaga pemodalan dengan akses yang mudah
2. Tipologi 3: Pengadaan lembaga pemodalan dengan akses yang mudah
3. Tipologi 4: Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan
4. Tipologi 5: Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan

Oleh karena itu, dilakukan iterasi untuk mencapai konsensus. Berikut adalah indikasi arahan dalam kuesioner delphi tahap 2 (iterasi 1) yang merupakan indikasi arahan pada tahap 1

yang belum mencapai konsensus serta arahan tambahan dari *stakeholder*.

Tabel 4.33. Indikasi Arahan Pengembangan Industri Batik Kabupaten Pamekasan untuk Delphi Tahap 2 (Iterasi 1)

Tipologi	Arahan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal
1, 2, 3, 4 dan 5	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Kuesioner diatas setelah diajukan kembali kepada responden yang sama, maka menghasilkan arahan yang disepakati oleh seluruh responden. Berikut rekapitulasi hasil kuesioner delphi tahap 2.

Tabel 4.34. Hasil Kuesioner Delphi Tahap 2 (Iterasi 1)

Tipologi	Arahan	1	R2	R3	R4	R5
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	S	S	S	S	S
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	S	S	S	S	S
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	S	S	S	S	S
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	S	S	S	S	S
1, 2, 3, 4 dan 5	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran	S	S	S	S	S
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik	S	S	S	S	S
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik	S	S	S	S	S
	Standarisasi harga dan	S	S	S	S	S

Tipologi	Arahan	1	R2	R3	R4	R5
	mutu/kualitas batik dalam kelompok					

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dihasilkan arahan pengembangan industri batik Pamekasan yang terbagi dalam lima tipologi. Arahan pada masing-masing tipologi industri batik Pamekasan sebagai berikut.

Tipologi 1. merupakan desa dengan ciri produktivitas desa sebagian besar tinggi dan faktor penghambat perkembangan industri adalah faktor kelembagaan. Tipologi 1 terdiri dari Desa Klampar, Toket, dan Larangan Badung. Arahan untuk desa pada tipologi 1 adalah:

1. Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah
2. Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.
3. Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.

Tipologi 2, merupakan desa yang memiliki produktivitas tinggi, dimana perkembangan industri batik dihambat oleh faktor kelembagaan dan sistem produksi. Desa yang termasuk dalam tipologi ini adalah Desa Panaan. Arahan untuk desa pada tipologi 2 adalah:

1. Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.
2. Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota
3. Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah

Tipologi 3, merupakan desa yang memiliki produktivitas rendah dan faktor penghambat perkembangan industri adalah faktor kelembagaan. Desa yang tergolong dalam Tipologi 3 adalah Desa Angsanah. Arahan untuk desa pada tipologi 3 adalah:

1. Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah

2. Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota
3. Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.

Tipologi 4, merupakan desa yang memiliki produktivitas rendah. Faktor penghambat perkembangan industri batik terdiri dari faktor kelembagaan dan sistem produksi. Desa yang tergolong dalam Tipologi 4 adalah Desa Candi Burung, Kowel, dan Waru. Arahan untuk desa pada tipologi 3 adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan
2. Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha
3. Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.

Tipologi 5, merupakan desa yang memiliki produktivitas rendah. Faktor penghambat perkembangan industri batik terdiri dari faktor kelembagaan, sistem produksi dan infrastruktur. Desa yang tergolong dalam Tipologi 3 adalah Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Banyupelle, Pegantenan dan Desa Pagendingan. Arahan untuk desa pada tipologi 5 adalah:

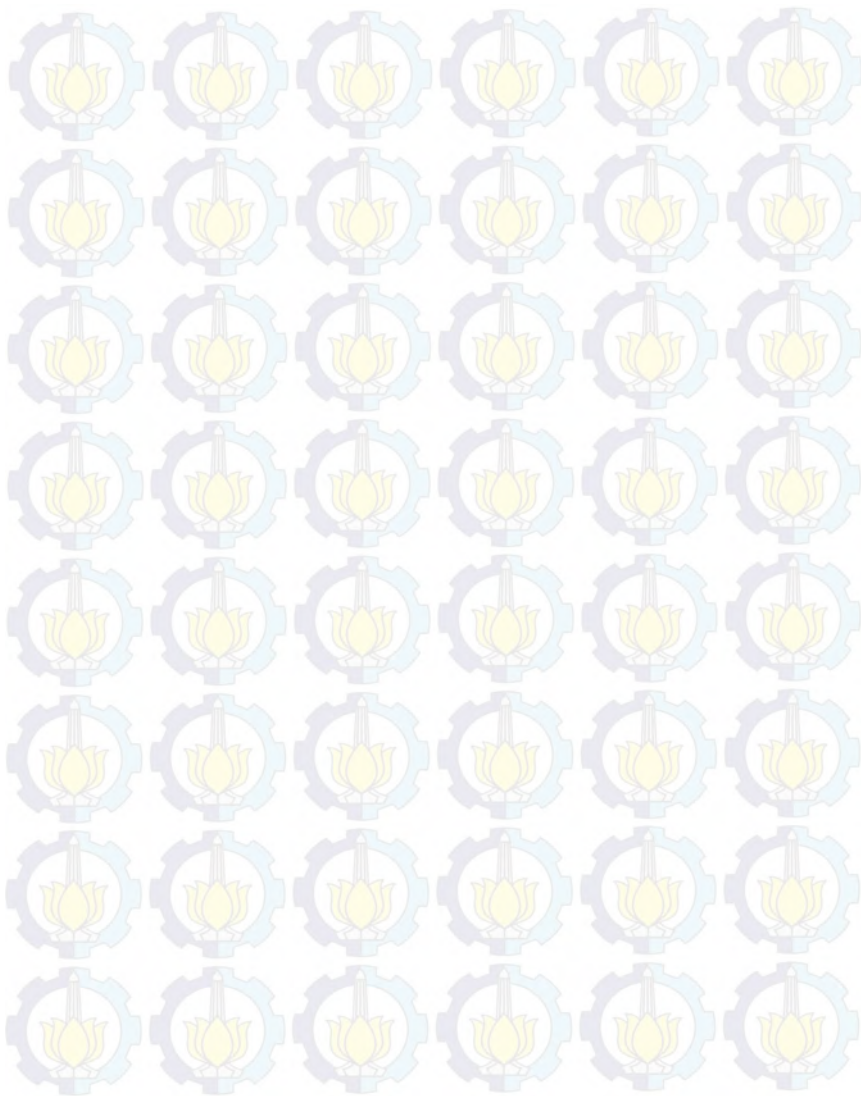
1. Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.
2. Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.
3. Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan
4. Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota

Disamping arahan pada setiap tipologi diatas, terdapat arahan lainnya yang dapat diterapkan untuk seluruh tipologi, arahan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif

2. Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau *Art Shop* dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk
3. Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran.
4. Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik.
5. Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik.
6. Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok.
7. Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Industri batik di Kabupaten Pamekasan merupakan industri lokal yang potensial dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian lokal. Akan tetapi, kondisi wilayah studi yang meliputi rendahnya pelayanan infrastruktur, sistem produksi dan rendahnya peran kelembagaan dapat menghambat perkembangan industri batik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian guna menemukan arahan pengembangan industri batik agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian lokal.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik industri batik di Kabupaten Pamekasan sebagian besar tergolong dalam produktivitas rendah yang terdiri dari Desa Kowel, Desa Candiburung, Rang Perang Daya, Waru, Banyupelle, Angsanah, Pagendingan, Rek kerek dan Desa Pegantenan. Empat desa lainnya, yaitu Desa Klampar, Desa Toket, Panaan dan Larangan Badung memiliki produktivitas pengrajin tinggi.

Faktor yang mempengaruhi pengembangan industri batik di Kabupaten Pamekasan adalah faktor sistem produksi, infrastruktur dan kelembagaan. Faktor sistem produksi meliputi jumlah pengrajin, pendidikan pengrajin, jumlah produksi, nilai tambah dan inovasi motif. Faktor infrastruktur meliputi jalan, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan pengolahan limbah. Faktor kelembagaan meliputi kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku serta peran lembaga pemodal.

Dalam menentukan arahan pengembangan, wilayah penelitian dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu:

- a. Tipologi 1: terdiri dari Desa Klampar, Toket, Larangan Bedung. Produktivitas pengrajin pada empat desa tersebut tinggi. Desa-desa dalam tipologi 1 ini memiliki kelemahan dalam pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama dibidang promosi dan penyediaan bahan

baku, serta peran lembaga keuangan. Melihat permasalahan tersebut, maka arahan untuk mengembangkan industri batik adalah memberikan pelatihan manajemen keuangan, pembagian tugas yang jelas dalam kelompok, memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodalan dan peningkatan upaya pemerintah dalam memasarkan batik.

b. Tipologi 2: terdiri dari Desa Panaan, dimana produktivitas pengrajin di Desa Panaan tergolong tinggi. Desa Panaan memiliki kelemahan pada pengolahan limbah, kelompok usaha, lembaga pemodalan, pelatihan, kebijakan, inovasi motif. Kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku. Oleh karena itu, arahan pengembangan industri batik di Desa Panaan adalah pemberian pelatihan mengenai inovasi motif, membentuk kelompok usaha, dan pengadaan lembaga pemodalan.

c. Tipologi 3 : terdiri dari Desa Angsanah, dimana produktivitas pengrajin di Desa Angsanah tergolong rendah. Desa Angsanah memiliki kelemahan pada lembaga pemodalan, kelompok usaha, pelatihan, kebijakan, dan kerjasama. Dengan demikian, arahan pengembangan industri batik di Desa Angsanah adalah pengadaan lembaga pemodalan, membentuk kelompok usaha dan pemberian pelatihan manajemen keuangan secara berkala.

d. Tipologi 4 : terdiri dari Desa Kowel, Waru Barat dan Candiburung. Produktivitas pengrajin dalam tipologi ini tergolong rendah. Pengembangan industri batik pada desa-desa tersebut terhambat oleh beberapa hal, yaitu tingkat pendidikan pengrajin, nilai tambah, pengolahan limbah, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku, serta peran lembaga pemodalan. Arahan pengembangan industri batik untuk tipologi 4, meliputi peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan, pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha dan pemberian pelatihan mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan.

- e. Tipologi 5: terdiri dari Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Banyupelle, Pegantenan dan Pagendingan dengan produktivitas pengrajin rendah. Desa-desa pada tipologi ini memiliki kelemahan dalam hal pendidikan pengrajin, nilai tambah, inovasi motif, infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pengolahan limbah, jaringan telekomunikasi, kebijakan, pelatihan, kelompok usaha, kerjasama pemasaran dan penyediaan bahan baku, pemodal dan peran lembaga pemodal. Arah pengembangan untuk tipologi ini adalah pengadaan pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan, peningkatan pelayanan dan distribusi infrastruktur, membentuk kelompok usaha dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.

Disamping arahan pengembangan untuk masing-masing tipologi industri batik diatas, terdapat arahan untuk seluruh tipologi, yaitu peningkatan upaya pemerintah dalam memasarkan batik, membentuk kerjasama dengan penyedia bahan baku dan butik/ *Art Shop*, pengembangan peran koperasi meliputi produksi, desain dan pemasaran. Selain itu, dihasilkan arahan berupa pengembangan komunitas pendesain batik, penyediaan kios, standarisasi harga dan penyediaan pengolahan limbah.

5.2. Saran

Saran yang diberikan terkait manfaat hasil penelitian untuk mengembangkan industri batik Pamekasan adalah:

1. Pemerintah daerah dapat menjadikan desa-desa pada tipologi 1, yaitu Desa Klampar, Toket dan Larangan Badung sebagai desa percontohan bagi desa batik lainnya dan menjadikan desa-desa tersebut sebagai prioritas pengembangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah Daerah dapat menjadikan faktor kelembagaan sebagai fokus masalah yang harus diselesaikan, mengingat

faktor kelembagaan merupakan faktor penghambat perkembangan industri yang dihadapi oleh seluruh desa batik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

3. Arahan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan program dan rencana aksi yang berkaitan dengan industri batik Pamekasan.
4. Untuk pengembangan industri batik Pamekasan kedepannya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada kecamatan yang direncanakan sebagai sentra batik, yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pakong.
5. Penelitian ini belum mencakup seluruh aspek pengembangan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai aspek pemasaran dan daya saing industri batik Pamekasan.
6. Pengenalan Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo menjadi kecamatan dengan produk unggulan batik.

Lampiran A1 : Tabel Pemetaan *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	<i>Interest terhadap program</i>	<i>Pengaruh terhadap program</i>	<i>Dampak Program terhadap interest</i>	<i>Kepentingan (Importence)</i>	<i>Pengaruh (Influence)</i>
PEMERINTAH					
Badan Perencana Kabupaten Pamekasan	Merumuskan kebijakan tata ruang terkait industri batik di Kabupaten Pamekasan	Terlibat dalam perencanaan pengembangan industri batik dan perijinan kegiatan industri	+	5	5
Dinas Perekonomian dan Pariwisata	Merumuskan kebijakan dan Roadmap pengembangan industri batik sebagai industri keratif	Terlibat dalam pengembangan industri batik melalui pencitraan kabupaten batik	+	4	4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Memberikan kebijakan teknis dalam pengembangan industri batik	Memberikan pelatihan terkait pengelolaan industri, salah satunya industri batik	+	5	5
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan	Merumuskan kebijakan terkait investasi yang mendukung pengembangan industri batik	Memberikan peluang pengembangan industri batik melalui kebijakan investasi	+	4	4
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan	Memberikan kebijakan teknis terkait SDM dalam industri batik	Terlibat dalam mengadakan pelatihan untuk mengembangkan SDM pelaku industri batik	+	3	4
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan	Memberikan kebijakan terkait kelembagaan dan pemodal dalam mendukung pengembangan industri batik	Terlibat dalam penyediaan modal dan manajemen kelembagaan dalam pengembangan industri batik	+	5	5

Lampiran A1 : Tabel Pemetaan *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	<i>Interest terhadap program</i>	<i>Pengaruh terhadap program</i>	<i>Dampak Program terhadap interest</i>	<i>Kepentingan (Importence)</i>	<i>Pengaruh (Influence)</i>
Ahli Ekonomi	Memberikan masukan terkait pengalaman dan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengembangan UKM dan industri keratif	Memberikan referensi terkait pengembangan UKM dan industri kreatif sesuai dengan pengalaman dan hasil penelitian yang pernah dilakukan	+	5	5
Asosiasi Batik Pamekasan	Memberikan gambaran mengenai kebutuhan dalam industri batik dari sudut pandang pengrajin batik Pamekasan	Sebagai pelaku IKM batik Pamekasan yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan krusial dalam industri batik pamekasan.	+	5	5

Sumber: Penulis, 2014

Keterangan:

Kepentingan (Importence)

- 1= little/not importance
- 2= some importance
- 3=moderate importance
- 4= very importance
- 5= critical importance

Pengaruh (Influence)

- 1 = little/not influence
- 2= some influence
- 3 = moderate influence
- 4= significant influence
- 5 = very influential

Lampiran A2: Tabel Tingkat Kepentingan Stakeholder

Kepentingan Pengaruh	Kepentingan				
	Kecil/tidak penting (1)	Agak penting (2)	Penting (3)	Sangat Penting (4)	Program sangat tergantung padanya (5)
Kecil/Tidak berpengaruh					
Sedikit berpengaruh					
Agak berpengaruh			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan		
Berpengaruh				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perekonomian dan Pariwisata - Badan Kerjasama dan Penanaman 	
Sangat Berpengaruh					<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencana Kabupaten Pamekasan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan - Ahli Ekonomi Asosiasi Batik Pamekasan

Sumber: Penulis, 2014

Halaman ini sengaja dikosongkan

Berikut daftar pernyataan penelitian dengan skala likert.

No	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				Alasan
		TS	TS	S	S	
		1	2	3	4	
	Peraturan atau kebijakan pemerintah (bantuan, penyediaan pasar, penetapan sebagai sentra/pusat batik dll) yang ada telah mendukung industri batik untuk berkembang					
	Telah dilakukan pelatihan oleh pemerintah secara intensif (setiap tahun sekali)					
	Telah terbentuk interaksi (kelompok usaha, komunitas, dll) dan keterkaitan antara pelaku usaha batik (pengrajin, pengepul, pengusaha)					
	Pengrajin telah dilibatkan dalam kegiatan pameran batik di dalam wilayah Kabupaten Pamekasan maupun di luar wilayah Kabupaten Pamekasan					
	Telah ada kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam penyediaan bahan baku industri batik					
	Pengrajin tidak merasa kesulitan dalam memperoleh modal usaha					
	Keberadaan koperasi maupun bank dapat membantu pengrajin dalam memperoleh modal usaha					

-----Terimakasih-----



Lampiran B2: Hasil Kuesioner Likert

Desa	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16
Desa Klampar	3	3	4	1	4	4	2	4	4	1	3	2	2	2	2	2	1
	4	3	4	1	4	4	2	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2
	4	3	4	2	4	4	2	3	4	2	3	2	2	3	1	1	2
	3	4	3	2	4	4	1	3	4	2	3	3	2	3	1	2	2
	3	4	3	1	3	3	1	4	4	2	4	3	3	2	1	1	3
	4	3	4	1	4	3	1	4	3	1	4	2	2	2	2	2	2
	4	3	4	2	3	4	1	4	3	1	3	2	2	2	2	2	1
	3	2	4	2	4	4	2	3	1	1	3	3	3	2	2	1	2
	4	2	4	1	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2	1	1	2
	3	3	4	2	4	4	3	3	3	2	4	2	1	3	3	2	3
	3	3	3	1	4	3	3	4	3	2	4	2	1	3	3	2	2
	3	4	3	2	4	4	4	4	4	1	4	3	2	3	2	3	3
	4	4	4	1	3	4	2	4	4	1	3	3	1	3	2	2	2
	4	3	4	2	3	4	2	3	3	1	3	3	1	2	2	2	2
	4	3	3	2	3	3	1	3	3	1	4	2	1	2	1	2	2
	3	3	4	2	3	3	1	4	4	1	2	2	2	2	1	2	1
	4	4	4	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2
	4	3	3	1	3	4	2	3	4	2	3	3	2	3	2	1	1
	4	3	3	1	3	3	1	3	4	1	4	3	1	2	1	1	1
	4	4	3	2	4	4	1	3	4	1	4	3	1	2	2	1	3
	3	3	3	1	3	4	2	3	3	1	3	3	2	2	3	1	2
	4	3	4	2	4	4	1	4	4	2	3	3	1	3	2	2	2
	4	4	4	2	4	4	2	4	4	1	3	2	3	1	2	2	3
	1	2	3	1	1	4	1	4	2	1	3	2	3	2	3	1	2
	3	3	3	2	3	4	2	2	1	1	3	3	2	2	2	1	2
Desa Toket	3	3	3	2	2	3	4	3	2	1	3	3	3	1	2	2	2
	4	3	4	2	3	3	4	4	2	1	3	3	2	2	2	2	2
	3	3	4	1	3	3	2	4	2	2	4	3	2	2	3	1	2
	2	2	4	1	2	4	2	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1
	2	2	3	2	2	4	3	3	1	1	3	2	2	1	1	2	1
	3	1	3	2	1	3	3	3	3	1	3	4	2	1	1	2	1
	3	1	4	1	1	4	1	3	3	1	3	3	2	2	2	1	2
	4	4	3	1	2	2	1	1	2	2	4	2	1	1	3	3	2
	4	4	3	1	2	3	1	2	1	2	4	3	1	2	2	2	2
	3	2	3	1	1	4	1	2	2	1	3	3	3	1	1	1	1
	3	3	4	2	1	2	2	2	3	1	3	4	3	3	1	2	1
	4	3	4	1	2	4	3	4	1	1	4	3	1	2	1	2	2
	3	3	3	2	2	3	4	3	2	1	3	3	3	1	2	2	1
Desa Panaan	3	2	4	1	2	4	3	3	2	1	3	3	2	2	2	1	2
	2	2	3	2	1	3	3	2	3	2	3	3	1	3	1	2	1
	4	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2
Desa Rang Perang Daya	2	3	3	1	3	4	2	2	2	1	3	2	1	2	1	3	2
	3	2	3	2	3	4	1	3	2	1	3	2	2	2	1	1	1
	3	2	4	2	4	3	1	3	2	2	3	1	3	3	3	3	1
	2	3	3	2	3	4	2	2	2	1	4	2	3	3	3	2	2

Lampiran B2: Hasil Kuesioner Likert

Desa	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16
Desa Candiburung	2	1	3	1	4	4	2	3	4	1	4	2	1	2	2	2	2
	3	3	4	1	4	3	2	3	4	2	3	1	1	1	1	1	1
	2	2	3	1	4	4	2	3	4	1	3	2	3	2	3	3	2
	3	2	3	1	2	3	1	1	3	1	3	3	2	1	1	2	2
	3	1	3	1	1	3	1	1	3	1	3	3	1	1	2	2	2
	4	2	4	1	1	4	2	1	4	1	3	4	2	2	2	2	1
	3	2	3	1	2	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	1	2
	3	1	4	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	1	3	2	2
	4	2	4	2	1	3	2	1	3	1	3	3	2	1	1	1	1
	3	1	4	2	1	3	1	2	3	2	4	3	2	1	1	2	2
Desa Larangan Bedung	3	2	3	2	1	3	1	1	3	1	3	3	2	1	1	2	2
	1	3	3	1	4	4	3	3	4	1	3	2	2	1	2	1	1
	3	3	2	1	3	4	3	3	4	1	4	2	1	1	2	3	2
	3	4	1	1	3	4	3	3	2	3	4	2	1	1	2	2	2
	4	4	4	2	4	4	2	3	3	2	4	2	1	2	3	3	1
	4	3	3	1	4	3	4	4	3	2	3	2	1	2	3	1	1
	4	3	3	1	3	3	3	3	4	2	3	2	3	1	2	1	2
	4	4	2	2	4	4	4	3	3	1	3	2	3	2	2	3	3
	3	4	2	1	3	4	2	3	2	1	3	2	1	1	2	2	3
	3	4	4	2	4	3	3	4	4	3	4	2	2	2	2	3	1
	4	3	3	1	3	3	3	4	4	3	4	2	2	1	3	1	2
	4	3	3	1	4	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
	3	4	4	1	3	3	3	3	2	2	4	2	1	2	2	2	1
	3	3	4	2	3	3	3	4	3	2	4	3	1	1	3	2	1
	2	4	3	2	3	4	2	2	3	1	4	2	1	2	3	1	1
	1	3	2	2	4	4	3	2	3	1	4	2	1	1	3	2	1
	4	4	4	2	4	4	4	3	4	1	4	2	3	1	2	2	3
	1	3	4	1	3	3	2	4	2	4	3	1	1	1	3	1	1
	3	3	2	2	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	1
	4	3	3	1	3	4	3	3	3	2	3	1	2	2	2	1	2
	4	3	4	2	4	4	3	3	3	1	4	2	1	1	2	3	2
Desa Angsanah	3	3	3	1	2	4	1	2	4	1	3	1	1	1	2	3	1
	4	2	3	2	3	4	4	3	4	2	3	2	3	1	2	3	3
	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	1
Desa Rek Kerek	2	1	2	1	2	4	1	1	2	1	3	3	2	1	2	1	1
	1	1	1	1	1	3	2	2	2	1	3	4	1	1	1	1	1
	2	2	1	1	1	3	1	2	2	1	3	3	2	1	2	1	1
Desa Banyupelle	1	3	3	2	1	3	2	3	2	1	3	3	2	2	1	2	2
	1	2	3	2	2	3	2	3	2	1	2	3	1	2	2	2	2
	2	3	3	1	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	1	2	4	1	3	2	1	3	3	2	1	1	2	1
	1	2	2	2	2	3	1	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1
	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	1	2	2
Desa Waru Barat	2	1	3	2	2	3	2	2	2	2	1	3	1	2	1	2	2
	1	2	4	1	1	2	3	3	4	1	4	2	1	2	1	1	2

Lampiran B2: Hasil Kuesioner Likert

Desa	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16
Desa Pegantenan	2	2	3	1	2	2	4	4	4	1	3	1	2	2	2	1	1
	2	2	3	2	2	1	3	3	3	2	4	2	1	2	1	2	2
	1	4	3	1	1	4	3	4	4	2	3	3	1	2	2	1	2
	2	3	3	2	2	3	4	4	3	1	4	4	2	1	2	2	2
	1	3	3	2	2	3	4	3	3	1	4	4	2	2	1	2	2
	1	3	3	2	1	3	4	4	4	1	3	4	1	2	1	2	1
	1	3	3	2	2	3	3	4	3	1	3	4	2	2	1	1	2
	2	3	4	2	2	4	4	3	3	2	4	3	1	1	2	1	2
Desa Pagendingan	1	4	4	1	2	3	3	3	3	1	3	3	2	1	2	2	1
	3	2	3	1	2	2	4	3	4	1	4	2	1	2	2	1	1
	4	1	2	2	1	1	4	3	3	1	4	1	1	1	2	2	1
Desa Kowel	3	2	2	1	2	2	3	4	4	1	4	2	2	1	1	2	2
	3	1	3	1	4	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3
	3	2	3	2	4	3	3	3	4	1	3	3	2	3	2	2	2
	4	2	2	1	3	4	3	3	3	1	4	3	3	3	2	3	2
	3	2	3	1	4	4	4	3	4	1	4	3	3	3	2	2	4
	4	1	2	2	4	3	3	3	4	2	4	3	4	3	1	2	2
	3	2	3	1	3	3	3	3	4	1	3	4	2	4	1	2	2

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Keterangan:

- V1 :Jumlah Pengrajin
 V2 :pendidikan pengrajin
 V3 :Jumlah Produksi
 V4 :Teknologi Produksi
 V5 :Nilai tambah
 V6 :Inovasi Motif
 V7 :Jalan
 V8 :Listrik
 V9 :Air Bersih
 V10 :IPAL
 V11 :Jaringan Telekomunikasi
 V12 :Kebijakan
 V13 :Pelatihan
 V14 :Kelompok usaha
 V15.1 :Kerjasama Pemasaran
 V15.2 :Kerjasama Penyediaan Bahan Baku
 V16 :Lembaga Keuangan

piran C: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations																			
	Jumlah Pengrajin	Kualitas Pengrajin	Jumlah Produksi	Teknologi Pemasaran	Teknologi Produksi	Nilai tambah	Inovasi Motif	Jalan	Listrik	Air Bersih	IPAL	Jaringan Telekomunikasi	Kebijakan	Pelatihan	Kelompok usaha	Kerjasama Pemasaran	Kerjasama Bahan Baku	Lembaga Keuangan	Skor Total
Pearson Correlation	.1	.362*	.178	.097	.151	.570**	.439*	.264	.002	.543**	.360	.311	.899**	.373*	.101	.160	.432*	.242	.664**
g. (2-tailed)		.050	.346	.608	.426	.001	.015	.159	.992	.002	.051	.095	.000	.042	.595	.398	.017	.198	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.362*	1	.398*	.330	.477**	.464**	.406*	.391*	.423*	.416*	.251	.600**	.275	.419*	.225	.415*	.426*	.777**	.720**
g. (2-tailed)			.029	.075	.008	.010	.026	.033	.020	.022	.182	.000	.141	.021	.231	.023	.019	.000	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.178	.398*	1	.893**	.473**	.337	.305	.288	.281	.489**	.503**	.740**	.140	.031	.370*	.463*	.040	.429*	.651**
g. (2-tailed)				.000	.008	.068	.101	.122	.133	.006	.005	.000	.461	.872	.044	.010	.835	.018	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.097	.330	.893**	1	.568**	.252	.215	.271	.264	.412*	.424*	.705**	.099	.129	.475**	.319	.025	.356	.600**
g. (2-tailed)					.001	.179	.254	.147	.159	.024	.020	.000	.604	.497	.008	.086	.894	.054	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.151	.477**	.473**	.568**	1	.370*	-.009	.252	.365*	.144	.405*	.473**	.058	.385*	.302	.217	.249	.515**	.544**
g. (2-tailed)						.044	.962	.180	.047	.448	.026	.008	.762	.035	.105	.249	.185	.004	.002
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.570**	.464**	.337	.252	.370*	1	.568**	.060	.121	.479**	.328	.386*	.485**	.396*	.454*	.348	.288	.555**	.699**
g. (2-tailed)			.068	.179	.044		.001	.754	.526	.007	.076	.035	.007	.030	.012	.059	.123	.001	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.439*	.406*	.305	.215	-.009	.568**	1	-.152	.032	.540**	.231	.305	.397*	.217	.150	.139	.266	.334	.496**
g. (2-tailed)			.101	.254	.962	.001		.424	.867	.002	.219	.101	.030	.250	.429	.465	.155	.071	.005
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.264	.391*	.288	.271	.252	.060	-.152	1	.589**	.459*	.113	.246	.325	.274	.130	.273	.096	.421*	.524**
g. (2-tailed)			.122	.147	.180	.754	.424		.001	.011	.551	.191	.080	.144	.494	.145	.614	.020	.003
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.002	.423*	.281	.264	.365*	.121	.032	.589**	1	.387*	.004	.281	-.040	.402*	.397*	.375*	.136	.457*	.477**
g. (2-tailed)			.133	.159	.047	.526	.867	.001		.035	.985	.133	.833	.028	.030	.041	.474	.011	.008
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.543**	.416*	.489**	.412*	.144	.479**	.540**	.459*	.387*	1	.187	.442*	.555**	.190	.283	.411*	.257	.397*	.739**
g. (2-tailed)			.006	.024	.448	.007	.002	.011	.035		.322	.014	.001	.315	.130	.024	.171	.030	.000
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.360	.251	.503**	.424*	.405*	.328	.231	.113	.004	.187	1	.420*	.216	.070	.191	.411*	-.034	.457*	.482**

	Sig. (2-tailed)	.051	.182	.005	.020	.026	.076	.219	.551	.985	.322		.021	.252	.715	.313	.024	.859	.011	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jaringan Telekomunikasi	Pearson Correlation	.311	.600**	.740**	.705**	.473**	.386*	.305	.246	.281	.442*	.420*	1	.354	.172	.370*	.548**	.438*	.502**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.095	.000	.000	.000	.008	.035	.101	.191	.133	.014	.021		.055	.362	.044	.002	.016	.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kebijakan	Pearson Correlation	.899**	.275	.140	.099	.058	.485**	.397*	.325	-.040	.555**	.216	.354	1	.333	.029	.176	.471**	.153	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000	.141	.461	.604	.762	.007	.030	.080	.833	.001	.252	.055		.072	.879	.353	.009	.419	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pelatihan	Pearson Correlation	.373*	.419*	.031	.129	.385*	.396*	.217	.274	.402*	.190	.070	.172	.333	1	.399*	.182	.419*	.372*	.526**
	Sig. (2-tailed)	.042	.021	.872	.497	.035	.030	.250	.144	.028	.315	.715	.362	.072		.029	.335	.021	.043	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kelompok usaha	Pearson Correlation	.101	.225	.370*	.475**	.302	.454*	.150	.130	.397*	.283	.191	.370*	.029	.399*	1	.479**	.025	.310	.500**
	Sig. (2-tailed)	.595	.231	.044	.008	.105	.012	.429	.494	.030	.130	.313	.044	.879	.029		.007	.897	.095	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerjasama Pemasaran	Pearson Correlation	.160	.415*	.463*	.319	.217	.348	.139	.273	.375*	.411*	.411*	.548**	.176	.182	.479**	1	.156	.543**	.581**
	Sig. (2-tailed)	.398	.023	.010	.086	.249	.059	.465	.145	.041	.024	.024	.002	.353	.335	.007		.410	.002	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kerjasama Bahan Baku	Pearson Correlation	.432*	.426*	.040	.025	.249	.288	.266	.096	.136	.257	-.034	.438*	.471**	.419*	.025	.156	1	.385*	.476**
	Sig. (2-tailed)	.017	.019	.835	.894	.185	.123	.155	.614	.474	.171	.859	.016	.009	.021	.897	.410		.035	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Lembaga Keuangan	Pearson Correlation	.242	.777**	.429*	.356	.515**	.555**	.334	.421*	.457*	.397*	.457*	.502**	.153	.372*	.310	.543**	.385*	1	.720**
	Sig. (2-tailed)	.198	.000	.018	.054	.004	.001	.071	.020	.011	.030	.011	.005	.419	.043	.095	.002	.035		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor Total	Pearson Correlation	.664**	.720**	.651**	.600**	.544**	.699**	.496**	.524**	.477**	.739**	.482**	.742**	.624**	.526**	.500**	.581**	.476**	.720**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.005	.003	.008	.000	.007	.000	.000	.003	.005	.001	.008	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	3

Lampiran D: Input Data Analisis Kluster

Desa	V1	V2	V3	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16	V1	V2
Desa Klampar	2,604	2,991	4,370	2,300	1,000	3,649	4,277	2,038	4,245	3,931	1,000	3,236	2,272	2,242	2,261	2,311	2,369	1,000
	3,757	2,991	4,370	2,300	1,000	3,649	4,277	2,038	4,245	3,931	2,487	3,236	2,272	2,242	2,261	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	4,370	1,000	2,596	3,649	4,277	2,038	2,964	3,931	2,487	3,236	2,272	2,242	3,389	1,000	1,000	2,398
	2,604	4,175	3,016	1,000	2,596	3,649	4,277	1,000	2,964	3,931	2,487	3,236	3,452	2,242	3,389	1,000	2,369	2,398
	2,604	4,175	3,016	1,000	1,000	2,646	2,868	1,000	4,245	3,931	2,487	4,746	3,452	3,347	2,261	1,000	1,000	3,672
	3,757	2,991	4,370	1,000	1,000	3,649	2,868	1,000	4,245	2,840	1,000	4,746	2,272	2,242	2,261	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	4,370	2,300	2,596	2,646	4,277	1,000	4,245	2,840	1,000	3,236	2,272	2,242	2,261	2,311	2,369	1,000
	2,604	2,006	4,370	2,300	2,596	3,649	4,277	2,038	2,964	1,000	1,000	3,236	3,452	3,347	2,261	2,311	1,000	2,398
	3,757	2,006	4,370	2,300	1,000	2,646	2,868	2,038	1,919	1,000	2,487	1,746	3,452	2,242	2,261	1,000	1,000	2,398
	2,604	2,991	4,370	3,392	2,596	3,649	4,277	2,869	2,964	2,840	2,487	4,746	2,272	1,000	3,389	3,579	2,369	3,672
	2,604	2,991	3,016	3,392	1,000	3,649	2,868	2,869	4,245	2,840	2,487	4,746	2,272	1,000	3,389	3,579	2,369	2,398
	2,604	4,175	3,016	4,435	2,596	3,649	4,277	3,877	4,245	3,931	1,000	4,746	3,452	2,242	3,389	2,311	3,701	3,672
	3,757	4,175	4,370	2,300	1,000	2,646	4,277	2,038	4,245	3,931	1,000	3,236	3,452	1,000	3,389	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	4,370	1,000	2,596	2,646	4,277	2,038	2,964	2,840	1,000	3,236	3,452	1,000	2,261	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	3,016	1,000	2,596	2,646	2,868	1,000	2,964	2,840	1,000	4,746	2,272	1,000	2,261	1,000	2,369	2,398
	2,604	2,991	4,370	2,300	2,596	2,646	2,868	1,000	4,245	3,931	1,000	1,746	2,272	2,242	2,261	1,000	2,369	1,000
	3,757	4,175	4,370	1,000	2,596	2,646	4,277	2,038	2,964	2,840	2,487	3,236	3,452	2,242	3,389	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	3,016	2,300	1,000	2,646	4,277	2,038	2,964	3,931	2,487	3,236	3,452	2,242	3,389	2,311	1,000	1,000
	3,757	2,991	3,016	2,300	1,000	2,646	2,868	1,000	2,964	3,931	1,000	4,746	3,452	1,000	2,261	1,000	1,000	1,000
	3,757	4,175	3,016	2,300	2,596	3,649	4,277	1,000	2,964	3,931	1,000	4,746	3,452	1,000	2,261	2,311	1,000	3,672
	2,604	2,991	3,016	1,000	1,000	2,646	4,277	2,038	2,964	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	3,579	1,000	2,398
	3,757	2,991	4,370	1,000	2,596	3,649	4,277	1,000	4,245	3,931	2,487	3,236	3,452	1,000	3,389	2,311	2,369	2,398
	3,757	4,175	4,370	2,300	2,596	3,649	4,277	2,038	4,245	3,931	1,000	3,236	2,272	3,347	1,000	2,311	2,369	3,672
	1,000	2,006	3,016	2,300	1,000	1,000	4,277	1,000	4,245	1,999	1,000	3,236	2,272	3,347	2,261	3,579	1,000	2,398
	2,604	2,991	3,016	2,300	2,596	2,646	4,277	2,038	1,919	1,000	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	2,311	1,000	2,398
Rata-rata	3,186	3,204	3,774	2,005	1,894	3,062	3,882	1,763	3,496	3,153	1,595	3,600	2,933	2,021	2,616	2,147	1,875	2,373
Desa Toket	2,604	2,991	3,016	2,300	2,596	1,936	2,868	3,877	2,964	1,999	1,000	3,236	3,452	3,347	1,000	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,991	4,370	2,300	2,596	2,646	2,868	3,877	4,245	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	2,311	2,369	2,398
	2,604	2,991	4,370	1,000	1,000	2,646	2,868	2,038	4,245	1,999	2,487	4,746	3,452	2,242	2,261	3,579	1,000	2,398
	1,821	2,006	4,370	2,300	1,000	1,936	4,277	2,038	1,919	1,000	2,487	3,236	2,272	3,347	1,000	2,311	1,000	1,000
	1,821	2,006	3,016	3,392	2,596	1,936	4,277	2,869	2,964	1,000	1,000	3,236	2,272	2,242	1,000	1,000	2,369	1,000
	2,604	1,000	3,016	2,300	2,596	1,000	2,868	2,869	2,964	2,840	1,000	3,236	4,684	2,242	1,000	1,000	2,369	1,000
	2,604	1,000	4,370	1,000	1,000	1,000	4,277	1,000	2,964	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	2,311	1,000	2,398
	3,757	4,175	3,016	1,000	1,000	1,936	1,741	1,000	1,000	1,999	2,487	4,746	2,272	1,000	1,000	3,579	3,701	2,398
	3,757	4,175	3,016	1,000	1,000	1,936	2,868	1,000	1,919	1,000	2,487	4,746	3,452	1,000	2,261	2,311	2,369	2,398
	2,604	2,006	3,016	2,300	1,000	1,000	4,277	1,000	1,919	1,999	1,000	3,236	3,452	3,347	1,000	1,000	1,000	1,000
	2,604	2,991	4,370	3,392	2,596	1,000	1,741	2,038	1,919	2,840	1,000	3,236	4,684	3,347	3,389	1,000	2,369	1,000
	3,757	2,991	4,370	2,300	1,000	1,936	4,277	2,869	4,245	1,000	1,000	4,746	3,452	1,000	2,261	1,000	2,369	2,398
	2,604	2,991	3,016	4,435	2,596	1,936	2,868	3,877	2,964	1,999	1,000	3,236	3,452	3,347	1,000	2,311	2,369	1,000
Rata-rata	2,839	2,640	3,641	2,232	1,737	1,757	3,236	2,335	2,787	1,885	1,457	3,700	3,369	2,380	1,669	2,002	2,050	1,753
Desa Panaan	2,604	2,006	4,370	1,000	1,000	1,936	4,277	2,869	2,964	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	2,311	1,000	2,398
	1,821	2,006	3,016	2,300	2,596	1,000	2,868	2,869	1,919	2,840	2,487	3,236	3,452	1,000	3,389	1,000	2,369	1,000
	3,757	2,991	3,016	2,300	2,596	3,649	4,277	2,869	2,964	2,840	2,487	3,236	2,272	2,242	3,389	1,000	2,369	2,398
Rata-rata	2,727	2,335	3,467	1,867	2,064	2,195	3,807	2,869	2,616	2,559	1,991	3,236	3,059	1,828	3,013	1,437	1,913	1,932
Desa Rang Perang	1,821	2,991	3,016	2,300	1,000	2,646	4,277	2,038	1,919	1,999	1,000	3,236	2,272	1,000	2,261	1,000	3,701	2,398

Desa	V1	V2	V3	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16	V1	V2
Daya	2,604	2,006	3,016	2,300	2,596	2,646	4,277	1,000	2,964	1,999	1,000	3,236	2,272	2,242	2,261	1,000	1,000	1,000
	2,604	2,006	4,370	1,000	2,596	3,649	2,868	1,000	2,964	1,999	2,487	3,236	1,000	3,347	3,389	3,579	3,701	1,000
	1,821	2,991	3,016	2,300	2,596	2,646	4,277	2,038	1,919	1,999	1,000	4,746	2,272	3,347	3,389	3,579	2,369	2,398
	1,821	1,000	3,016	1,000	1,000	3,649	4,277	2,038	2,964	3,931	1,000	4,746	2,272	1,000	2,261	2,311	2,369	2,398
	2,604	2,991	4,370	2,300	1,000	3,649	2,868	2,038	2,964	3,931	2,487	3,236	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	1,821	2,006	3,016	2,300	1,000	3,649	4,277	2,038	2,964	3,931	1,000	3,236	2,272	3,347	2,261	3,579	3,701	2,398
Rata-rata	2,157	2,285	3,403	1,929	1,684	3,219	3,874	1,741	2,666	2,827	1,425	3,667	1,909	2,183	2,403	2,293	2,549	1,799
Desa Candiburung	2,604	2,006	3,016	1,000	1,000	1,936	2,868	1,000	1,000	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	1,000	2,369	2,398
	2,604	1,000	3,016	1,000	1,000	1,000	2,868	1,000	1,000	2,840	1,000	3,236	3,452	1,000	1,000	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,006	4,370	2,300	1,000	1,000	4,277	2,038	1,000	3,931	1,000	3,236	4,684	2,242	2,261	2,311	2,369	1,000
	2,604	2,006	3,016	2,300	1,000	1,936	4,277	2,038	1,919	1,999	2,487	4,746	4,684	2,242	2,261	2,311	1,000	2,398
	2,604	1,000	4,370	1,000	2,596	1,936	2,868	2,038	1,919	2,840	2,487	3,236	3,452	3,347	1,000	3,579	2,369	2,398
	3,757	2,006	4,370	1,000	2,596	1,000	2,868	2,038	1,000	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	1,000	1,000	1,000
	2,604	1,000	4,370	1,000	2,596	1,000	2,868	1,000	1,919	2,840	2,487	4,746	3,452	2,242	1,000	1,000	2,369	2,398
	2,604	2,006	3,016	1,000	2,596	1,000	2,868	1,000	1,000	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	1,000	2,369	2,398
Rata-rata	2,893	1,629	3,693	1,325	1,798	1,351	3,220	1,519	1,345	2,871	1,558	3,613	3,760	2,225	1,315	1,814	2,027	2,049
Desa Larangan Bedung	1,000	2,991	3,016	1,000	1,000	3,649	4,277	2,869	2,964	3,931	1,000	3,236	2,272	2,242	1,000	2,311	1,000	1,000
	2,604	2,991	1,880	2,300	1,000	2,646	4,277	2,869	2,964	3,931	1,000	4,746	2,272	1,000	1,000	2,311	3,701	2,398
	2,604	4,175	1,000	1,000	1,000	2,646	4,277	2,869	2,964	1,999	3,644	4,746	2,272	1,000	1,000	2,311	2,369	2,398
	3,757	4,175	4,370	3,392	2,596	3,649	4,277	2,038	2,964	2,840	2,487	4,746	2,272	1,000	2,261	3,579	3,701	1,000
	3,757	2,991	3,016	1,000	1,000	3,649	2,868	3,877	4,245	2,840	2,487	3,236	2,272	1,000	2,261	3,579	1,000	1,000
	3,757	2,991	3,016	2,300	1,000	2,646	2,868	2,869	2,964	3,931	2,487	3,236	2,272	3,347	1,000	2,311	1,000	2,398
	3,757	4,175	1,880	2,300	2,596	3,649	4,277	3,877	2,964	2,840	1,000	3,236	2,272	3,347	2,261	2,311	3,701	3,672
	2,604	4,175	1,880	2,300	1,000	2,646	4,277	2,038	2,964	1,999	1,000	3,236	2,272	1,000	1,000	2,311	2,369	3,672
	2,604	4,175	4,370	1,000	2,596	3,649	2,868	2,869	4,245	3,931	3,644	4,746	2,272	2,242	2,261	2,311	3,701	1,000
	3,757	2,991	3,016	1,000	1,000	2,646	2,868	2,869	4,245	3,931	3,644	4,746	2,272	2,242	1,000	3,579	1,000	2,398
	3,757	2,991	3,016	1,000	1,000	3,649	2,868	2,038	2,964	1,999	2,487	3,236	2,272	2,242	2,261	3,579	2,369	2,398
	2,604	4,175	4,370	1,000	1,000	2,646	2,868	2,869	2,964	1,999	2,487	4,746	2,272	1,000	2,261	2,311	2,369	1,000
	2,604	2,991	4,370	1,000	2,596	2,646	2,868	2,869	4,245	2,840	2,487	4,746	3,452	1,000	1,000	3,579	2,369	1,000
	1,821	4,175	3,016	2,300	2,596	2,646	4,277	2,038	1,919	2,840	1,000	4,746	2,272	1,000	2,261	3,579	1,000	1,000
	1,000	2,991	1,880	3,392	2,596	3,649	4,277	2,869	1,919	2,840	1,000	4,746	2,272	1,000	1,000	3,579	2,369	1,000
	3,757	4,175	4,370	1,000	2,596	3,649	4,277	3,877	2,964	3,931	1,000	4,746	2,272	3,347	1,000	2,311	2,369	3,672
	1,000	2,991	4,370	3,392	1,000	2,646	2,868	2,038	4,245	1,999	4,319	3,236	1,000	1,000	1,000	3,579	1,000	1,000
	2,604	2,991	1,880	2,300	2,596	2,646	2,868	2,869	2,964	1,999	1,000	3,236	2,272	2,242	2,261	3,579	3,701	1,000
	3,757	2,991	3,016	1,000	1,000	2,646	4,277	2,869	2,964	2,840	2,487	3,236	1,000	2,242	2,261	2,311	1,000	2,398
	3,757	2,991	4,370	1,000	2,596	3,649	4,277	2,869	2,964	2,840	1,000	4,746	2,272	1,000	1,000	2,311	3,701	2,398
Rata-rata	2,843	3,465	3,105	1,749	1,718	3,097	3,643	2,813	3,180	2,915	2,083	4,066	2,204	1,725	1,567	2,882	2,289	1,890
Desa Angsanah	2,604	2,991	3,016	3,392	1,000	1,936	4,277	1,000	1,919	3,931	1,000	3,236	1,000	1,000	1,000	2,311	3,701	1,000
	3,757	2,006	3,016	2,300	2,596	2,646	4,277	3,877	2,964	3,931	2,487	3,236	2,272	3,347	1,000	2,311	3,701	3,672
	2,604	2,991	3,016	2,300	2,596	1,000	2,868	2,869	2,964	2,840	2,487	3,236	2,272	3,347	3,389	2,311	2,369	1,000
Rata-rata	2,989	2,663	3,016	2,664	2,064	1,861	3,807	2,582	2,616	3,567	1,991	3,236	1,848	2,565	1,796	2,311	3,257	1,891
Desa Rek Kerek	1,821	1,000	1,880	1,000	1,000	1,936	4,277	1,000	1,000	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	2,311	1,000	1,000
	1,000	1,000	1,000	2,300	1,000	1,000	2,868	2,038	1,919	1,999	1,000	3,236	4,684	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	1,821	2,006	1,000	1,000	1,000	1,000	2,868	1,000	1,919	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	2,311	1,000	1,000
Rata-rata	1,547	1,335	1,293	1,433	1,000	1,312	3,337	1,346	1,613	1,999	1,000	3,236	3,863	1,828	1,000	1,874	1,000	1,000
Desa Banyupelle	1,000	2,991	3,016	1,000	2,596	1,000	2,868	2,038	2,964	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	2,261	1,000	2,369	2,398
	1,000	2,006	3,016	3,392	2,596	1,936	2,868	2,038	2,964	1,999	1,000	1,746	3,452	1,000	2,261	2,311	2,369	2,398

Desa	V1	V2	V3	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15.1	V15.2	V16	V1	V2
	1,821	2,991	3,016	2,300	1,000	1,000	2,868	2,038	1,919	1,000	2,487	1,746	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	1,821	2,006	1,880	3,392	1,000	1,936	4,277	1,000	2,964	1,999	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	1,000	2,369	1,000
	1,000	2,006	1,880	2,300	2,596	1,936	2,868	1,000	1,919	1,000	1,000	3,236	2,272	1,000	1,000	2,311	1,000	1,000
	1,821	2,991	3,016	3,392	2,596	1,936	2,868	2,038	2,964	1,999	2,487	3,236	2,272	2,242	2,261	1,000	2,369	2,398
	1,821	1,000	3,016	2,300	2,596	1,936	2,868	2,038	1,919	1,999	2,487	1,000	3,452	1,000	2,261	1,000	2,369	2,398
Rata-rata	1,469	2,285	2,691	2,583	2,140	1,669	3,069	1,741	2,516	1,713	1,637	2,491	2,765	1,532	1,720	1,375	1,978	1,799
Desa Waru Barat	1,000	2,006	4,370	1,000	1,000	1,000	1,741	2,869	2,964	3,931	1,000	4,746	2,272	1,000	2,261	1,000	1,000	2,398
	1,821	2,006	3,016	2,300	1,000	1,936	1,741	3,877	4,245	3,931	1,000	3,236	1,000	2,242	2,261	2,311	1,000	1,000
	1,821	2,006	3,016	2,300	2,596	1,936	1,000	2,869	2,964	2,487	4,746	2,272	1,000	2,261	1,000	2,369	2,398	2,398
Rata-rata	1,547	2,006	3,467	1,867	1,532	1,624	1,494	3,205	3,391	3,567	1,496	4,243	1,848	1,414	2,261	1,437	1,456	1,932
Desa Pegantenan	1,000	4,175	3,016	1,000	1,000	1,000	4,277	2,869	4,245	3,931	2,487	3,236	3,452	1,000	2,261	2,311	1,000	2,398
	1,821	2,991	3,016	2,300	2,596	1,936	2,868	3,877	4,245	2,840	1,000	4,746	4,684	2,242	1,000	2,311	2,369	2,398
	1,000	2,991	3,016	2,300	2,596	1,936	2,868	3,877	2,964	2,840	1,000	4,746	4,684	2,242	2,261	1,000	2,369	2,398
	1,000	2,991	3,016	2,300	2,596	1,000	2,868	3,877	4,245	3,931	1,000	3,236	4,684	1,000	2,261	1,000	2,369	1,000
	1,000	2,991	3,016	1,000	2,596	1,936	2,868	2,869	4,245	2,840	1,000	3,236	4,684	2,242	2,261	1,000	1,000	2,398
	1,821	2,991	4,370	2,300	2,596	1,936	4,277	3,877	2,964	2,840	2,487	4,746	3,452	1,000	1,000	2,311	1,000	2,398
	1,000	4,175	4,370	1,000	1,000	1,936	2,868	2,869	2,964	2,840	1,000	3,236	3,452	2,242	1,000	2,311	2,369	1,000
Rata-rata	1,235	3,329	3,403	1,743	2,140	1,669	3,270	3,445	3,696	3,151	1,425	3,883	4,156	1,710	1,720	1,749	1,782	1,999
Desa Pagendingan	2,604	2,006	3,016	1,000	1,000	1,936	1,741	3,877	2,964	3,931	1,000	4,746	2,272	1,000	2,261	2,311	1,000	1,000
	3,757	1,000	1,880	2,300	2,596	1,000	1,000	3,877	2,964	2,840	1,000	4,746	1,000	1,000	1,000	2,311	2,369	1,000
	2,604	2,006	1,880	3,392	1,000	1,936	1,741	2,869	4,245	3,931	1,000	4,746	2,272	2,242	1,000	1,000	2,369	2,398
Rata-rata	2,989	1,671	2,259	2,231	1,532	1,624	1,494	3,541	3,391	3,567	1,000	4,746	1,848	1,414	1,420	1,874	1,913	1,466
Desa Kowel	2,604	1,000	3,016	3,392	1,000	3,649	4,277	2,869	2,964	3,931	2,487	3,236	3,452	3,347	3,389	2,311	2,369	3,672
	2,604	2,006	3,016	3,392	2,596	3,649	2,868	2,869	2,964	3,931	1,000	3,236	3,452	2,242	3,389	2,311	2,369	2,398
	3,757	2,006	1,880	2,300	1,000	2,646	4,277	2,869	2,964	2,840	1,000	4,746	3,452	3,347	3,389	2,311	3,701	2,398
	2,604	2,006	3,016	3,392	1,000	3,649	4,277	3,877	2,964	3,931	1,000	4,746	3,452	3,347	3,389	2,311	2,369	4,711
	3,757	1,000	1,880	2,300	2,596	3,649	2,868	2,869	2,964	3,931	2,487	4,746	3,452	4,711	3,389	1,000	2,369	2,398
	2,604	2,006	3,016	1,000	1,000	2,646	2,868	2,869	2,964	3,931	1,000	3,236	4,684	2,242	4,728	1,000	2,369	2,398
Rata-rata	2,989	1,671	2,637	2,630	1,532	3,315	3,572	3,037	2,964	3,749	1,496	3,991	3,657	3,206	3,612	1,874	2,591	2,996

Sumber: Hasil Analisis, 2015.

Lampiran E1: Kuesioner Delphi Tahap 1



KUESIONER WAWANCARA DELPHI

Arahan Pengembangan Industri Batik Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan

Bapak Ibu/ Saudara/i yang saya hormati.

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir, saya selaku mahasiswa/i mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya, memohon kesediaan dari Bapak/ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul **“Pengembangan Industri Kreatif Batik Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan”**. Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui arahan pengembangan industri batik berdasarkan persepsi bapak/ibu.

Identitas Peneliti

Nama : Wilda Al Aluf

NRP : 3611100008

Judul Penelitian : Arahan Pengembangan Industri Kreatif Batik Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan

Pendahuluan


Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten miskin di Indonesia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan sebanyak 19,01%. Jumlah pengangguran mencapai 2,19% dari jumlah angkatan kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya pengembangan untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu upaya pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi lokal berupa keterampilan membatik secara turun temurun yang saat telah berkembang menjadi industri di tujuh kecamatan. Akan tetapi kondisi wilayah, yang meliputi rendahnya kualitas SDM, kurangnya pelayanan Infrastruktur dan rendahnya peran Kelembagaan masih belum mendukung perkembangan industri batik. Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan industri kreatif batik melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang melatar belakangi penelitian, yaitu pada aspek SDM, kelembagaan dan infrastruktur pendukung industri batik. Dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan wilayah, sehingga berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja baru yang prospektif dan dapat menjamin peningkatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

KUESIONER**Identitas Responden :**

Nama : Usia :
 Jabatan : Tanggal Pengisian :
 Instansi : Waktu Pengisian :
 Alamat Rumah : -Mulai :
 Telepon/HP : -Selesai :

Tabel Permasalahan masing-masing tipologi Industri Batik Pamekasan

Tipologi	Permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan yang pernah diberikan kepada pengrajin tidak sesuai dengan kebutuhan, salah pelatihan yang dibutuhkan adalah manajemen keuangan, namun yang diberikan adalah pelatihan motif batik. - Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal, dibuktikan dengan permasalahan dalam industri batik yang seringkali ditanggung oleh masing-masing anggota tanpa adanya penyelesaian dalam kelompok. - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia tempat pengolahan limbah ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pengrajin dalam mengolah limbah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin. - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan keahlian pengrajin rendah khususnya dalam inovasi motif. - Motif batik tidak mengalami perkembangan, dari tahun ketahun motif masih terpaku pada ciri khas motif batik Madura konvensional - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan. - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat memwadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 3. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan pengrajin dalam menghasilkan nilai tambah. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, pengrajin masih mengandalkan modal pribadi, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan

Tipologi	Permasalahan
	<p>keahlian pengrajin rendah khususnya dalam melakukan inovasi motif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan dalam mengelola industri sehingga kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah cukup rendah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
<p>5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan pengrajin tergolong rendah, yaitu sebagian besar lulusan SD atau belum lulus SD yang berakibat pada kemampuan pengrajin dalam mengelola industri baik melakukan inovasi batik maupun menghasilkan nilai tambah. - Motif batik tidak mengalami perkembangan dari tahun ke tahun - Pengrajin belum bisa mengelola keuangan dengan baik ditunjukkan dari nilai tambah yang diperoleh oleh pengrajin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini, padahal melihat kapasitas pengrajin yang rendah, pelatihan sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan inovasi motif dan menghasilkan nilai tambah. - Belum tersedia lembaga pemodal yang dapat membantu permasalahan modal pengrajin industri batik. - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 5. - Kurangnya pelayanan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih), sehingga menghambat perkembangannya industri. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian:

Pernyataan berikut ini merupakan arahan yang diajukan oleh peneliti untuk pengembangan industri Kreatif Batik Pamekasan. Arahan ini diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom:

S : Setuju dengan arahan yang diusulkan

TS : Tidak setuju dengan arahan yang diusulkan

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah			
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.			
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodalan dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.			
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.			
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota			
	Pengadaan lembaga pemodalan di Desa Panaan dengan akses yang mudah			
3	Pengadaan lembaga pemodalan di Desa Angsanah dengan akses yang mudah			
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota			
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai cara pengolahan limbah oleh pemerintah daerah			
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan di seluruh desa pada tipologi 4, yaitu Desa Candiburung, Kowel dan Waru			
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.			
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan cara pengolahan limbah oleh pemerintah daerah			
5	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik, manajemen keuangan dan cara pengolahan limbah oleh pemerintah daerah			
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan,			

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	listrik dan air bersih.			
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal pada tipologi 5 khususnya Desa Rang Perang Daya, Rek Kerek, Pagendingan dan Pegantenan.		√	
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota			
	Arahan untuk seluruh tipologi			
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif			
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk			
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin			

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I mengajukan arahan lainnya untuk mengembangkan industri batik Pamekasan?

Sebutkan :

.....

.....

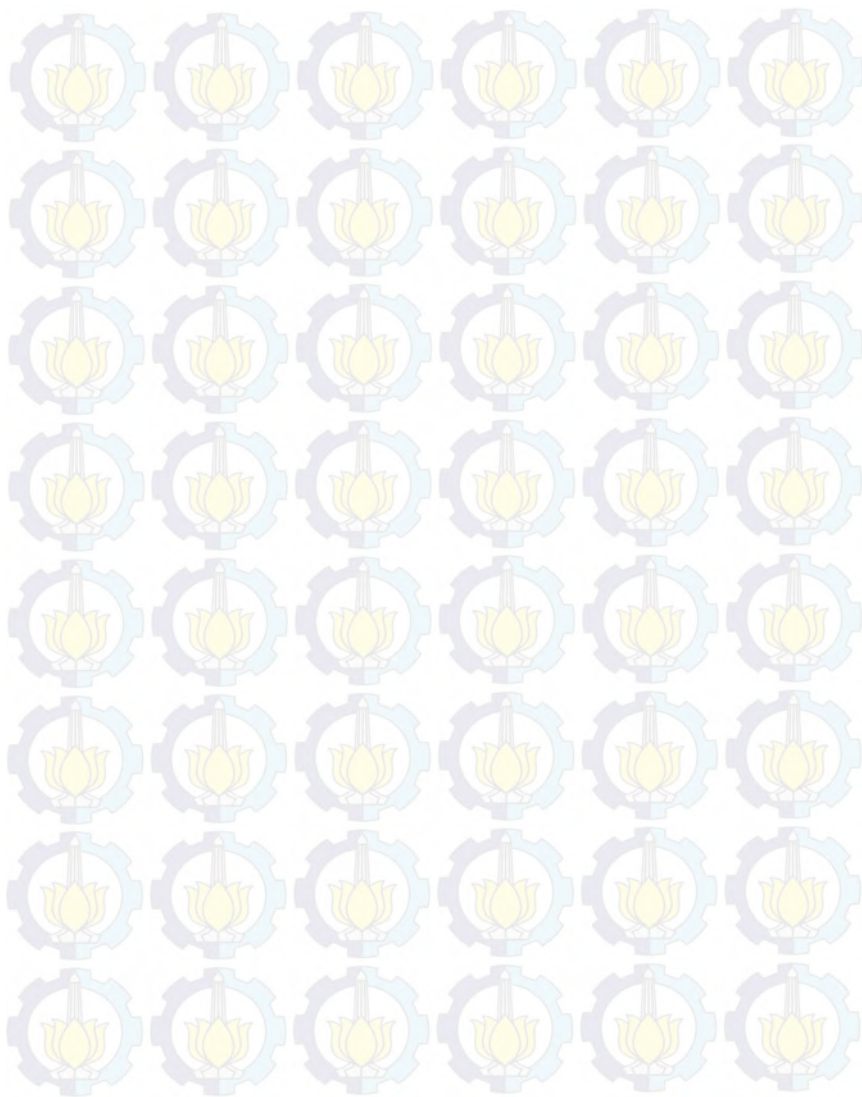
.....

Alasan :

.....

.....

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lapiran E-2: Hasil Kuesioner Delphi Tahap 1

Nama : R. Moh. Tjipto Djajadi Usia : 52 Tahun
 Jabatan : Kepala Bidang Bina Industri Tanggal Pengisian : 6 April 2015
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waktu Pengisian : 08:17 WIB
 Pamekasan -Mulai
 Telepin/HP : 087850518686 -Selesai : 08:59 WIB



Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	√		Karena kita murni untuk melayani IKM, salah satunya IKM batik. Jadi segala sesuatu yang dapat mendukung kemajuan IKM batik sebaik mungkin akan dilakukan. Salah satunya pelatihan manajemen keuangan.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Dengan adanya tugas dan fungsi yang jelas akan menjadikan IKM lebih aktif dan giat untuk ikut terlibat dalam kelompok.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	√		Telah pernah dilakukan pelatihan mengenai prosedur dan tata cara agar dapat memanfaatkan lembaga pemodal. Bahkan kami telah bekerjasama dengan pihak bank dan lembaga modal lainnya untuk melakukan penyuluhan. Akan tetapi memang tidak semua mendapatkan penyuluhan dan mungkin cara penyuluhan yang demikian kurang efektif.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah..	√		Pelatihan sebagaimana saya jelaskan tadi memang tumpukan dari pemerintah untuk mengembangkan batik, sehingga untuk pelatihan berupa inovasi motif memang dibutuhkan.
	Membentuk kelompok usaha dengan	√		Dengan adanya kelompok usaha tidak hanya akan memperlancar dan

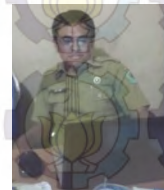
Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.			mempermudah kegiatan industri batik, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dikontrol oleh pemerintah. Sehingga ketika ada kendala pemerintah dapat langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Membangun lembaga modal. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan batik juga dipertimbangkan. Karena akan percuma membangun lembaga pemodal di Desa Panaan tetapi masyarakat disana tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk mengembangkan batik.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Membangun lembaga modal. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan batik juga dipertimbangkan. Karena akan percuma membangun lembaga pemodal di Desa Angsanah tetapi masyarakat disana tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk mengembangkan batik.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	√		Dengan adanya kelompok usaha tidak hanya akan memperlancar dan mempermudah kegiatan industri batik, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dikontrol oleh pemerintah. Sehingga ketika ada kendala pemerintah dapat langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	√		Manajemen keuangan memang hampir menjadi masalah diseluruh desa, sehingga perlu dorongan pelatihan agar bisa berkembang.
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.		√	Dalam membangun lembaga modal, kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan batik juga dipertimbangkan. Karena akan percuma membangun lembaga pemodal tetapi

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
				masyarakat disana tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk mengembangkan batik.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Dengan adanya tugas dan fungsi yang jelas akan menjadikan IKM lebih aktif dan giat untuk ikut terlibat dalam kelompok.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan tidak cukup hanya sekali, diantaranya inovasi motif dan manajemen keuangan yang menjadi kekurangan bagi beberapa desa.
5	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Memang beberapa pengrajin kurang mahir dalam mengelola keuangan, sehingga pelatihan terkait manajemen keuangan dibutuhkan. Begitu halnya inovasi motif yang sudah menjadi kendala di beberapa besar desa.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	√		Jelas, karena infrastruktur akan sangat mendukung dalam kegiatan industri.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.		√	Menyediakan lembaga pemodal tidak bisa langsung membangun lembaga modal. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan batik juga dipertimbangkan. Karena akan percuma membangun lembaga pemodal tetapi masyarakat disana tidak memiliki keinginan dan komitmen untuk mengembangkan batik.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Dengan adanya kelompok usaha tidak hanya akan memperlancar dan mempermudah kegiatan industri batik, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dikontrol oleh pemerintah. Sehingga ketika ada kendala pemerintah dapat langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
Arahan untuk seluruh tipologi				
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	√		Saat ini batik memang menjadi unggulan pamekasan, sehingga berbagai upaya pemasaran memang harus dicoba.
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	√		Setuju karena memang pemasaran melalui pameran saja tidak cukup. Sehingga dibutuhkan kerjasama misalnya dengan pihak swasta baik untuk memasarkan maupun menyediakan bahan baku. Kalau ada mitra harga beli bahan baku bisa lebih murah.
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	√		Limbah tekstil itu sangat berbahaya untuk lingkungan, apabila langsung dibuang tanpa diolah akan rusak lingkungan disana.
Usulan Arahan				
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik			Memang kemampuan membatik dimiliki secara turun temurun, motifnya juga jarang mengalamiperkembangan. Jadi, dengan adanya komunitas pendesain batik, tidak hanya membangun kreatifitas agar lebih inovatif, tetapi juga untuk mencetak kader-kader pembatik di Kabupaten Pamekasan.
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik			Penyediaan kios ini dilakukan untuk mempermudah pemasaran batik pamekasan dan berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin mereka berharap pemerintah membangun kios batik untuk setiap kelompok

Nama : Andri Isfaraini, SP.
 Jabatan : Kasubid Permukiman
 Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Pamekasan
 Telepin/HP : 081216230336

Usia : 30 Tahun
 Tanggal Pengisian : 6 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 09:18 WIB
 -Selesai : 09:49 WIB



Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	√		Memang apabila melihat kemampuan masyarakat, masih rendah. Dari segi nilai tambah pun masih sangat kurang. Dengan pelatihan akan dapat membantu mengatasi permasalahan yang demikian karena masyarakat yang tadinya tidak tau menjadi tau.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Kelompok usaha tidak berjalan dengan maksimal bisa jadi tidak dikelola dengan baik karena tidak ada rasa tanggung jawab antar anggota. Dengan adanya kelompok dengan pembagian tugas yang jelas akan berkembang karena semua anggota merasa punya tanggung jawab.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	√		Lembaga modal memang di beberapa desa batik sudah tersedia, tetapi untuk mengakses masih mengalami kesulitan. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktauan pengrajin mengenai prosedur dan ketentuan agar bisa memanfaatkan lembaga pemodal. Disini peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan. Bisa dengan bekerjasama dengan lembaga pemodal untuk membantu memberikan informasi.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.	√		Memang apabila melihat kemampuan masyarakat, masih rendah. Dari segi inovasi motif sebagian besar monoton. Dengan pelatihan akan dapat membantu mengatasi permasalahan yang demikian karena masyarakat yang tadinya tidak tau menjadi tau.

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
3	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Dengan kelompok usaha akan mempermudah pemasaran dan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, juga dapat menjembatani agar lebih mudah mengakses lembaga pemodal.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Karena apabila dibangun lembaga pemodal belum tentu dimanfaatkan. Jadi melihat komitmen dari pengrajin di desa yang bersangkutan juga. Lebih baik mengoptimalkan manfaat lembaga modal yang ada.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Karena apabila dibangun lembaga pemodal belum tentu dimanfaatkan. Jadi melihat komitmen dari pengrajin di desa yang bersangkutan juga. Lebih baik mengoptimalkan manfaat lembaga modal yang ada.
4	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	√		Kelompok usaha tidak berjalan dengan maksimal bisa jadi tidak dikelola dengan baik karena tidak ada rasa tanggung jawab antar anggota. Dengan adanya kelompok dengan pembagian tugas yang jelas akan berkembang karena semua anggota merasa punya tanggung jawab.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	√		Memang telah dilakukan pelatihan oleh pemerintah daerah, tujuannya memang agar kemampuan pengrajin meningkat. Tetapi memang dibutuhkan pelatihan yang lebih intensif lagi.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.		√	Karena apabila dibangun lembaga pemodal belum tentu dimanfaatkan. Jadi melihat komitmen dari pengrajin di desa yang bersangkutan juga. Lebih baik mengoptimalkan manfaat lembaga modal yang ada.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Kelompok usaha tidak berjalan dengan maksimal bisa jadi tidak dikelola dengan baik karena tidak ada rasa tanggung jawab antar

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
				anggota. Dengan adanya kelompok dengan pembagian tugas yang jelas akan berkembang karena semua anggota merasa punya tanggung jawab.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Memang telah dilakukan pelatihan oleh pemerintah daerah. tujuannya memang agar kemampuan pengrajin meningkat. Tetapi memang dibutuhkan pelatihan yang lebih intensif lagi.
5	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Memang telah dilakukan pelatihan oleh pemerintah daerah. tujuannya memang agar kemampuan pengrajin meningkat. Tetapi memang dibutuhkan pelatihan yang lebih intensif lagi.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	√		Infrastruktur memang sangat penting dan hal ini memang sudah dipertimbangkan dalam Masterplan Batik
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.		√	Karena apabila dibangun lembaga pemodal belum tentu dimanfaatkan. Jadi melihat komitmen dari pengrajin di desa yang bersangkutan juga. Lebih baik mengoptimalkan manfaat lembaga modal yang ada.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Dengan kelompok usaha akan mempermudah pemasaran dan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Selain itu juga dapat menjembatani agar lebih mudah mengakses lembaga pemodal.
Arahan untuk seluruh tipologi				

Klaster	Indikasi Arah	S	TS	Alasan
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	√		Sebenarnya pemasaran batik sudah dilakukan, biasanya melalui pameran. Tetapi hanya sebatas pameran tadi, belum ada pemasaran yang lebih inovatif oleh pemerintah daerah.
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	√		Kerjasama tentu sangat diperlukan, khususnya dnegan pihak swasta. Selama ini masih sebatas kerjasama antar instansi di pamekasan.
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	√		Pengolahan limbah sangat dibutuhkan agar industri batik lebih berkelanjutan. Karena apabila limbah yang dihasilkan mengganggu tetangga yang tidak membuat tentunya akan menimbulkan konflik yang dapat menghambat industri untuk berkembang. Sehingga untuk pengolahan limbah sebaiknya disediakan baik secara komunal maupun perorangan
Usulan Arah				
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok			Dengan standarisasi harga, akan menguntungkan bagi pengrajin karena tidak akan ada permainan harga yang dapat merugikan pengrajin lainnya. Standarisasi harga ini tentunya sesuai dengan kualitas batik yang dibuat juga.

Nama : Moh. Ridwan, SE. Usia : 49 Tahun
 Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan, Tanggal Pengisian : 6 April 2015
 Koperasi Hukum dan Perundang-undangan Waktu Pengisian
 Instansi : Dinas Koperasi dan UKM -Selesai : 10:13 WIB
 Kabupaten Pamekasan
 Telepin/HP : 082244397717



Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	√		Supaya ada peningkatan pengetahuan, karena selama ini sifat pengrajin dalam kegiatan industri masih tradisional dalam beberapa bidang. Dengan pelatihan dapat mengalami perkembangan kemampuan pengrajin
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Selama ini cara kerja pengrajin masih tidak teratur, jadi kalau ada tupoksi akan lebih tepat dan hasilnya akan lebih maksimal.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	√		Informasi jelas sangat diperlukan, termasuk informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengrajin agar dapat mengakses lembaga pemodal.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.	√		Dibutuhkan pelatihan inovasi motif yang berkelanjutan atau bertahap, termasuk juga adanya monitoring dan evaluasi.
	Membentuk kelompok usaha dengan	√		Pengrajin selama ini melakukan kegiatan industri secara individual,

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.			maka dibutuhkan pembentukan kelompok agar kendala dalam industri dapat diselesaikan bersama.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Memang dibutuhkan, tetapi juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari pengrajin itu sendiri.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Informasi jelas dan akses yang mudah sangat diperlukan, termasuk informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengrajin agar dapat mengakses lembaga pemodal, jadi tidak hanya menyiapkan saja.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	√		Pengrajin selama ini melakukan kegiatan industri secara individual, maka dibutuhkan pembentukan kelompok agar kendala dalam industri dapat diselesaikan bersama.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	√		Dibutuhkan pelatihan manajemen keuangan yang berkelanjutan atau bertahap, termasuk juga adanya monitoring dan evaluasi.
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.	√		Memang dibutuhkan, tetapi juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari pengrajin itu sendiri.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Selama ini cara kerja pengrajin masih tidak teratur, jadi kalau ada tupoksi akan lebih tepat dan hasilnya akan lebih maksimal.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan atau bertahap, termasuk juga adanya monitoring dan evaluasi.

Klaster	Indikasi Arah	S	TS	Alasan
5	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan atau bertahap, termasuk juga adanya monitoring dan evaluasi.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	√		Pelayanan infrastruktur yang selama ini telah ada perlu ditingkatkan secara maksimal karena beberapa pengrajin mengalami kendala dari segi pelayanan.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.	√		Memang dibutuhkan, tetapi juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari pengrajin itu sendiri.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Pengrajin selama ini melakukan kegiatan industri secara individual, maka dibutuhkan pembentukan kelompok agar kendala dalam industri dapat diselesaikan bersama.
Arah an untuk seluruh tipologi				
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	√		Perlu dilakukan selain itu, agar pemasaran batik lebih luas dan bahan baku lebih mudah diperoleh
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	√		Pemerintah memang memiliki tupoksi khusus terkait batik, akan tetapi keterbatasan pemerintah disini juga ada. Missal dalam dana dan lainnya. Dengan adanya pihak ketiga atau mitra tadi dapat membantu keterbatasan tadi.

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	√		Apabila terus menerus dibuang ke sawah secara sembarangan semakin lama limbah akan mencemari lingkungan.
Usulan Arahan				
	Pengembangan Peran dan fungsi Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran			Koperasi merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan batik. pemerintah sebagai fasilitator tentunya perlu melakukan inovasi untuk mendukung IKM Batik, salah satunya dengan pelayanan koperasi yang tidak hanya simpan pinjam tetapi juga dalam kegiatan produksi, desain dan pemasaran diharapkan dapat dibantu dengan adanya koperasi.

Nama : Drs. Affan, MM.
 Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
 Instansi : Universitas Madura
 Telepin/HP : 08123178355

Usia : 63 Tahun
 Tanggal Pengisian : 6 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 11:08 WIB
 -Selesai : 11:37 WIB



Klaster	Indikasi Arahkan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	√		Pengrajin batik memang kurang ahli salah satunya dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu peran untuk mengembangkan sebetulnya Pemerintah Daerah setempat yang harus lebih aktif mengembangkan potensi lokal, salah satunya melalui pelatihan.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Kelompok usaha yang ada saat ini memang tidak bermanfaat secara optimal kepada anggota kelompok, yaitu yang paling diuntungkan adalah ketua kelompok. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka semua yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan tetapi semua pihak diuntungkan termasuk anggota.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	√		Pemodolan itu memang penting, tetapi aturan yang dipakai oleh lembaga modal kelihatannya terlalu berat, sehingga pengrajin enggan untuk kesana. Oleh karena itu, seharusnya akses dan prosedur lebih dipermudah dan diperlonggar.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkala. Terutama pelatihan inovasi motif. Selain itu, dalam pelatihan dilakukan pemberian motivasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak enggan mengikuti

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
				pelatihan.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Dengan adanya kelompok usaha kepentingan akan dirangkul bersama. Jadi tidak lagi kepentingan individu. Begitu juga dengan permasalahan dirangkul bersama dengan anggota kelompok.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Pemodal itu memang penting, tetapi aturan yang dipakai oleh lembaga modal tadi kelihatannya terlalu berat, sehingga pengrajin enggan untuk kesana. Oleh karena itu, seharusnya akses dan prosedur lebih dipermudah dan diperlonggar.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah		√	Pemodal itu memang penting, tetapi aturan yang dipakai oleh lembaga modal tadi kelihatannya terlalu berat, sehingga pengrajin enggan untuk kesana. Oleh karena itu, seharusnya akses dan prosedur lebih dipermudah dan diperlonggar.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	√		Dengan adanya kelompok usaha kepentingan akan dirangkul bersama. Jadi tidak lagi kepentingan individu. Begitu juga dengan permasalahan dirangkul bersama dengan anggota kelompok.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkala. Baik salah satunya pelatihan mengenai manajemen keuangan. Selain itu, dalam pelatihan dilakukan pemberian motivasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak enggan mengikuti pelatihan.
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.		√	Pemodal itu memang penting, tetapi aturan yang dipakai oleh lembaga modal tadi kelihatannya terlalu berat, sehingga pengrajin enggan untuk kesana. Oleh karena itu, seharusnya akses dan prosedur lebih dipermudah dan diperlonggar.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Kelompok usaha yang ada saat ini memang tidak bermanfaat secara optimal kepada anggota kelompok, yaitu yang paling diuntungkan adalah

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
5				ketua kelompok. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka semua yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan tetapi semua pihak diuntungkan termasuk anggota.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkala. Baik pelatihan inovasi motif maupun manajemen keuangan. Selain itu, dalam pelatihan dilakukan pemberian motivasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak enggan mengikuti pelatihan.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkala. Baik berupa pelatihan inovasi motif maupun manajemen keuangan. Selain itu, dalam pelatihan dilakukan pemberian motivasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak enggan mengikuti pelatihan.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	√		Infrastruktur berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi, karena dapat memperlancar kegiatan distribusi, produksi maupun pemasaran dalam kegiatan industri khususnya.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodalan.		√	Pemodalan itu memang penting, tetapi aturan yang dipakai oleh lembaga modal tadi kelihatannya terlalu berat, sehingga pengrajin enggan untuk kesana. Oleh karena itu, seharusnya akses dan prosedur lebih dipermudah dan diperlonggar.
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Dengan adanya kelompok usaha kepentingan akan dirangkul bersama. Jadi tidak lagi kepentingan individu. Begitu juga dengan permasalahan dirangkul bersama dengan anggota kelompok.
Arahan untuk seluruh tipologi				

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	√		Seperti saya katakana tadi, pemerintah harus peka terhadap potensi lokal yang ada dan harus mampu berupaya mengangkat potens tersebut. Promosi merupakan salah satu bentuk nyatanya.
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	√		Kerjasama memang penting dalam sebuah industri, tanpa kerjasama industri akan sulit berkembang. Karena kita ketahui industri kecil menengah seperti batik banyak sekali keterbatasannya.
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	√		Memang dibutuhkan pengolahan limbah karena limbah pabrik sangat berbahaya bagi lingkungan seperti sawah yang juga merupakan mata pencaharian masyarakat.

Nama :Mansur
 Jabatan :Anggota Asosiasi Batik
 Instansi :Asosiasi Pembatik Pamekasan
 Telepin/HP :087750550440

Usia :42 Tahun
 Tanggal Pengisian :19 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai :15:48
 -Selesai :16: 24

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
1	Pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dalam industri batik oleh pemerintah daerah	√		Beberapa pengrajin telah menerima pelatihan, tetapi pelatihan yang diberikan biasanya mengenai motif batik dan proses pewarnaan. Kalau yang diberikan mengenai hal itu sebagian besar pengrajin sudah paham. Bahkan seringkali pengrajin lebih mengerti caranya daripada pemateri.
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Selama ini kelompok batik memang hanya sebatas bekerjasama dalam proses membuat, dari satu motif biasanya dilanjutkan oleh orang lain agar motifnya lebih beragam. Sedangkan masalah bahan baku dan penjualan memang seadanya saja. Kalau bisa bekerjasama dengan pihak ketiga perlu bantuan pemerintah tentunya agar bisa berhasil.
	Memberikan kemudahan akses ke lembaga pemodal dengan memberikan informasi mengenai tata cara dan prosedur yang jelas serta mudah dimengerti oleh pengrajin.	√		Pengrajin disini memang merasa kesulitan memanfaatkan lembaga pemodal, seperti meminjam modal karena syarat-syaratnya tidak tau. Selain kesulitan juga khawatir karena takut tidak mampu membayar cicilan. Jadi kalau bisa bagi pengrajin dipermudah dalam hal cicilan dan diberi informasi yang jelas tentang persyaratan dan prosedurnya.
2	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif batik oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan memang tidak cukup sekali apalagi jumlah kita banyak. Jadi butuh berkali-kali pelatihan. Materi dalam pelatihan juga yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuatu yang sudah pengrajin ketahui yang menjadi bahan dalam pelatihan.
	Membentuk kelompok usaha dengan	√		Kelompok usaha memang dibutuhkan tetapi harus dijalankan dengan

Klaster	Indikasi Arah	S	TS	Alasan
	tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.			benar. Pembagian tugas dari setiap anggota mungkin bisa membantu agar kelompok usaha berjalan dengan baik.
	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota	√		Kelompok usaha memang dibutuhkan tetapi harus dijalankan dengan benar. Pembagian tugas dari setiap anggota mungkin bisa membantu agar kelompok usaha berjalan dengan baik.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai manajemen keuangan industri batik oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan memang tidak cukup sekali apalagi jumlah kita banyak. Jadi butuh berkali-kali pelatihan. Materi dalam pelatihan juga yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuatu yang sudah pengrajin ketahui yang menjadi bahan dalam pelatihan.
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
	Pembagian tugas yang jelas dalam kelompok usaha.	√		Pembagian tugas dari setiap anggota mungkin bisa membantu agar kelompok usaha berjalan dengan baik.
	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan memang tidak cukup sekali apalagi jumlah kita banyak. Jadi butuh berkali-kali pelatihan. Materi dalam pelatihan juga yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuatu yang sudah pengrajin ketahui yang menjadi bahan dalam pelatihan.

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
5	Pemberian pelatihan secara berkala mengenai inovasi motif dan manajemen keuangan oleh pemerintah daerah.	√		Pelatihan memang tidak cukup sekali apalagi jumlah kita banyak. Jadi butuh berkali-kali pelatihan. Materi dalam pelatihan juga yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuatu yang sudah pengrajin ketahui yang menjadi bahan dalam pelatihan.
	Peningkatan pelayanan dan pemerataan distribusi infrastruktur pendukung industri batik meliputi jaringan jalan, listrik dan air bersih.	√		Jalan banyak yang rusak dan kadang jadi malas untuk pergi beli bahan baku. Kalau tidak karena ada pesanan kadang lebih memilih tidak membuat. Air dan listrik juga kadang di beberapa desa kurang. Terutama air pada musim kemarau agak susah karena pengrajin memakai sumur bor sendiri-sendiri.
	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal.	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
	Membentuk kelompok usaha dengan tujuan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing anggota.	√		Kelompok usaha memang dibutuhkan tetapi harus dijalankan dengan benar. Pembagian tugas dari setiap anggota mungkin bisa membantu agar kelompok usaha berjalan dengan baik.
Arahan untuk seluruh tipologi				
	Meningkatkan upaya pemerintah dalam memasarkan batik Pamekasan melalui teknik pemasaran yang lebih inovatif	√		Pengrajin memang membutuhkan bantuan dari pemerintah salah satunya dalam memasarkan batik pamekasan tadi
	Membentuk kerjasama dengan pihak penyedia bahan baku serta butik atau <i>Art Shop</i> dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan untuk memasarkan produk	√		Kami pengrajin, memang membutuhkan pihak ketiga untuk memasarkan batik. Selain itu, juga untuk menyediakan bahan baku karena pengrajin juga kesulitan membeli bahan baku karena modalnya juga terbatas.

Klaster	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
	Penyediaan pengolahan limbah secara komunal maupun perorangan melalui kerjasama pemerintah dengan pengrajin	√		Limbah sementara ini masih dibuang ke tanah kosong dan selokan. Kalau pemerintah mau bekerjasama menyediakan akan sangat membantu karena kami sendiri tidak tau bagaimana cara menyediakannya

Lampiran E3: Kuesioner Delphi Tahap 2 (Iterasi 1)



KUESIONER WAWANCARA DELPHI

Arahan Pengembangan Industri Batik Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan

Bapak Ibu/ Saudara/i yang saya hormati.

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir, saya selaku mahasiswa/i mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya, memohon kesediaan dari Bapak/ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul **“Pengembangan Industri Kreatif Batik Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan”**. Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui arahan pengembangan industri batik berdasarkan persepsi bapak/ibu.

Identitas Peneliti

Nama : Wilda Al Aluf

NRP : 3611100008

Judul Penelitian : Arahan Pengembangan Industri Kreatif Batik Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan

Pendahuluan


Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten miskin di Indonesia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan sebanyak 19,01%. Jumlah pengangguran mencapai 2,19% dari jumlah angkatan kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya pengembangan untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu upaya pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi lokal berupa keterampilan membatik secara turun temurun yang saat telah berkembang menjadi industri di tujuh kecamatan. Akan tetapi kondisi wilayah, yang meliputi rendahnya kualitas SDM, kurangnya pelayanan Infrastruktur dan rendahnya peran Kelembagaan masih belum mendukung perkembangan industri batik. Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan industri kreatif batik melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang melatar belakangi penelitian, yaitu pada aspek SDM, kelembagaan dan infrastruktur pendukung industri batik. Dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan wilayah, sehingga berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja baru yang prospektif dan dapat menjamin peningkatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

KUESIONER**Identitas Responden :**

Nama : Usia :
 Jabatan : Tanggal Pengisian :
 Instansi : Waktu Pengisian :
 Alamat Rumah : -Mulai :
 Telepon/HP : -Selesai :

Tabel Permasalahan masing-masing tipologi Industri Batik Pamekasan

Tipologi	Permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan yang pernah diberikan kepada pengrajin tidak sesuai dengan kebutuhan, salah pelatihan yang dibutuhkan adalah manajemen keuangan, namun yang diberikan adalah pelatihan motif batik. - Kelompok usaha belum berfungsi secara optimal, dibuktikan dengan permasalahan dalam industri batik yang seringkali ditanggung oleh masing-masing anggota tanpa adanya penyelesaian dalam kelompok. - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia tempat pengolahan limbah ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pengrajin dalam mengolah limbah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin. - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan keahlian pengrajin rendah khususnya dalam inovasi motif. - Motif batik tidak mengalami perkembangan, dari tahun ketahun motif masih terpaku pada ciri khas motif batik Madura konvensional - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia lembaga pemodal, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan. - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat memwadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 3. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan pengrajin dalam menghasilkan nilai tambah. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pemodal tidak dimanfaatkan secara optimal, pengrajin masih mengandalkan modal pribadi, sehingga kendala modal pada pengraji batik terus berkepanjangan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini mengakibatkan

Tipologi	Permasalahan
	<p>keahlian pengrajin rendah khususnya dalam melakukan inovasi motif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan dalam mengelola industri sehingga kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah cukup rendah. - Kelompok usaha tidak difungsikan secara optimal, sehingga kendala dalam industri ditanggung oleh masing-masing pengrajin - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.
<p>5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan pengrajin tergolong rendah, yaitu sebagian besar lulusan SD atau belum lulus SD yang berakibat pada kemampuan pengrajin dalam mengelola industri baik melakukan inovasi batik maupun menghasilkan nilai tambah. - Motif batik tidak mengalami perkembangan dari tahun ke tahun - Pengrajin belum bisa mengelola keuangan dengan baik ditunjukkan dari nilai tambah yang diperoleh oleh pengrajin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. - Kurangnya pelatihan yang diberikan pada tipologi ini, padahal melihat kapasitas pengrajin yang rendah, pelatihan sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan inovasi motif dan menghasilkan nilai tambah. - Belum tersedia lembaga pemodal yang dapat membantu permasalahan modal pengrajin industri batik. - Belum tersedia kelompok usaha yang dapat mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan industri pada tipologi 5. - Kurangnya pelayanan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih), sehingga menghambat perkembangannya industri. - Peran pemerintah kurang dirasakan dalam mengembangkan industri batik, karena hanya meliputi penyediaan <i>showroom</i> dan pasar batik. - Tidak ada kerjasama dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku dan pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pengrajin yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian:

Pernyataan berikut ini merupakan arahan yang diajukan oleh peneliti untuk pengembangan industri Kreatif Batik Pamekasan. Arahan ini diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom:

S : Setuju dengan arahan yang diusulkan

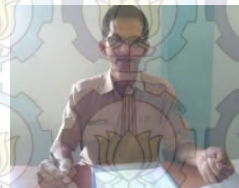
TS : Tidak setuju dengan arahan yang diusulkan

Tipologi	Indikasi Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah			
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah			
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal			
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal			
1, 2 dan 3	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran			
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok			
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik			
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik			

Lampiran E4: Hasil Kuesioner Delphi Tahap 2 (Iterasi 1)

Nama : R. Moh. Tjipto Djajadi
 Jabatan : Kepala Bidang Bina Industri
 Instansi : Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kabupaten Pamekasan
 Telepin/HP : 087850518686

Usia : 52 Tahun
 Tanggal Pengisian : 7 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 08:43 WIB
 -Selesai : 09:05 WIB



Tipologi	Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Jika memang dengan lokasi lembaga modal yang jauh dari desa yang bersangkutan akan mempersulit pengrajin, setidaknya satu lembaga pemodal jenisnya bisa berupa koperasi dan lainnya. hanya saja desa yang mau dibangun tersebut harus siap juga. Jangan sampai setelah disediakan lembaga pemodal tapi justru tidak dimanfaatkan. Peran pemerintah disini dalam membangun kesiapan pengrajin salah satunya dengan mengadakan pelatihan.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
1, 2 dan 3	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran	√		Koperasi saat ini memang hanya berperan dalam pemodal seperti simpan pinjam. Akan lebih baik apabila memang bisa membantu dalam atribut-atribut produksi, desain dan pemasaran.
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok	√		Standarisasi harga dibutuhkan dan juga harus sesuai dengan kualitas batik yang dihasilkan agar pengrajin tidak ada yang merasa dirugikan dengan standarisasi harga tadi.

Nama : Andri Isfaraini, SP.
 Jabatan : Kasubid Permukiman
 Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan
 Daerah Kabupaten Pamekasan
 Telepin/HP : 081216230336

Usia : 30 Tahun
 Tanggal Pengisian : 7 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 09:30 WIB
 -Selesai : 09:50 WIB



Tipologi	Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Saya sepakat, dengan catatan dalam penyediaan dan pendistribusian lembaga pemodal harus melihat komitmen dari pengrajin di Desa Panaan, Desa Angsanah, dan desa lainnya.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
1, 2 dan 3	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran	√		Apabila dalam koperasi telah bisa membantu mulai dari kegiatan produksi, desain dan pemasaran akan lebih efektif lagi dan akan berdampak baik bagi kemajuan industri batik.
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik	√		Melihat kemampuan pengrajin memang pembentukan komunitas dibutuhkan karena disana akan dilatih kemampuan mereka supaya lebih inovatif dan akan menciptakan kader yang lebih baik dari sebelumnya
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik	√		Penyediaan kios bisa dilakukan tetapi untuk kelompok-kelompok yang memang punya keinginan untuk mengembangkan batiknya

Nama : Moh. Ridwan, SE.
 Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan, Koperasi
 Hukum dan Perundang-undangan
 Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
 Pamekasan
 Telepin/HP : 082244397717

Usia : 49 Tahun
 Tanggal Pengisian : 7 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 10: 25 WIB
 -Selesai : 10:43 WIB



Tipologi	Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Untuk lembaga pemodal memang dibutuhkan tetapi kesiapan pengrajin juga perlu dipertimbangkan dalam pendistribusian lembaga modal.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
1, 2 dan 3	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik	√		Karena keterbatasan pengrajin saat ini dan untuk keberlanjutan IKM batik dibutuhkan kader yang selektif.
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik	√		Karena akan mempermudah pembeli untuk dapat memperoleh produk pada satu titik.
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok	√		Saat ini sudah banyak permainan harga oleh pengrajin sehingga merugikan pengrajin yang lain.

Nama : Drs. Affan, MM.

Usia : 63 Tahun

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi

Instansi : Universitas Madura

Telepin/HP : 08123178355

Tanggal Pengisian : 6 April 2015

Waktu Pengisian

-Mulai : 11:38 WIB

-Selesai : 12:03 WIB



Tipologi	Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Modal memang krusial dalam IKM, apabila lembaga modal telah tersediadan difungsikan dengan baik keberadaannya akan sangat membantu mereka.
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		
1, 2 dan 3	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran	√		Jika memang nantinya koperasi dapat mempermudah dalam kegiatan produksi, pemasaran dan desain ya justru baik. Karena pengrajin menjadi lebih mandiri nantinya
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik	√		Kaderisasi memang diperlukan tidak hanya terlatih dengan desain yang tradisional tetapi juga mampu melakukan inovasi desain batik
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik	√		Dengan begitu pemasaran jadi terpusat dalam satu tempat. Tetapi kios yang dibangun harus dimanfaatkan secara optimal
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok	√		Karena standarisasi harga dapat menuntut kualitas batik yang lebih baik.

Nama : Mansur
 Jabatan : Anggota Asosiasi Batik
 Instansi : Asosiasi Pembatik Pamekasan
 Telepin/HP : 087750550440

Usia : 42 Tahun
 Tanggal Pengisian : 19 April 2015
 Waktu Pengisian
 -Mulai : 16:25
 -Selesai : 16: 38

Tipologi	Arahan	S	TS	Alasan
2	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
3	Pengadaan lembaga pemodal dengan akses yang mudah	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
4	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
5	Peningkatan dan pemerataan distribusi lembaga pemodal	√		Memang sangat dibutuhkan karena pengrajin sebagian besar kesulitan dalam memperoleh modal
1, 2 dan 3	Pengembangan Peran Koperasi dalam mendukung industri batik meliputi produksi, desain dan pemasaran	√		Masalah pengrajin saat ini memang pemasaran apabila semua pihak salah satunya koperasi dapat membantu memasarkan batik, batik Pamekasan akan semakin maju
	Pengembangan komunitas pendesain batik untuk menciptakan inovasi batik dan kader pembatik	√		Melihat minat dari para pemuda terhadap batik sebenarnya sudah dapat dipastikan akan ada penerus, dengan adanya komunitas barangkali bisa membantu mereka untuk terus berlatih batik
	Penyediaan kios untuk masing-masing kelompok usaha batik	√		Kami kesulitan menjual batik karena semakin banyak yang membatik. Tetapi setiap kelompok punya ciri khas sendiri, sehingga dengan adanya kios masing-masing kelompok akan menambah daya tarik pembeli
	Standarisasi harga dan mutu/kualitas batik dalam kelompok	√		Memang diperlukan karena ada pengrajin yang sering menjual harga jauh lebih murah dari yang lain, sehingga batik punya pengrajin lain kadang tidak laku

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Anonim. Metode penelitian. <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23828/3/Chapter%20II>. Diakses: 7 November 2014.
- Anonim. 2011. *Produksi Batik Madura Selama Musim Tembakau Menurun*. <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/74298/produksi-batik-madura-selama-musim-tembakau-menurun>. Diakses tanggal 8 Oktober 2014.
- Anisyah, Yulianita. 2011. *Analisis Perkembangan Industri Batik Semarang*. http://eprints.undip.ac.id/32448/1/jurnal_analisis_perkembangan_industri_batik_semarang.pdf. Diakses: 5 November. 2014.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah: Edisi Pertama*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2014. *Pamekasan Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2014. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pamekasan 2009-2013*.
- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. 2nd. Sage Publications. London.
- Blakely, Edward J and Bradshaw. 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice Third Edition*. Sage Publications. London.
- Critical Reading of the UK Experience*. Elsevier Journal. London
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. 2011. *IKM Batik*.
- Drake, Graham. 2003. *This Place Gives Me Space: Place in Creativity in the Creative Industries*. Elsevier Journal
- (EDA) Economic Development Administration. 1997. *Cluster Based Economic Development. A Key to Regional Competitiveness*. Information Design Associates and ICF Kaiser International. Oct. 2007.

- Ferdinand A. 2002. *StructuralEquationModelling Dalam Penelitian Manajemen : Edisi 2, Seri Pustaka Kunci 03/BP*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Guild, Laura. *Macro-Economic Models of Transportation Productivity*. <http://www.bu.edu/transportation/9.30.ppt>.
- Hasan, Iqbal dan Misbahuddin.2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Edisi Kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, N. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta.
- Hidayat, Rachmad dan Yudha Herlambang. 2009. *Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil Menengah di Madura*. Jurnal Teknik Industri, V0:11, No. 1. Juni 2009, pp.61-71. ISSN 1411-2485.
- Irianto, Jusuf. 1996. *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Joreskog, Karl G. dan Sorborn, Dag. 1993. *LISREL 8 : A GuideTo The Program And Applications*. Chicago
- Kuncoro, Mudarajad. 2002. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudarajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*. ANDI OFFSET. Yogya.
- Kusnendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural. Satu dan Multi-groupSample dengan LISREL*. Alfabeta. Bandung
- Kusumadiantho, Herman Josef. 1998. *Pentingnya Produktivitas Pada Suatu Industri Menghadapi Tantangan Era Globalisasi*. Vol:1, No.2 November 1998.
- Long, J. Scott. 1983. *Confirmatory Factor Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Malecki, E.J and Varaiya P. 1986. *Inovation and Changes in Regional Structure*. Handbook of Regional and Urban Economics. Volume 1: Edited by Peter Njikamp
- Mufarrikoh, Zainatul. 2011. *Analisis Biplot Pada Perusahaan Batik Berdasarkan Profil Indutri Studi Kasus di*

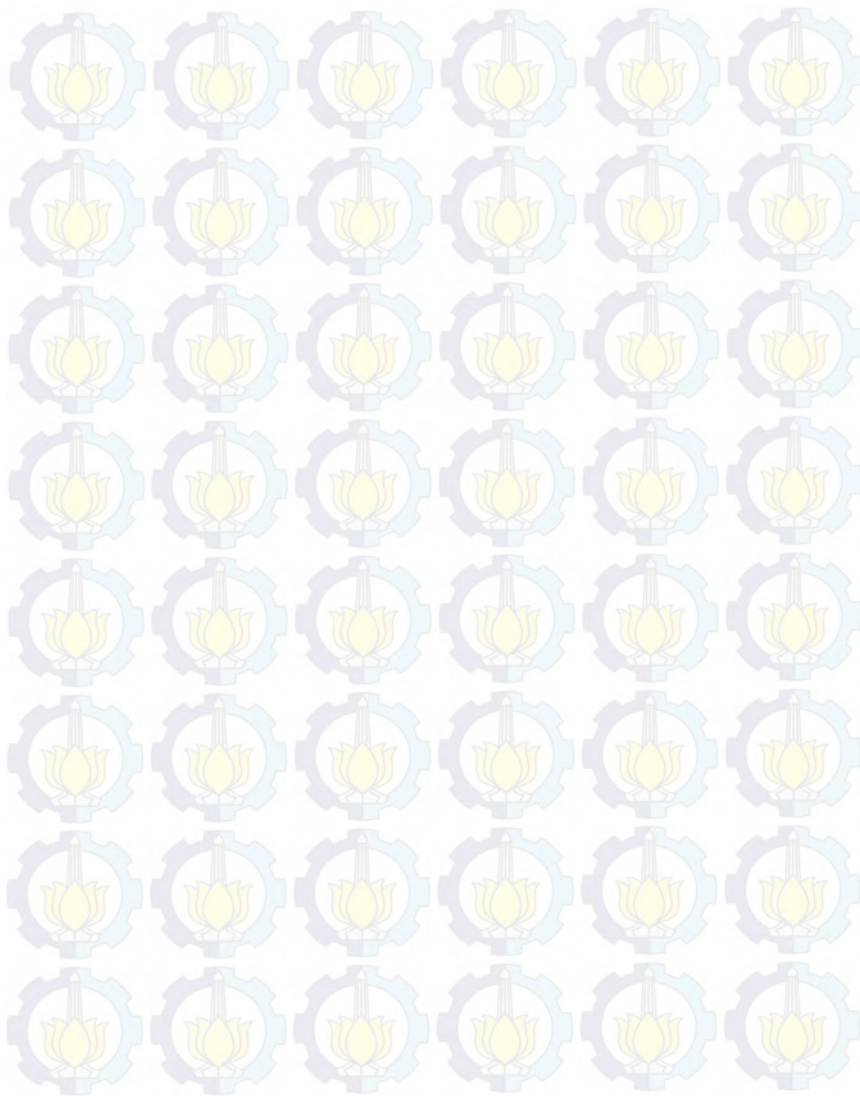
- Kabupaten Pamekasan. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-15150-1307100043-Chapter1.pdf>. Diakses: 9 Oktober 2014.
- Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu. Semarang.
- Munir, Risfan dan Fitanto, Bahtiar. 2007. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Local Governance Support Program (LGSP)
- Mutia, Noor, dkk., *Analisis Teori Komparatif Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Gunadarma
- Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pafitri, Alibfa Anjar. 2010. *Pengembangan Kawasan Agroindustri Berdasarkan Komoditas Unggulan di Wilayah Kabupaten Bangkalan*. Tugas Akhir Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Surabaya.
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 Kabupaten Pamekasan*.
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. Harvard Business Review
- Porter, Michael E. 1998. *Cluster and the New Economics of Competition*. Harvard Business Review November-Desember 1998.
- Porter, Michael E. dan Orjan, Sovell. 1998. *The Role Of Geography in the Process of Innovation and the Sustainable Competitive Advantage of Firms*.
- Purwaningsih, Erni. 2008. *Pencapaian Eko-Efisiensi Melalui Kerjasama Antar Pelaku Usaha pada Klaster Industri Batik Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan*. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putra, Bryan. *Pengaruh Karakteristik Bisnis Terhadap Kinerja Perusahaan Bidang Ekonomi Kreatif di Kota Bandung dengan Menggunakan Metode SEM (Structural Equation Modeling)*. <https://www.google.com/search?q=industri+kreatif&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org>.

mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb.Diakses : 10 Desember 2014.

- Qomarudin. 2011. *Analisis Efisiensi Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik di Desa Kauman Kota Pekalongan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Raf, Mulyadi. 2012. *Analisis Eksploratori Faktor Daya Saing Industri Kecil: Studi padaSentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.14, No.2, September 2012: 91-101.
- Ratna, Purwati dan Fatmawati. 2013. *Prospek dan Strategi Pengembangan Industri Batik Tulis di kabupaten Sumenep*. Cemara Vol:10, No.1, Nopember 2013. ISSN: 2087-3484.
- Riyadi, Dedi Masykur. 2000. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*.Diseminasi dan Diskusi Program-program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. 15-16 Mei 2000. Bogor.
- Bappeda Kabupaten Pamekasan. 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032*.
- Rustiadi, Erman, *et.al.*, 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Edisi Mei 2006. Fakultas Pertanian Bogor.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Mnggunakan SPSS*. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Sink, D. Scott. 1985. *Productivity Management Planning, Measurement and Evaluastion, Control and Improvement*. John Wiley & Sons, Inc. USA
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Stern, Nicholas. 2001 . *A Strategy For Development*. Washington DC: World Bank: 143.
- Stiffel, Bruce, Vanesa Watson, dan Henri Acselrad. 2007. *Dialogues in Urban and Regional Planning 2*. London: Routledge Taylor and Francis Group.

- Suharso, Puguh. 2009. *Model Analisis Kuantitatif “TEV”*. Indeks. Jakarta.
- Tamaya, Vicka, Susi Sulandari dan Laituhayju Dyah. *Optimalisasi Kampung Batik dalam Mengembangkan Industri Batik Semarang di Kota Semarang*. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=72933 &val=4925](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=72933&val=4925). Diakses :31 Oktober 2014.
- Trousdale. W. 2003. *Manual of Local Economic Development: A Rosurce Guide for Strategy Planning by Local Governments and Civil Society Organizations*. (Vol. 1-4). UN HABITAT. EcoPlan International, Inc.
- Umar, Husein. 1998. *Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gamedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, Sri. 2013. *Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)*. PascasarjanaUnud. <http://www.slideshare.net/wahyuni04/pembangunan-ekonomi-lokal-2764725>.
- Wibowo, Yuli, *et. al*. 2011. *Diagnosis Kelayakan Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut yang Berkelanjutan*. ARGOINTEK Vol 5, No 1 Maret 2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Pamekasan, 26 Juni 1993, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal, yaitu di TK BHINA ANAPRASA Pamekasan, SDN POLAGAN III, SMPN 1 LARANGAN dan SMAN 1 Pamekasan. Setelah lulus dari SMA tahun 2011, Penulis melanjutkan studi di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP-ITS melalui jalur SNMPTN UNDANGAN dan terdaftar dengan NRP. 3611100008.

Selama kuliah di ITS, Penulis aktif dalam beberapa kegiatan seminar di dalam kampus ITS dan diluar kampus ITS baik sebagai peserta maupun panitia. Disamping itu, Penulis juga aktif mengikuti organisasi sebagai Staff Departemen Keilmiahaan dan Keprofesian Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) periode tahun 2012-2013 dan menjadi sekretaris Biro Keilmooahan dan Keprofesian Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) pada tahun 2013-2014. Selain organisasi di dalam jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Penulis, aktif sebagai anggota FORKAMP (Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan) yang melaksanakan kegiatan tahunan berupa perlombaan robotika dan *try out* bagi siswa-siswi di Madura.